

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
WISATA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA
PEMBANGUNAN DESA MANDIRI**

(Studi Pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Yusuf Dheo Rivaldy

145030107111025



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMNISTRASI PUBLIK
PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

Bukan tentang bagaimana dipikirkan tetapi tentang bagaimana terus melangkah. Seberat apapun rintangan menghadang tetaplah terus berjalan.

(Aldy, 2018)

Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang. Tapi ia juga harus dijalani dengan berpikir ke depan.

(Soren Kierkegaard)



*Skripsi ini kupersembahkan untuk Orang Tua tersayang.
Telah memberikan segala cinta kasih untukku, yang tiada henti
mencurahkan doa dan motivasi untuk kesuksesanku.*

*Serta untuk saudara, sahabat-sahabat dan orang tersayang.
Telah menemani perjuangan penulisan skripsi ini, yang menjadi
tempatku berkeluh kesah dan memberikan segala motivasi untukku.*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata Dalam
Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri (Studi
Pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten
Malang)

Disusun oleh : Yusuf Dheo Rivaldy

NIM : 145030107111025

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 17 Mei 2018

Komisi Pembimbing,



Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si

NIP. 19710828 200604 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 7 Juni 2018
 Jam : 11.00 – 12.00 WIB
 Skripsi atas Nama : Yusuf Dheo Rivaldy
 Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata Dalam
 Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri
 (Studi Pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon
 Kabupaten Malang)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mohamad Nuh, SIP., M.Si
 NIP. 197108282006041001

Anggota



Akhmad Amirudin, S.AP., M.AP., M.Pol.S.c
 NIP. 198704262015041001

Anggota



Drs. Sukanto, MS
 NIP. 195912271986011001





PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 17 Mei 2018



Yusuf Dheo Rivaldy

NIM. 145030107111025

RINGKASAN

Yusuf Dheo Rivaldy, 2018. **Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri (Studi Pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**. Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Mohammad Nuh, M.Si.

Desa sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan negara, yang merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah negara. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pemerintah pusat berkewajiban untuk menghormati hukum adat yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya terdapat hak-hak tradisional dan nilai-nilai kebudayaan yang dipengaruhi oleh unsur historis yang telah berkembang sejak lama, sehingga wajib untuk adanya penghormatan dan pengakuan terhadap desa oleh pemerintah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, memunculkan sebuah konsep baru yang lebih komprehensif. Konsep baru inilah yang dijadikan pedoman dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui pembangunan desa mandiri.

Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai desa wisata melalui Keputusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Nomor 556/561/KEP/421.108/2014 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Malang Tahun 2014. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari.

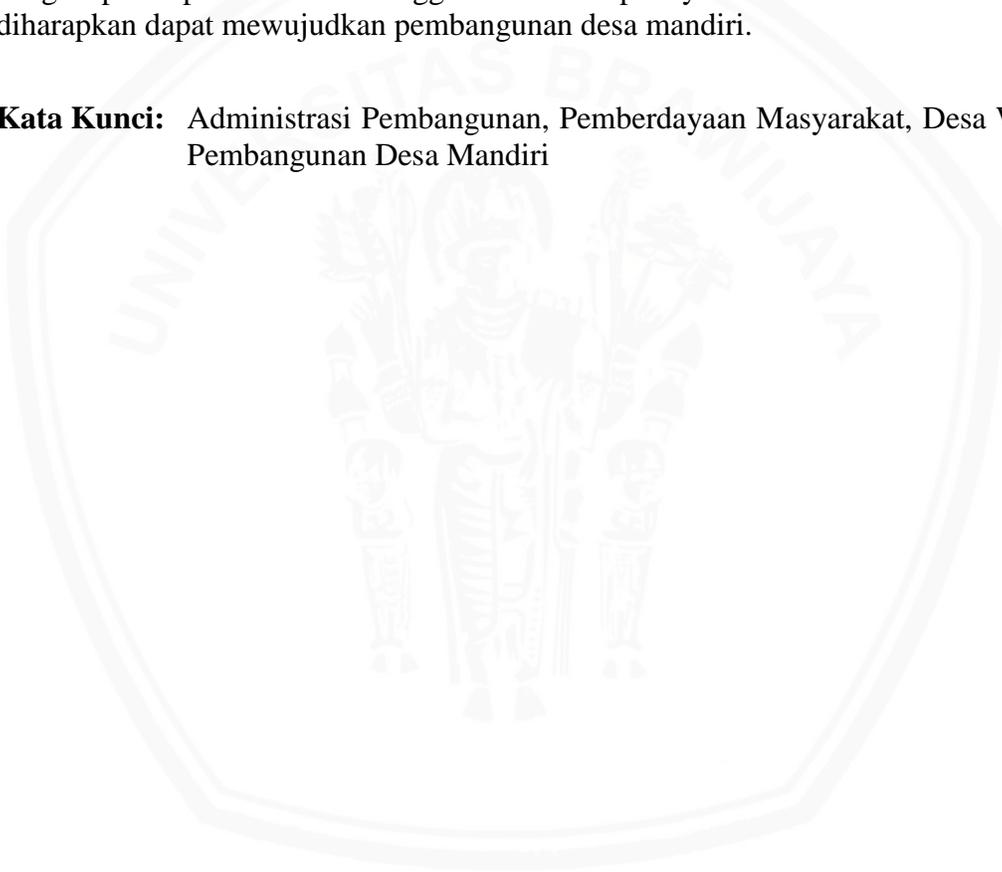
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Bendosari. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles & Huberman dalam Sugiyono (2015: 337).

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari telah di implementasikan dengan baik dalam rangka mewujudkan pembangunan desa mandiri, walaupun hasilnya belum maksimal. Hal

tersebut ditandai dengan meningkatnya kehidupan masyarakat dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata masih terdapat hambatan-hambatan yang dapat menjadikan program ini berjalan kurang maksimal, contohnya adalah rendahnya kualitas SDM masyarakat, keterbatasan dana, dan kurangnya peran dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan atas penelitian ini terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri, yaitu meningkatkan sosialisasi terkait pemberdayaan berbasis wisata, menentukan skala-skala prioritas pembangunan, dan terus meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Sehingga untuk kedepannya Pemerintah Desa Bendosari diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa mandiri.

Kata Kunci: Administrasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Wisata, Pembangunan Desa Mandiri



SUMMARY

Yusuf Dheo Rivaldy, 2018. **Society Empowerment Based on Tourism in Realizing Self-Sufficient Village Development (Study at Bendosari Pujon Malang)**. Chairman of the Advisory Committee: Dr. Mohammad Nuh, M.Sc.

Village as a system in state administration, which is the forerunner to the establishment of a state. In relation to state administration, the central government is obliged to respect the customary law prevailing in the society. Basically, there are traditional rights and cultural values that influenced by historical elements that have developed for a long time, so the government should be respect and recognize the village. The issued of Law No. 6, 2016 about the village, raised a new and more comprehensive concept. This new concept is used as a guideline in village development that aimed to improve the independence and prosperity of society through the development of self-sufficient villages.

Bendosari, Pujon, Malang designated as village tourism through the Decision of Department of Culture and Tourism of Malang No.556/561/KEP/421.108/2014 regarding to the Stipulation of Village Tourism Malang 2014. This program aimed to improve the welfare and the independence of the society through the society empowerment based on tourism in realizing self-sufficient village development. In this study, the researcher aimed to reveal how the process of society empowerment based on tourism in realizing self-sufficient village development in Bendosari and what were the supporting and inhibiting factors related to the society empowerment based on tourism in realizing self-sufficient village development in Bendosari.

This research used descriptive research method with qualitative approach. Research site in this research was Bendosari, Pujon, Malang. The researcher used primary data that obtained from interview and documentation, while secondary data obtained from document related to the topic of research. Data collection techniques were conducting interview, observation and documentation. Data analysis method used in this research was interactive model from Miles & Huberman in Sugiyono (2015: 337).

The results of this study revealed that the society empowerment based on tourism in Bendosari had been implemented well in order to realize self-sufficient village development, although the results had not been optimal. It is characterized by the increasing of society life in economic, social and environmental aspects. In the society empowerment based on tourism there were some obstacles that made this program couldn't run maximally, for example the low quality of human resources, lack of funds, and lack of role of the Government of Malang.

Some suggestions that could be considered for this research related to the society empowerment based on tourism in realizing self-sufficient village development, which was improving the socialization related to empowerment based on tourism, determining the priority scale of development, and improving cooperation with outside parties continuously. So, the Government of Bendosari was expected to realize the self-sufficient village development in the future.

Keywords: *Administrative Development, Society Empowerment, Tourism Village, Self-Sufficient Development*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri (Studi Pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, Ms selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mohammad Nuh, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.



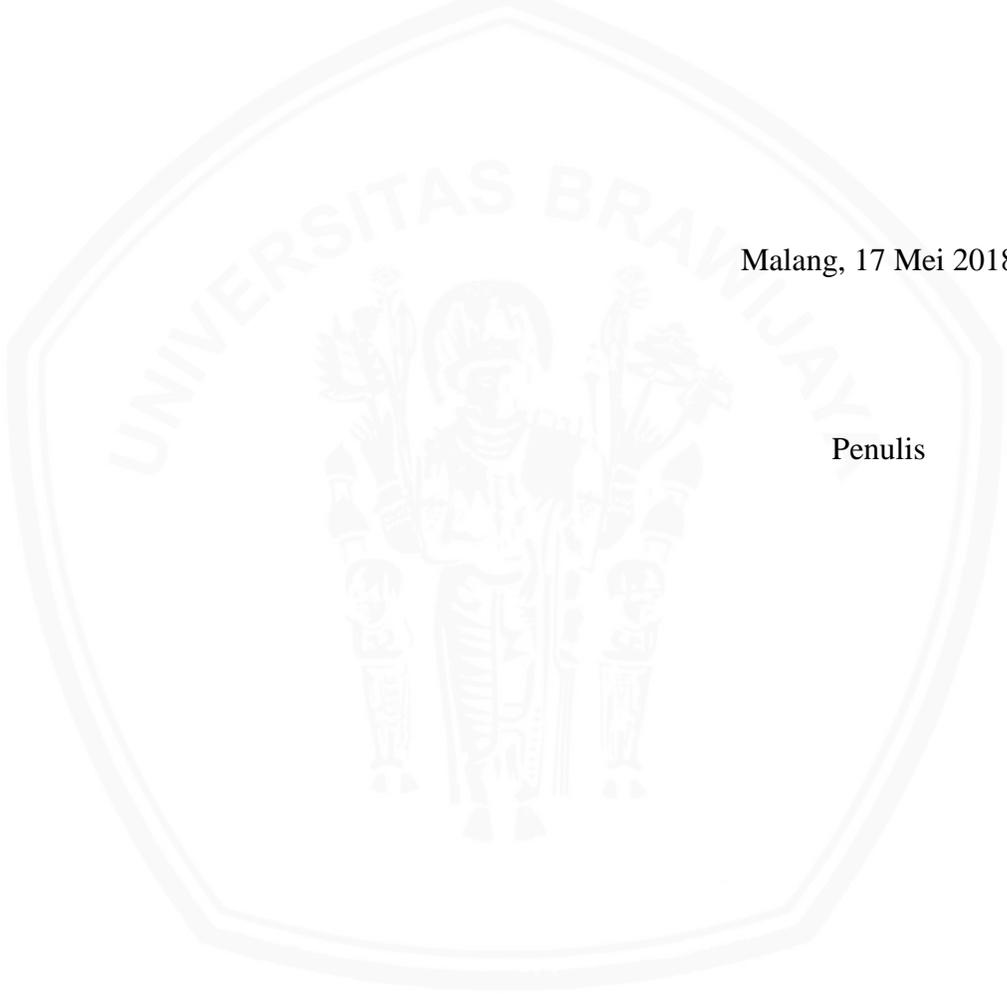
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah di berikan.
6. Bapak M. Khoirun selaku Kepala Desa Bendosari beserta seluruh perangkat Desa Bendosari, dan Masyarakat Desa Bendosari atas pendampingan dan dukungan penuh selama penelitian.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Djyadi dan Ibu Lulus Gemi Nastiti atas doa yang tiada henti, semangat, motivasi, dan kepercayaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak-kakak penulis, Ferizal Helmi Affandi, Ade Chandra Robbiq Firly serta Yoan Pricillia yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan dari awal kuliah hingga saat ini, MMG Squad (Gading, Azmi, Fathan, Irul, Rizal, Ozi, Qonita dan Dinar) yang bersedia meluangkan waktu menemani penulis dan dukungan selama penyusunan skripsi.
10. Sahabat-sahabat penulis, Rumah Bu Marni (Dika, Dimas, Dani, Rohmad dan Yudha), Suhat Squad (Daniez, Rico, Ilham Pur, Dipta, Galih, Ilham dan Khuluq) serta sahabat-sahabat lainnya yang memberikan dukungan dan menghibur penulis selama melakukan penyusunan skripsi.
11. Terimakasih kepada penyemangatku dan orang-orang tersayang penulis, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan dan semangat selama penulis melakukan penyusunan skripsi.



12. Seluruh pihak yang berperan dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Demi kesempurnaan karya ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan keilmuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 17 Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kontribusi Penelitian.....	15
E. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan.....	19
B. Pemberdayaan Masyarakat	23
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat	23
2. Proses Pemberdayaan Masyarakat	26
3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	29
4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	33
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat	34
C. Desa	37



1.	Pengertian Desa	37
2.	Kedudukan Desa	40
3.	Struktur Desa	42
4.	Kewenangan Desa	46
D.	Desa Wisata	51
1.	Pengertian Wisata dan Pariwisata	51
2.	Definisi Desa Wisata	53
3.	Strategi dan Pendekatan dalam Pembangunan Desa Wisata	55
4.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa Wisata	59
E.	Pembangunan Desa Mandiri	60
1.	Definisi Desa Mandiri	60
2.	Strategi Pembangunan Desa Mandiri	62
3.	Tujuan Pembangunan Desa Mandiri	65
F.	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri	66
G.	Kerangka Berpikir	73

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	75
B.	Fokus Penelitian	77
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	80
D.	Jenis dan Sumber Data	81
E.	Teknik Pengumpulan Data	83
F.	Instrumen Penelitian	85
G.	Metode dan Analisis Data	86
H.	Pengujian Keabsahan Data	88

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Lokasi dan Situs	93
1.	Gambaran Umum Kabupaten Malang	93
2.	Gambaran Umum Desa Bendosari	102
B.	Penyajian Data dan Fokus Penelitian	110
1.	Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari	110
a.	Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari	110
b.	Pihak-pihak dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari	115
2.	Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa	



Bendosari	119
a. Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari	120
b. Bentuk Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari	123
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari	126
a. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	127
b. Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	133
c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	141
d. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	142
4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari	144
a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	145
b. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	145
C. Analisis Data dan Interpretasi Data	147
1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari	147
a. Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari	147
b. Pihak-pihak dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari	152
2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari	155
a. Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari	155
b. Bentuk Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari	159
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari	161
a. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	161
b. Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata	



di Desa Bendosari	166
c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	167
d. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	168
4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari	169
a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	169
b. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari	171
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	173
B. Saran	178
 DAFTAR PUSTAKA	179
 LAMPIRAN	182



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
Tabel 1:	Regulasi Lama vs Regulasi Baru	4
Tabel 2:	Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Malang	97
Tabel 3:	Jumlah Penduduk Desa Bendosari Menurut Golongan Usia tahun 2017	107
Tabel 4:	Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Bendosari Tahun 2017	108
Tabel 5:	Klasifikasi Mata Pencaharian Desa Bendosari Tahun 2017	109

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 1:	Indeks Pembangunan Desa 2014 Menurut Pulau	6
Gambar 2:	Langkah-Langkah Membangun Desa Mandiri	63
Gambar 3:	Kerangka Berpikir	74
Gambar 4:	Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Model Interaktif oleh Miles & Hubberman	87
Gambar 5:	Peta Administratif Kabupaten Malang	96
Gambar 6:	Peta Wisata Kabupaten Malang	101
Gambar 7:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bendosari	104
Gambar 8:	Peta Wilayah Desa Bendosari	105
Gambar 9:	Salah Satu Contoh Pengembangan Potensi Lokal Masyarakat Desa Bendosari	112
Gambar 10:	Salah Satu Contoh Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari Berkerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang	123
Gambar 11:	Air Terjun Grojokan Sewu	134
Gambar 12:	Air Terjun Grojokan Mutiara	135
Gambar 13:	River Track Sungai Panguripan	136
Gambar 14:	Pembangunan Sumber Manis	136
Gambar 15:	Wisata Petik Apel	137
Gambar 16:	Acara Kebudayaan Sedekah Bumi	137
Gambar 17:	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)	138
Gambar 18:	Salah Satu Biogas di Desa Bendosari	139
Gambar 19:	Produk Kerajinan Lampu Hias	139

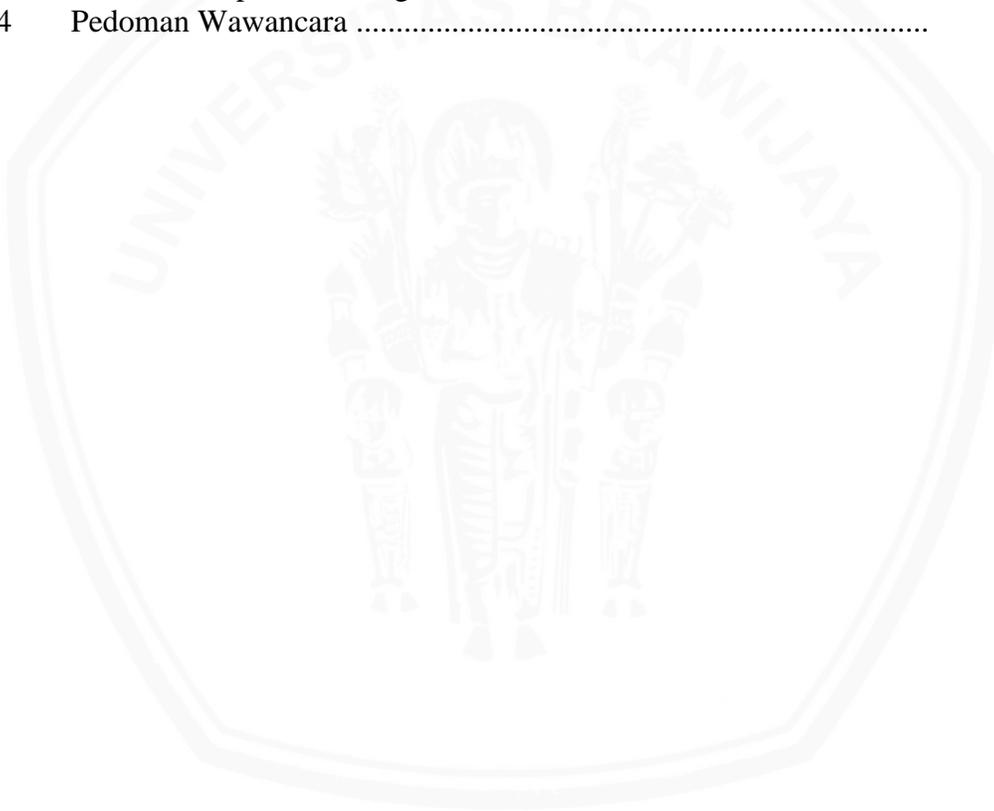


Gambar 20: Produk Kursi Anyaman	140
Gambar 21: Salah Satu Wahana di Taman Pinus Bendosari	140
Gambar 22: Coban Sadang Desa Bendosari	141



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Surat pernyataan telah selesai melakukan penelitian di Desa Bendosari	183
2	Foto Lokasi Penelitian di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	185
3	Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Nomor: 556/561/KEP/421.108/2014 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Malang Tahun 2014	188
4	Pedoman Wawancara	190



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut H.A.W Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan negara, yang merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah negara. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pemerintah pusat berkewajiban untuk menghormati hukum adat yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya terdapat hak-hak tradisional dan nilai-nilai kebudayaan yang dipengaruhi oleh unsur historis yang telah berkembang sejak lama, sehingga wajib untuk adanya penghormatan dan pengakuan terhadap desa oleh pemerintah. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah telah mengatur dan mengakui hak istimewa terhadap kesatuan hukum adat desa. Pengakuan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam pengertian desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Sedangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memunculkan paradigma dan konsep baru tentang kebijakan tata kelola desa secara nasional. Dalam Undang-Undang Desa menjelaskan adanya memberikan hak, kewenangan dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan serta kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pada dasarnya desa adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam bagian

penjelasan undang-undang tersebut, selain adanya kewenangan-kewenangan desa dinyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah memberikan hak-hak istimewa dan kewenangan kepada desa yang disebut dengan otonomi desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada untuk memperkuat peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adanya landasan hukum yang kuat terkait otonomi desa, diharapkan dapat mewujudkan “*development community*”. Desa tidak hanya berada pada tingkat administrasi atau bawahan daerah tetapi juga sebagai “*independent community*”, yaitu desa dan masyarakatnya turut berwenang dalam menentukan kebijakan atas kepentingan masyarakatnya sendiri. Secara garis besar lahirnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memunculkan konsep baru yang semakin komprehensif dalam mengatur desa serta dapat memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa. Demikian terdapat regulasi undang-undang yang baru menjadi landasan serta kekuatan hukum atas otonomi desa. Tersaji pada tabel 1 tentang perubahan regulasi lama menuju regulasi baru.

Tabel 1: Regulasi Lama vs Regulasi Baru

	Desa Lama	Desa Baru
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Delivery kewenangan dan program	Target	Mandat

Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	Government driven development atau community driven development	Village driven development
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: Sutoro Eko, dkk, Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: FPPD, 2014

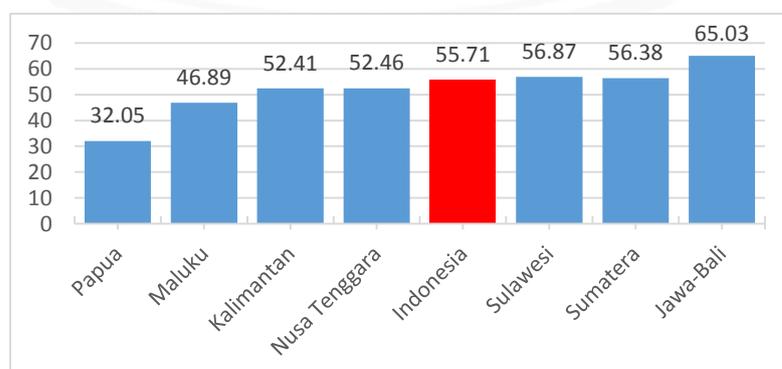
Berdasarkan tabel diatas, otonomi desa sebagai kekuatan atas hukum yang dimiliki desa untuk dapat membuat dan mengatur peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam masyarakatnya. Melalui otonomi desa tersebut, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri, namun tetap sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. Sehingga adanya regulasi baru tentang otonomi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa juga berwenang dalam membuat dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan untuk memaksimalkan pembangunan desa.

Selain adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dalam

RPJMN Tahun 2015-2019 memuat sasaran pembangunan desa yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa di tahun 2019. Untuk itu segala daya dan upaya pembangunan desa baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya perlu didorong dalam memenuhi pencapaian sasaran pembangunan.

Secara umum, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang luas dengan jumlah desa yang sangat banyak. Menurut data Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 desa dan hingga saat ini jumlah desa mandiri hanya sekitar 3,91% dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia. Berdasarkan IPD tahun 2014 dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu desa mandiri berjumlah 2.898 desa; desa berkembang 50.763 desa; dan desa tertinggal berjumlah 20.432 desa (www.bappenas.go.id). Adapun kondisi perkembangan desa di Indonesia dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014, sebagai berikut:

Gambar 1: Indeks Pembangunan Desa 2014 Menurut Pulau



Sumber: Buku Indeks Pembangunan Desa 2014

Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan jika terdapat tiga pulau yang memiliki nilai indeks diatas rata-rata indeks pembangunan desa nasional (55,71). Ketiga pulau tersebut adalah Pulau Jawa-Bali, Sulawesi, dan Sumatera. Sementara empat pulau lain di Indonesia masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sedangkan indeks pembangunan desa paling tinggi terdapat di Pulau Jawa-Bali (65,03). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (32,05). Sehingga Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya pembangunan desa untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri.

Desa mandiri adalah desa yang telah terpenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Desa mencakup beberapa aspek yaitu, kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan (Imron Bulkin, 2015: 3). Pada dasarnya desa mandiri sebagai desa yang mempunyai kekuatan secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Hal ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka memperkuat kemandirian desa, masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, membuat perencanaan, melaksanakan serta mengawasi dan mengevaluasi pembangunan dalam rangka terwujudnya desa mandiri. Sehingga dalam konsep desa mandiri, diharapkan pemerintah desa dan masyarakat dapat melakukan kerjasama yang baik terhadap sistem pemerintahan secara mandiri. Sebagaimana

pendapat dari Sri Edi Swasono (1998: 26) tentang kemandirian, yaitu kemandirian tidak lain adalah kewaspadaan yang dicapai melalui otaktivitas, swakarsa, kreativitas dan kesadaran menolong diri sendiri, serta menolak ketergantungan. Dalam pendapat tersebut dapat diartikan bahwa adanya wewenang otonomi desa diharapkan muncul kemandirian desa serta tidak adanya ketergantungan sebagai sasaran pembangunan desa mandiri.

Menurut Progam Nasional Pembeerdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2007, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan desa mandiri adalah sebagai berikut:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
2. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar.
3. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill.
6. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
7. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

8. **Transparansi dan Akuntabel.** Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
9. **Prioritas.** Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.
10. **Keberlanjutan.** Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, maka dasar dari pembangunan desa mandiri adalah pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dalam kegiatan pembangunan desa. Pemerintah Desa harus mendorong masyarakat agar ikut berperan aktif dalam proses pembangunan desa. Sehingga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana menurut H.A.W Widjaja (2003: 169), pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat berbagai strategi yang harus diperhatikan oleh pejabat atau tokoh desa. Menurut Prijono dan Pranaka (1996: 105-106) mengemukakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan

masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat masyarakat semakin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dalam upaya memberdayakan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk

mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Berdasarkan pada beberapa strategi pemberdayaan masyarakat tersebut, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun dan mendorong potensi yang berkaitan dengan kemandirian, meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan tanpa harus selalu bergantung pada pihak luar. Sehingga pemerintah membuat kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dengan dikeluarkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, dalam rangka menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata.

Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendampingan secara langsung ke desa-desa di Jawa Timur yang memiliki potensi wisata. Selama pendampingan, Bappeda aktif melakukan sosialisasi dan *workshop* serta penyusunan perencanaan program pengembangan desa wisata dan ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendampingan yang berlangsung pada tanggal 6-10 April 2016, Bappeda Provinsi

Jawa Timur juga mengundang Bappeda Kabupaten Malang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang (www.bappeda.jatimprov.go.id).

Demikian juga Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam acara (Musrenbang, 2014) telah bertekad untuk menjadikan kawasan Malang Raya sebagai sentral wisata dengan mengembangkan desa wisata berbasis agro dan ekowisata. Pengembangan desa wisata ini bertujuan untuk mengelola sumberdaya alam dan budaya tanpa merusak konsep ekologis dari lingkungan wisata itu sendiri dan juga dapat memajukan potensi pariwisata lokal hingga ke tingkat desa. Selain itu, terdapat kegiatan Sosialisasi Gerakan Sadar Wisata dan Akasi Sapta Pesona di Kabupaten Malang 2017, yang dihadiri oleh Bapak Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc., selaku Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia di Museum Singhasari Kabupaten Malang. Dengan memberikan pengarahan kepada para pelaku POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang ada di Kabupaten Malang, mengenai bagaimana Strategi dalam Pembangunan Pariwisata dan pentingnya menerapkan Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) merupakan aksi yang wajib dilakukan dalam pembangunan Pariwisata (disparbud.malangkab.go.id).

Secara empiris dengan adanya peraturan-peraturan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten Malang bahwa terdapat perhatian khusus dari pemerintah dalam memaksimalkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Sebagaimana yang terjadi di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sejak tahun 2009 mengembangkan program pembangunan wisata dengan melakukan pemberdayaan

masyarakat setempat. Pada saat ini Desa Bendosari direncanakan untuk dibangun sebagai desa wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan Desa Bendosari yang potensial dengan suasana yang masih alami dan asri sekaligus memajukan kesejahteraan penduduk setempat. Usaha-usaha yang dilakukan adalah memulai pembenahan di titik-titik yang berpotensi yang mampu menarik minat pengunjung. Program-program pembangunan desa wisata terus dikembangkan oleh Pemerintah Desa Bendosari. Dalam program pembangunan desa wisata diharapkan dapat memaksimalkan potensi-potensi desa dengan melibatkan masyarakat agar mampu berkembang menjadi masyarakat berswadaya (desa-bendosari.malangkab.go.id).

Pada kesempatan ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui secara terperinci bagaimana program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari dalam pembangunan desa mandiri melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Dengan pembangunan desa mandiri melalui pengembangan wisata perlu ditekankan bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Pada hakekatnya, masyarakat desa dapat ikut berperan dalam pembangunan desa dan memanfaatkan segala potensi yang ada di desanya, khususnya pada bidang wisata. Peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan keberhasilan suatu pembangunan desa serta menciptakan kemandirian masyarakat untuk melakukan perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penulis bermaksud untuk membahas lebih dalam mengenai strategi pembangunan desa mandiri yang merupakan bagian dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa melalui

pemberdayaan masyarakat berbasis wisata sebagai perwujudan dari pembangunan desa mandiri, maka dari itu penulis mengambil dengan judul skripsi: **“Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata Dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri” (Studi Pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, terdapat rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, terdapat tujuan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

2. Untuk dapat mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Dalam skripsi ini penulis mengharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap semua pihak, yang diantaranya adalah :

1. Kontribusi Akademis

a) Bagi Mahasiswa

Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembelajaran bagi mahasiswa dalam bidang studi Administrasi Publik terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri.

b) Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini dapat digunakan oleh penulis sebagai sarana untuk mencari ilmu dan informasi dalam bidang studi Administrasi Publik terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri, sehingga pada penulisan yang lain setelah ini menjadi lebih baik untuk ke depannya.

2. Kontribusi Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi bagi pemerintah, khususnya pemerintah desa terkait dalam mengambil kebijakan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri, sehingga ke depannya pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih baik, objektif, akuntabel dan berkualitas.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat dalam menentukan sikap serta merespon adanya kebijakan ataupun program yang dibuat oleh pemerintah, terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri, sehingga ke depannya pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa mandiri dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih luas.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikannya ke dalam lima bab, masing-masing bab memberikan pokok pembahasan yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang dari penulisan skripsi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka

terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Pada perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, identifikasi masalah adalah mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari. Selain itu terdapat tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi acuan dasar dalam penulisan skripsi ini. Isinya berupa landasan teori dan pernyataan dari para ahli. Terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan topik penyusunan skripsi, antara lain teori yang berkaitan dengan administrasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, desa, desa wisata, pembangunan desa mandiri dan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tentang metode-metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi yang meliputi: jenis penelitian,

fokus penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penulisan yang meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama mengobservasi dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah beserta alternatif penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan hasil observasi lapangan. Dalam bab ini juga akan diuraikan saran-saran yang sesuai dengan kesimpulan guna melakukan perbaikan di masa yang akan datang dan memberikan manfaat bagi pembacanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Menurut The Liang Gie dalam Pasalong (2011: 3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan menurut Sondang P. Siagaan (2009: 4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (*nation-building*). Berdasarkan dua pengertian tersebut, administrasi pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Menurut Paul Meadows dalam bukunya *Motivation For Change and Development Administration* (1968: 86) mendefinisikan bahwa, “*Development*

administration can be regarded as the public management of economic and social change in term of deliberate public policy. The development administrator is concerned with guiding change". Dalam definisi tersebut dapat diartikan, Administrasi Pembangunan sebagai kegiatan mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan perubahan sosial dalam hal menetapkan kebijakan publik. Sedangkan Sondang P. Siagaan (2009: 5) mendefinisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya beberapa pengertian tentang administrasi pembangunan yang merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Pada dasarnya administrasi pembangunan bertujuan untuk melakukan pembangunan nasional, yang dimana menuntut aparatur pemerintah mempunyai peran yang dominan. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan aparatnya untuk memaksimalkan peranan dan fungsinya. Terdapat langkah-langkah utama dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka

pembangunan nasional untuk memaksimalkan peranan dan fungsi pemerintah dalam administrasi pembangunan (Sondang P. Siagaan, 2014: 151-159), adalah sebagai berikut:

1. **Penumbuhan Motivasi untuk Membangun**
Para aparat pemerintah melalui kerjasama dengan berbagai kelompok elite politik, elite dunia usaha, dan elite pembentuk opini masyarakat bertanggungjawab untuk meningkatkan motivasi masyarakat. Tingkat keberhasilan suatu pembangunan terletak pada penumbuhan dan keagairahan motivasi untuk membangun.
2. **Perumusan dan Pengambilan Keputusan Politik**
Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan dari berbagai pertimbangan lain seperti, pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang tidak dimiliki oleh pihak mana pun; hanya pemerintah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh wilayah kekuasaan negara; dan pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara, yaitu rakyat.
3. **Peletakan Dasar Hukum**
Dalam rangka pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil, pemerintah mutlak perlu mengambil langkah peletakan hukum. Langkah ini sangat penting baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun melibatkan berbagai komponen masyarakat.
4. **Perumusan Rencana Pembangunan Nasional**
Pembangunan nasional merupakan upaya negara dalam rangka pencapaian tujuan akhir. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus memiliki ciri-ciri, seperti komprehensif, konsisten, sistematis, programatis, dan berkelanjutan.
5. **Penentuan dan Perumusan Program Kerja**
Penyusunan dan penentuan program kerja tidak hanya dimaksudkan sebagai rincian suatu rencana untuk mempermudah operasionalisasinya. Sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis dan bentuk masa depan yang akan dihadapi sehingga rencana dapat berjalan efektif dan efisien.
6. **Penentuan berbagai Proyek Pembangunan**
Penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapatkan perhatian karena tiga pertimbangan utama. Pertama, sering terdapat kecenderungan birokrasi untuk memproyeksikan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan anggaran pemerintah menjadi tidak efisien, sehingga perlu adanya penggunaan anggaran yang lebih efisien. Kedua, segala langkah yang diperlukan untuk menangani berbagai proyek pembangunan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas harus setinggi mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Ketiga, proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain harus mendapatkan perhatian khusus.

7. Implementasi Rencana dan Progam Kerja

Dalam implementasi rencana dan program kerja harus menentukan instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja para pelaksana pembangunan. Hal ini harus adanya *self monitoring* kepada para pelaksana kegiatan pembangunan.

8. Pentingnya Sistem Penilaian

Penilaian merupakan salah satu fungsi penting dalam proses administrasi dan manajemen pembangunan. Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan hasil yang seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan.

9. Pentingnya Mekanisme Umpan Balik

Mekanisme umpan balik digunakan dalam menentukan tingkat keberhasilan dari langkah-langkah utama dalam rangka pembangunan nasional. Umpan balik mempunyai fungsi penting, yaitu tidak timbul rasa puas berlebihan yang dapat menimbulkan arogansi institusional dan individual, serta keberhasilan lebih ditingkatkan karena untuk memastikan hasil yang dicapai dapat dirasakan secara optimal.

Berdasarkan langkah-langkah utama penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pembangunan nasional, yang dimana merupakan tujuan utama dari administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan menunjukkan bahwa terdapat dua fungsi dengan adanya pembangunan administrasi negara dan penyelenggara pembangunan atau manajemen pembangunan. Kedua ruang lingkup administrasi inilah yang menunjukkan upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan tidak hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan aparatnya, melainkan masyarakat juga harus ikut berperan. Dengan demikian, selain administrasi pembangunan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah. Namun juga dapat memberdayakan masyarakat agar pembangunan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari sebuah pembangunan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari konsep pembangunan masyarakat. Konsep pembangunan masyarakat (*Community Development*) adalah usaha-usaha yang terorganisasi bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Sebagaimana definisi pembangunan masyarakat (*Community Development*) menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

“as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress.” (Luz. A. Einsiedel 1968: 7).

Dari definisi tersebut bahwa pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

Dalam praktek pembangunan masyarakat berfokus pada kegiatan melalui potensi yang dimiliki masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam proses pembangunan. Menurut Jack Rothman (1974) dalam Harry Hikmat (2010: 66) terdapat 3 (tiga) model dalam praktek pembangunan masyarakat, yaitu:

1. Model Pengembangan Lokal (*Locality Development Model*)

Model pengembangan lokal adalah perubahan dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara optimal apabila melibatkan partisipasi aktif yang luas di semua lingkungan masyarakat tingkat lokal, baik dalam tahap penentuan tujuan maupun pelaksanaan tindakan perubahan. Pembangunan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif mereka, serta berdasarkan kepercayaan yang penuh terhadap prakarsa mereka sendiri.

2. Model Perencanaan Sosial (*Social Planning Model*)

Model ini menekankan proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif seperti kenakalan remaja, perumahan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dan masalah sosial lainnya. Selain itu, model ini menganggap penting menggunakan cara perencanaan yang matang dan perubahan yang terkendali untuk mencapai tujuan akhir secara rasional. Perencanaan dilakukan secara sadar dan rasional, dan dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan yang terjadi.

3. Model Aksi Sosial (*Social Action Model*)

Model ini menekankan tentang betapa pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah, dan sistematis. Selain itu juga meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber daya atau perlakuan yang lebih

sesuai dengan keadilan sosial dan demokrasi. Model ini bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar dalam lembaga utama atau kebiasaan masyarakat, selain itu melalui model ini juga ditekankan pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya, atau dalam hal pembuatan keputusan masyarakat dan mengubah dasar kebijakan organisasi formal.

Berdasarkan pengertian konsep pembangunan masyarakat di atas, sehingga dapat memahami secara mendalam tentang definisi pemberdayaan masyarakat. Menurut Widjaja (2003: 169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Menurut Harry Hikmat (2010: 3), konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat berhubungan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan.

Selanjutnya, Mc. Ardle (1989) dalam Harry Hikmat (2010: 3) berpendapat bahwa pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut, masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan serta potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, masyarakat juga dapat menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil kajian dan mengimplementasikan rencana tersebut. Sehingga proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara terus-menerus, dengan cara memantau dan mengkaji hasil kegiatannya (*monitoring* dan *evaluation*).

2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan dan kemandirian kepada masyarakat agar masyarakat lebih dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong dan memotivasi masyarakat, sehingga berkontribusi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih berdaya.

Menurut United Nation (1956: 83-92) dalam Tampubolon (2006) bahwa proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Getting to Know The Local Community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Sehingga pemberdayaan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara *stakeholder* dengan masyarakat.

2. *Gathering Knowledge about The Local Community*
Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *custom*, jenis pengelompokan serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
3. *Identifying The Local Leaders*
Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor *the local leaders* harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
4. *Stimulating The Comunity to Realize that it has Problems*
Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa masyarakat mempunyai masalah yang perlu untuk dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
5. *Helping People to Discuss their Problem*
Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
6. *Helping People to Identify their most Pressing Problems*
Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
7. *Fostering Self-Confidence*
Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
8. *Deciding on a Program Action*
Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
9. *Recognition of Streghts and Resources*
Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
10. *Helping People to Continue to Work on Solving their Problems*
Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara *contiuue*.
11. *Increasing Peoples Ability for Self-Help*
Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu

menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Sedangkan menurut Suharto (dalam Alfitri, 2011: 27), secara konseptual proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Pemungkinan**
Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
2. **Penguatan**
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya.
3. **Perlindungan**
Melindungi masyarakat, terutama masyarakat lemah, agar tidak dieksploitasi oleh kelompok masyarakat yang kuat.
4. **Penyokongan**
Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya.
5. **Pemeliharaan**
Menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa memberdayakan masyarakat dengan hanya memberikan bantuan uang bukanlah segalanya. Dengan memberikan bantuan material kepada masyarakat desa dapat menghambat swadaya masyarakat sehingga masyarakat hanya menggantungkan diri kepada pemberian bantuan. Oleh karena itu, diperlukan arahan dan bimbingan bagi masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat.

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dalam mencapai tujuan, jika dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga antara masyarakat dan aparat pemerintah tumbuh semangat untuk berkerja sama. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pola pendekatan yang tepat agar strategi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada hakekatnya tahap awal dalam melakukan pendekatan dengan menggambarkan konsep pemberdayaan tersebut. Menurut Sumaryadi (2005: 97-98), bahwa dalam menggambarkan konsep pemberdayaan terdapat tiga tahapan, yaitu tahapan politis, organisasi, dan individu. Adapun tiga tahapan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

1) Politis dan Nasionalis

Pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa kita setiap hari sebagai *mechanism of self-help for people* (mekanisme bantuan dari dan bagi orang lain). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa justru orang yang ingin mengubah sesuatu mengenai keadaan mereka saat ini adalah diri mereka sendiri. Ketergantungan pada orang lain secara perlahan-lahan diganti oleh ketergantungan pada diri sendiri. Oleh karena itu, pada tingkat nasional *self-dependency movement* (gerakan pada kemampuan diri sendiri) terus mendapatkan tempat. Alasan lain dan lebih pragmatis adalah bahwa ilmu ekonomi dari dorongan terhadap efisiensi yang lebih besar mendorong

pemerintah. Organisasi dari masyarakat untuk mencari cara-cara alternatif untuk menjadi lebih efisien, yang merupakan tanggapan terhadap meningkatkan daya dan ancaman pelayanan alternatif dari para pesaing.

2) Organisasi

Pemberdayaan mempunyai daya tarik. Selalu ada pencarian akan gagasan-gagasan dan konsep baru dari pemberdayaan lebih baru, lebih segar dari pada banyak teori peningkatan dan motivasi kerja yang sudah usang. Organisasi seperti *total quality*, *habitual improvement*, *self-directed team work*, *internal customer*, *competence management* dan sebagainya. Faktor pemberdayaan dan ketidakberdayaan terkandung dalam nilai-nilai, perilaku, sistem, prosedur dan budaya organisasi perubahan-perubahan harus dilakukan pada tingkat yang berada diluar pengaruh individu. Sehingga tidak mungkin terjadi tanpa adanya perencanaan dan pelepasan yang menyeluruh dari kekuatan oleh manager senior organisasi.

3) Individu

Proses pemberdayaan berbeda untuk setiap individu. Ada yang lama, ada juga yang disingkat prosesnya. Bila pemberdayaan efektif, hasilnya sangat inspirasional, individu sudah mengubah kehidupan mereka mencapai tujuan dan target yang terjangkau yang mereka anggap tidak mungkin. Mereka sudah membuka jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan yang menguntungkan mereka maupun organisasi jika kelompok individu yang diberdayakan secara kolektif berkerja sama, maka sinergitas tercapai.

Dengan menggambarkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui tiga tahapan diatas, maka pola selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan pemberdayaan. Pola pendekatan pemberdayaan bertujuan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Sebagaimana menurut Ross (1987: 77-78) mengemukakan tiga pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu:

1) *The Single Fuction Approach*

Progam atau teknik pembangunan yang dimana keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Pada umumnya pola pendekatan ini kurang mendapatkan respon dari masyarakat, karena progam ini sangat asing bagi masyarakat sehingga sulit untuk diadopsi. Pola ini menjadikan masyarakat bergantung kepada agen pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak berkembang.

2) *The Multiple Approach*

Dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, pola ini belum mampu memberdayakan masyarakat secara optimal, karena masyarakat bergantung pada tim ahli.

3) *The Inner Resources Approach*

Pola ini menekankan pada pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan dengan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai tujuan bagi masyarakat. Pola ini juga mendidik masyarakat menjadi

concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan potensi yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan pola pendekatan pemberdayaan tersebut, maka selanjutnya dengan melakukan langkah-langkah riil dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 35-36), bahwa terdapat langkah-langkah yang dapat diterapkan, yaitu:

1. Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang

Dalam membentuk iklim bagi masyarakat terdapat dua hal yang mendasar adalah sebagai berikut:

- a) Menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan/motivasi untuk berkembang. Proses menyadarkan masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.
- b) Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah, yang disebut dengan *participatory design and planning*. Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan rasa keberpihakan kepada masyarakat.

2. Memperkuat potensi yang ada

Memperkuat (*empowerment*) dilakukan dengan mengorganisasikan masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangun, yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan-masukan (input) serta membuka berbagai peluang-peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya.

3. Proses perlindungan (Pendampingan)

Secara aplikatif *empowerment* terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah dilakukan melalui dua hal, yaitu:

- a) Penguatan akses (*accessibility empowerment*). Pada pemberdayaan kelompok masyarakat *empowerment* dilakukan melalui menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok pemberdaya. Kebutuhan akan akses ini sangat menentukan *share* dan partisipasi antar *stakeholders* dalam proses pemberdayaan.
- b) Penguatan teknis (*technical empowerment*) dilakukan sebagai bagian dari kegiatan *advocacy* sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan. Keterlibatan secara aktif dari masing-masing *stakeholders* diwujudkan dalam bentuk *share* nyata seperti program, pendanaan dan kebijakan (*policy*).

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tujuan yang ingin dicapai, yang dimana untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Sebagaimana menurut Sulistiyani (2004), bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat. Sebagai suatu kemandirian masyarakat yang merupakan suatu kondisi yang dihadapi masyarakat dengan ditandai oleh kemampuan untuk berpikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang akan dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Sedangkan Menurut Mardikanto (2014: 202), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)
Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha.

2. Perbaikan Usaha (*Better Business*)
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)
Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pada dasarnya tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan perubahan-perubahan dengan adanya kemandirian masyarakat yang bertujuan untuk terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan terciptanya kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mendorong program-program pembangunan dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan-perubahan yang menciptakan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan taraf hidupnya. Masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan untuk

memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat, menurut Daham dan Bhatnagar (1980) mengemukakan bahwa terdapat faktor pendukung pemberdayaan masyarakat sebagai proses perubahan, yang meliputi:

- 1) Adanya keinginan manusia untuk selalu melakukan “motivasi” tentang kebutuhan-kebutuhannya, baik untuk menghadapi masalah-masalah jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian setiap individu atau masyarakat juga terus-menerus melakukan koreksi-koreksi terhadap cara atau upaya-upaya serta teknologi yang harus diterapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru.
- 2) Terjadinya persaingan-persaingan antar individu atau masyarakat yang berkeinginan memenuhi kebutuhan, dan hal ini hanya dapat dimenangkan melalui upaya-upaya perubahan dengan mengeksploitasi dan memotivasi sumberdaya (fisik dan non fisik) yang tersedia, dapat dimanfaatkan di lingkungannya.
- 3) Terjadinya kerusakan-kerusakan fisik dan kelembagaan sebagai akibat persaingan antar individu atau antar masyarakat yang saling bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga individu atau masyarakat merancang kegiatan-kegiatan untuk melakukan perubahan dengan menciptakan kondisi keseimbangan baru.

Berdasarkan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat, menurut Arsiyah (2009: 374) menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu, hambatan internal dan hambatan eksternal.

a. Hambatan internal antara lain:

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia
- 2) Tidak tersedianya bahan baku
- 3) Keterbatasan kemampuan manajerial
- 4) Tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki.

b. Hambatan eksternal antara lain:

- 1) Akses kelompok usaha bersama (KUB) sebagai mitra pemerintah sebagai jembatan pemerintah dengan pengusaha kurang optimal
- 2) Belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya faktor-faktor diatas yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dititiberatkan oleh kedua belah pihak, yaitu masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah atau *stakeholder* sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang bertindak untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah atau *stakeholder* harus saling bekerjasama dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat untuk memaksimalkan kemandirian masyarakat sebagai tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat.

C. Desa

1. Pengertian Desa

Pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan menjadi struktur hierarkhis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan suatu sistem dalam penyelenggaraan negara, yang merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah negara. Dalam pengertian secara etimologi kata desa berasal dari bahasa *Sansekerta*, *dechi* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Sedangkan dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja (2003: 3) bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut R. Bintarto (1989: 5), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Selanjutnya dalam pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat di definisikan sebagai berikut:

1. kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa);
2. kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan;
3. udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota);
4. tanah, tempat, daerah.

Dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Adapun pengertian tentang desa menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang merupakan landasan hukum undang-undang tentang Desa, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan diberikan kewenangan melalui otonomi desa. Sehingga desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Dengan adanya pengertian tentang desa yang diatur dalam undang-undang, maka selanjutnya menjadi suatu landasan

pemikiran dalam pengaturan desa terkait keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya beberapa pengertian para ahli serta pengertian dari undang-undang maupun peraturan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa desa merupakan *self community*, yaitu sebuah komunitas yang ada di masyarakat yang dapat mengatur dirinya sendiri atau urusan dan kebutuhannya sendiri. Pemahaman terhadap desa yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan otonomi asli desa. Sehingga pada hakekatnya memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

2. Kedudukan Desa

Kedudukan desa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*), sehingga desa bermakna ganda: pemerintahan dan masyarakat, atau berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Dengan demikian, desa dalam kedudukannya mengandung makna pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (*entitas*) hukum.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa merupakan organisasi pemerintahan yang mempunyai kedudukan paling kecil,

paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Pada kedudukan pemerintahan paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Kedudukan paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun “bawah” bukan berarti desa merupakan bawahan kabupaten/kota, atau kepala desa bukan bawahan bupati/walikota. Desa tidak berkedudukan sebagai pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Dalam pengertian “bawah” juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari.

Pada istilah kedudukan paling “depan” berarti bahwa desa berhubungan langsung dengan masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan. Sebagian besar masyarakat Indonesia pertama-tama datang kepada pemerintah desa setiap akan memperoleh pelayanan maupun menyelesaikan berbagai masalah sosial. Karena itu pemerintah dan perangkat desa, berbeda dengan pemerintah dan perangkat daerah, yang dimana kedudukannya berada paling depan untuk melayani masyarakat. Sedangkan istilah “dekat” berarti bahwa secara administratif dan geografis, pemerintah desa dan masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan berhubungan. Secara sosial,

“dekat” berarti bahwa desa menyatu dengan kehidupan sosial budaya sehari-hari masyarakat desa setempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Desa sebagai *self governing community* berbeda kedudukannya dengan pemerintahan formal, pemerintahan umum maupun pemerintahan daerah, yang dimana desa lebih menyatu dengan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

3. Struktur Desa

Struktur desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa mempunyai kewenangan yang sesuai dengan tugas-tugasnya, yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mempunyai kewenangan tentu mempunyai tugas-tugas maupun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa. Berikut ini adalah tugas dan kewajiban oleh Kepala Desa:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;

14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
15. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf (a) Undang-Undang Desa yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan, yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48, Perangkat Desa terdiri atas:

1. Sekretariat desa;
2. Pelaksana kewilayahan;
3. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa.

4. Kewenangan Desa

Dengan adanya azas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa, sehingga menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan Pemerintah Desa dan Kepala Desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan (*entitas*) hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Kewenangan merupakan suatu elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya atau pemerintahannya sendiri. Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki desa meliputi: kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; kewenangan di bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, kewenangan di bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan kewenangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal-usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 19 dan 103 Undang-Undang Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, yang meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Kewenangan lokal berskala desa, dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya keempat kewenangan tersebut, desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri secara berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat. Desa juga mempunyai dua kewenangan lain, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak mengatur dan mengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan peraturannya sendiri, sesuai dengan hukum adat serta sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, desa juga bertanggungjawab merencanakan,

menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

a. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul

Pada kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Desa bahwa hak-hak asli desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir pada tahun 1945, yang dimana tetap dibawa dan dijalankan oleh desa sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli juga muncul dari prakarsa desa maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kewenangan hak asal-usul desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf (a) Undang-Undang Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, kewenangan tersebut terdiri atas: a) sistem organisasi masyarakat adat; b) pembinaan kelembagaan masyarakat; c) pembinaan lembaga dan hukum adat; d) pengelolaan tanah kas desa; e) pengembangan peran masyarakat desa. Dalam ruang lingkup kewenangannya dibebaskan lagi secara terperinci dalam Pasal 2 Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan dalam Pasal 103 Undang-Undang Desa, yang diantaranya meliputi: pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat.

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pada kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana Pasal 33 huruf (b) Undang-Undang Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kewenangan tersebut diatur juga dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah pengelolaan pasar desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu. Kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, mempunyai penjelasan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa.
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa.
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa.
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa.
6. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Dari beberapa penjelasan kewenangan lokal berskala desa tersebut, kewenangan desa meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Pemerintahan Desa, bidang pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa mengacu pada kewenangan yang

muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu agar kewenangan tersebut dapat sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan dapat diterima dan dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke lingkungan desa. Pasal 20 Undang-Undang Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4) dan (5):

“Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. Karena pada hakekatnya setiap Kementerian Sektoral memiliki proyek masuk ke dalam desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di lingkungan desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan Undang-Undang Desa ini, semua program tersebut adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa untuk diatur dan diurus oleh desa. Dengan

dimikian, diharapkan dapat mendorong desa untuk berdaulat, mandiri dan berkepribadian sebagaimana cita-cita pemerintahan sekarang ini. Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga di atur dalam kewenangan lokal berskala desa.

D. Desa Wisata

1. Wisata dan Pariwisata

Dalam kajian terhadap desa wisata tidak lepas dari pengertian tentang wisata maupun pariwisata. Sebagaimana beberapa pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, adalah sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
5. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
7. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
8. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Dari beberapa pengertian tentang kepariwisataan diatas, terdapat juga pengertian lain dari wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sedangkan dalam konteks destinasi wisata harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang cinderamata (I Gede Pitana, 2005: 101). Destinasi Pariwisata dikembangkan atas dasar potensi daya tarik wisata yang dikembangkan secara sinergis dengan pengembangan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam kesisteman yang utuh dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 dalam konteks Pengembangan Destinasi Pariwisata terdapat sejumlah potensi sekaligus sebagai kekuatan Indonesia untuk dapat berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Potensi tersebut antara lain adalah: (1) kekayaan dan keragaman sumber daya pariwisata nasional, (2) pertumbuhan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dan destinasi, (3) kesiapan dan pertumbuhan investasi fasilitas

penunjang wisata di berbagai daerah, (4) atensi dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

2. Definisi Desa Wisata

Dengan adanya pengertian dari wisata dan pariwisata, maka selanjutnya dapat mendefinisikan tentang desa wisata. Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan (Soetarso Priasukmana, 2001: 37).

Sedangkan menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001: 37), desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi daerah tujuan wisata.

Karakteristik inilah yang menjadi acuan bahwa sebuah desa wisata harus memiliki tradisi dan budaya yang masih asli. Beberapa faktor pendukung lainnya adalah dengan adanya ciri khas seperti makanan khas, sistem sosial serta berbagai potensi wisata yang ada. Namun, sebuah desa wisata membutuhkan sumberdaya alam dan lingkungan yang menjadi salah satu faktor penting dari kawasan desa wisata.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001: 38), penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut:

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan persyaratan desa wisata diatas, terdapat konsep penting dalam komponen desa wisata. Sebagaimana menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 69), terdapat dua konsep penting dalam komponen desa wisata, yaitu:

1. Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan

sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa, membatik dan lain sebagainya yang lebih spesifik.

Dalam pembangunan desa wisata harus memperhatikan dua konsep yang mendasar, yaitu persyaratan dan komponen desa wisata itu sendiri. Dengan adanya persyaratan dan komponen tersebut, pembangunan desa wisata dapat terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya, dapat menyusun strategi pembangunan dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

3. Strategi dan Pendekatan dalam Pembangunan Desa Wisata

Pada hakekatnya, pembangunan desa wisata membutuhkan sebuah strategi dan pendekatan yang tepat demi kelangsungan terciptanya sebuah kawasan desa wisata. Sebagaimana strategi dan pendekatan dalam bidang pariwisata menurut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia tentang pembangunan desa wisata. Dalam konsep pendekatan dan strategi Program PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan dengan strategi, sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan Masyarakat**
Seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.
2. **Keberpihakan Kepada yang Miskin**
Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada masyarakat miskin.
3. **Desentralisasi**
Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat.

4. Partisipatif
Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan.
5. Keadilan dan Kesetaraan Gender
Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata harus menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang kepariwisataan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan.
6. Keswadayaan
Masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.
7. Keterpaduan Program Pembangunan
Program yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain.
8. Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Meningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
9. Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi
Dalam pembangunan pariwisata melibatkan sektor lain yang terkait.
10. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
Dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian paska pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

Berdasarkan program PNPM Mandiri Pariwisata tersebut, yang dimana berfokus pada pemberdayaan masyarakat setempat menjadi bagian dari kunci sukses pembangunan desa wisata. Dalam konteks pembangunan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing yang menjadi distribusi manfaat pengembangan suatu daya tarik wisata. Desa dan masyarakat dengan potensi yang dimilikinya, baik berupa keunikan, lingkungan alam, budaya, potensi ekonomi dan pertanian dapat memperkuat pembangunan kegiatan pariwisata di lingkungan tersebut.

Desa dan masyarakat sebagai pendukung daya tarik wisata dan sumber pasokan komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata. Sedangkan dalam pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan secara fisik maupun nonfisik. Pendekatan fisik merupakan metode umum dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus, seperti meningkatkan akses dan keterkaitan antar pusat pengembangan. Sedangkan pendekatan nonfisik merupakan metode khusus dengan mengembangkan budaya daerah dan kearifan lokal.

- 1) Pendekatan fisik dilakukan melalui:
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan akses dan jaringan keterkaitan antara desa penyangga dengan pusat kegiatan pariwisata seperti daya tarik wisata, hotel/ resort.
 - b. Mengonservasi sejumlah bangunan yang memiliki nilai seni, budaya, sejarah dan arsitektur lokal yang tinggi dengan tetap mempertahankan nilai keasliannya.
 - c. Mengubah fungsi bangunan menjadi sesuatu yang berkontribusi pada pengembangan kegiatan kepariwisataan.
 - d. Mengembangkan bentuk-bentuk penginapan di dalam wilayah desa wisata yang dioperasikan oleh penduduk desa.
 - e. Mengembangkan usaha-usaha terkait dengan jasa kepariwisataan.
- 2) Pendekatan nonfisik dilakukan melalui:
 - a. Pelestarian kearifan lokal, budaya dan kekhasan daerah.
 - b. Pelatihan-pelatihan manajemen pariwisata, kuliner, kerajinan dan bahasa.

(PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010, strategi dan pendekatan pembangunan desa wisata)

Pendekatan-pendekatan diatas merupakan bagian awal dari keberlangsungan sebuah strategi pembangunan desa wisata. Pendekatan dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan, sehingga dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Selain adanya pendekatan-pendekatan tersebut, terdapat beberapa langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu diperhatikan dalam strategi

pembangunan desa wisata (Priasukmana dan Mulyadin, 2001: 40-41) adalah sebagai berikut:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**
Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diberikan kepada generasi muda bagaimana menerima dan melayani wisatawan yang baik, keikutsertaan penduduk setempat pada seminar atau diskusi dalam rangka menambah pengetahuan untuk kegiatan usaha yang mereka lakukan seperti kerajinan, industry rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit, dan lain sebagainya.
2. **Kemitraan**
Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas pariwisata daerah dalam bidang-bidang usaha yaitu bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.
3. **Kegiatan Pemerintahan di Desa**
Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat Dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
4. **Promosi**
Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan tersebut.
5. **Festival/pertandingan**
Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.
6. **Membina Organisasi Warga**
Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka melalui organisasi kemasyarakatan atau disebut “warga”, yaitu ikatan keluarga dari satu keturunan yang hidup terpencar, mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali persaudaraan diantara keturunan mereka. Fenomena kemasyarakatan semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk memajukan desa wisata.
7. **Kerjasama dengan Universitas**
Universitas-universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan kuliah kerja praktek lapangan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin kerjasama antara desa wisata dengan universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang

bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

4. Tujuan dan Sasaran Desa Wisata

Pembangunan desa wisata pada prinsipnya adalah memanfaatkan segala potensi yang ada di desa setempat pada bidang pariwisata yang mencerminkan keaslian suatu desa baik dari kehidupan ekonomi, lingkungan, budaya serta adat istiadat. Dalam pembangunan desa wisata tidak hanya memanfaatkan potensi-potensi yang ada, namun harus mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Sebagaimana tujuan dan sasaran pembangunan desa wisata (Soetarso Priasukmana, 2001: 38), antara lain:

1. Mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataan dengan penyediaan program alternatif.
2. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat.
3. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk.

Pada intinya, tujuan dan sasaran dari pembangunan desa wisata inilah yang menjadi dasar pembangunan desa wisata. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas dalam pembangunan desa wisata, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

E. Pembangunan Desa Mandiri

1. Definisi Desa Mandiri

Konsep desa mandiri sebenarnya adalah bagian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu bertujuan untuk terciptanya kemandirian desa ataupun desa mandiri. Pada hakikatnya, tidak ada teori yang jelas membahas tentang bagaimana definisi desa mandiri. Definisi desa mandiri hanya bersumber dan berlandaskan pada Undang-Undang tentang Desa. Desa mandiri dapat diartikan sebagai emansipasi desa bukan tentang desa berdiri sendiri, namun lebih tepatnya merupakan persamaan hak dan kebebasan dalam kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan sosial budaya yang berkembang di masyarakat setempat, tetap berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam desa mandiri menurut PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Bertumpu pada Pembangunan Manusia
Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Otonomi
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3. Desentralisasi
Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.

4. Berorientasi pada Masyarakat Miskin
Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi atau Pelibatan Masyarakat
Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
6. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
7. Demokratis
Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. Transparansi dan Akuntabel
Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
9. Prioritas
Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
10. Kolaborasi
Semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan.
11. Keberlanjutan
Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa yang akan datang dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
12. Sederhana
Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PnPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, desa mandiri dapat diartikan sebagai desa yang mempunyai kekuatan secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan. Sebagaimana merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka memperkuat kemandirian desa. Masyarakat dengan Pemerintah

Desa bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan pembangunan, membuat perencanaan, melaksanakan serta mengawasi dan mengevaluasi pembangunan dalam rangka terwujudnya desa mandiri.

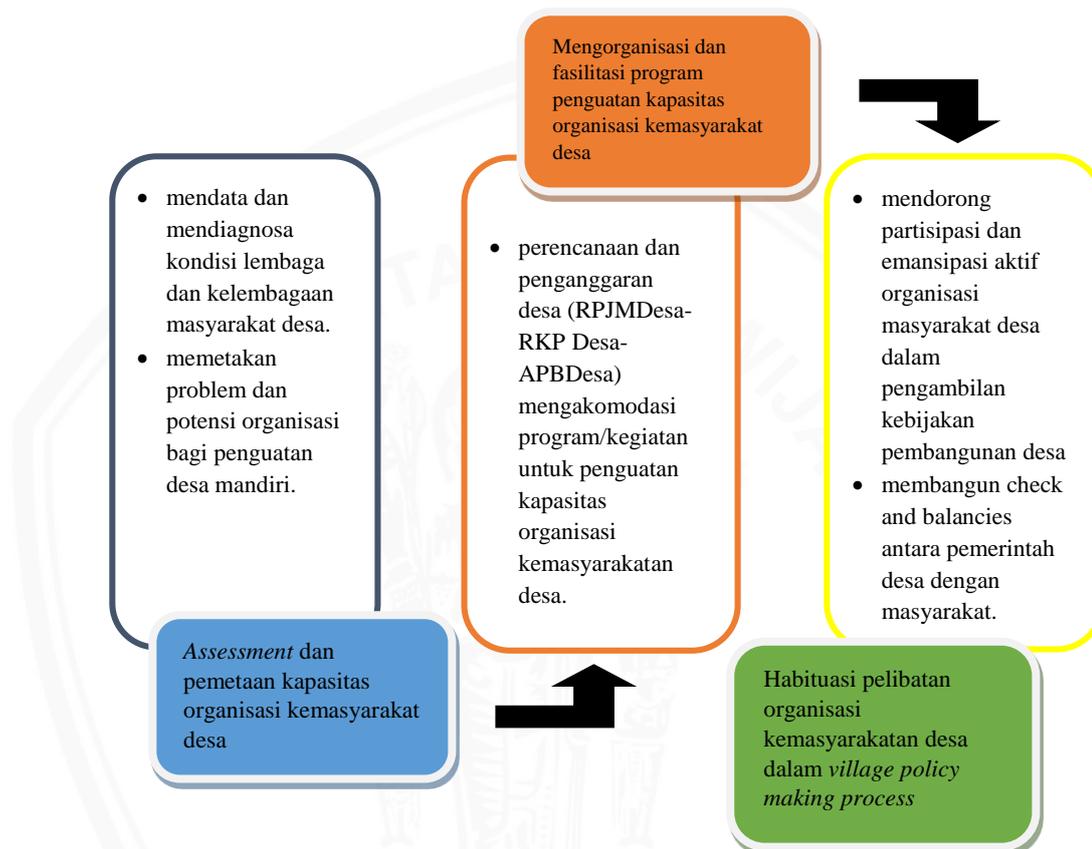
2. Strategi Pembangunan Desa Mandiri

Dalam mewujudkan pembangunan desa menjadi desa mandiri tentu harus mempunyai strategi yang tepat. Pada hakekatnya, strategi pembangunan desa mandiri belum ada teori yang dapat menjelaskan bagaimana strategi untuk mewujudkan desa mandiri. Dalam implementasinya strategi pembangunan desa mandiri sangat bergantung pada inisiatif dari pemerintah, namun juga dibutuhkan kerjasama dari para *stakeholder* dan masyarakat setempat. Berdasarkan strategi pembangunan desa mandiri dalam Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam konteks pembangunan desa mandiri terdapat beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan wadah dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif pada kepentingan masyarakat. Adapun langkah-langkah agar

wadah dan organisasi kemasyarakatan desa tersebut memiliki peran membangun desa yang mandiri, adalah sebagai berikut:

Gambar 2: Langkah-langkah Membangun Desa Mandiri



Sumber: Buku Desa Bappenas Halaman 31

- a. Melakukan *assesment* dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa.

Tujuan langkah ini adalah untuk memetakan berapa dan apa saja organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Dengan demikian akan tampak organisasi kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya tapi sudah tidak ada lagi pengurusnya. Atau masih ada pengurusnya tapi tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Tujuan selanjutnya adalah agar desa memiliki gudang data tentang apa saja masalah dan potensi yang dimiliki organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat pembangunan.

- b. Menjalankan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa.
Bentuk kegiatan untuk penguatan kapasitas misalnya pelatihan manajemen organisasi, mendorong restrukturisasi atau peremajaan pengurus organisasi ataupun pemberian bantuan desa untuk organisasi kemasyarakatan desa.
- c. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa.
Setiap kebijakan strategis desa harus dilandasi atas musyawarah mufakat semua elemen desa (pemerintah desa dan masyarakat desa). Disamping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan mereka kedalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi, dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain terhadap organisasi kemasyarakatan, penguatan kapasitas juga harus dilakukan terhadap pemerintah desa. Seperti tantangan yang dikemukakan diatas yaitu kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa. Namun penguatan kapasitas tersebut juga harus dibarengi dengan mengembangkan interaksi yang dinamis antara pemerintah desa dengan organisasi masyarakat. Maksud interaksi dinamis adalah bahwa seluruh proses berdesa, urusan publik, dan kebijakan di desa mesti dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa.
- 3) Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah ditopang partisipasi warga yang baik. Secara skematik pembelajaran penerapan sistem tersebut sebagai berikut:
- a. Melalui Musrenbang desa pemerintah desa mempertemukan visi dan misi kepala desa terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat lalu

memasukkannya secara konsisten dalam dokumen perencanaan (RPJMDes dan RKPDes).

- b. Pemerintah desa membahas dan memastikan ide atau usulan program mandiri pangan (pengadaan bibit, dll) masuk dalam dokumen anggaran (RAPBDes dan APBDes).
- c. Pemerintah desa memastikan pelaksanaan kegiatan belanja anggaran seperti pengadaan bibit, warga menanam, hingga memastikan tanaman yang ditanam benar benar tumbuh baik.

4) Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan dibidang ekonomi tersebut tidak terlepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes).

Mewujudkan desa mandiri bukan pekerjaan yang mudah, namun bukan mustahil untuk dilakukan dan diwujudkan. Bagi pendamping desa tentu ini bukan tugas sederhana. Oleh karena itu harus memperhatikan kondisi aktual desa, yaitu bahwa dalam derasnya arus pembangunan desa selama ini, selalu ada kearifan dan inovasi inovasi desa yang membuat desa mempunyai peluang untuk bertahan, sejahtera, dan mandiri.

3. Tujuan Pembangunan Desa Mandiri

Pembangunan desa mandiri mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa itu sendiri. Dengan pengembangan potensi desa dapat menciptakan suatu kemandirian desa yang tidak

hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pada hakekatnya, tujuan dari pembangunan desa mandiri adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja
2. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa
3. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
4. Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

(Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2007)

F. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri

Pemberdayaan masyarakat yang berada pada tempat destinasi wisata tertentu merupakan salah satu model pembangunan yang sedang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pembangunan desa wisata. Pembangunan wisata merupakan agenda penting dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Sebagaimana menurut Widjaja (2003: 169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 35-36), bahwa terdapat strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang

Dalam membentuk iklim bagi masyarakat terdapat dua hal yang mendasar adalah sebagai berikut:

- a) Menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan/motivasi untuk berkembang. Proses menyadarkan masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.
- b) Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah, yang disebut dengan *participatory design and planning*. Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan rasa keberpihakan kepada masyarakat.

2. Memperkuat potensi yang ada

Memperkuat (*empowerment*) dilakukan dengan mengorganisasikan masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangun, yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan-masukan (input) serta membuka berbagai peluang-peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya.

3. Proses perlindungan (Pendampingan)

Secara aplikatif *empowerment* terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah dilakukan melalui dua hal, yaitu:

- a) Penguatan akses (*accessibility empowerment*). Pada pemberdayaan kelompok masyarakat *empowerment* dilakukan melalui menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok pemberdaya. Kebutuhan akan akses ini sangat menentukan *share* dan partisipasi antar *stakeholders* dalam proses pemberdayaan.
- b) Penguatan teknis (*technical empowerment*) dilakukan sebagai bagian dari kegiatan *advocacy* sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan. Keterlibatan secara aktif dari masing-masing

stakeholders diwujudkan dalam bentuk *share* nyata seperti program, pendanaan dan kebijakan (*policy*).

Pada prinsipnya, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memotivasi individu atau masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menentukan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Prinsip inilah yang akan dijadikan untuk pembangunan wisata melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berbasis wisata harus mempunyai kekuatan (*power*) yang menjadi motivasi masyarakat untuk membangun kawasan wisata. Namun, kekuatan (*power*) dalam tata kelola pembangunan kepariwisataan pada dasarnya harus seimbang antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat.

Strategi utama yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri, adalah dengan dikeluarkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri di Indonesia. Berdasarkan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010, pemberdayaan difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak aktivitas kepariwisataan di desa wisata.

Selanjutnya dalam PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010 terdapat prinsip-prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata adalah sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan Masyarakat**
Seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.
2. **Keberpihakan Kepada yang Miskin**
Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada masyarakat miskin.
3. **Desentralisasi**
Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat.
4. **Partisipatif**
Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan.
5. **Keadilan dan Kesetaraan Gender**
Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata harus menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang kepariwisataan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan.
6. **Keswadayaan**
Masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.
7. **Keterpaduan Program Pembangunan**
Program yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain.
8. **Penguatan Kapasitas Kelembagaan**
Meningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
9. **Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi**
Dalam pembangunan pariwisata melibatkan sektor lain yang terkait.
10. **Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan**
Dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian paska pelaksanaan program, masyarakat dan instansi terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

Berdasarkan program PNPM Mandiri Pariwisata tersebut, yang dimana berfokus pada pemberdayaan masyarakat setempat menjadi bagian dari kunci sukses pembangunan desa wisata. Dalam konteks pembangunan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dapat diadopsi untuk mendukung dan meningkatkan daya saing yang menjadi distribusi manfaat pengembangan suatu daya tarik wisata.

Desa atau komunitas masyarakat di sekitar pusat kegiatan pariwisata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan kegiatan pariwisata yang terjadi di suatu wilayah. Desa dengan potensi yang dimilikinya, baik berupa keunikan, lingkungan alam, budaya, potensi ekonomi dan pertanian dapat memperkuat pengembangan kegiatan pariwisata yang sudah berlangsung. Desa tersebut dapat berperan sebagai pendukung daya tarik wisata dan sebagai sumber pasokan komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan pariwisata.

PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia dalam kerangka program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan desa wisata, mengacu pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Adapun model pendekatan yang dikembangkan meliputi tiga gugusan (*cluster*) sebagai berikut:

1) Model Gugusan (*Cluster*) Desa Wisata-Desa Terkait

Merupakan model pengembangan yang menempatkan desa wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan desa- desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi pendukung sekaligus penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

2) Model Gugusan (*Cluster*) Daya Tarik Wisata-Desa Terkait

Merupakan model pengembangan yang menempatkan daya tarik wisata sebagai pusat pengembangan, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata.

3) Model gugusan (*Cluster*) Usaha Pariwisata-Desa Terkait

Merupakan model pengembangan desa-desa yang berada di sekitar lokasi usaha pariwisata, seperti hotel, resort, dan rumah makan/restoran, yang memiliki keterkaitan geografis dan keterkaitan fungsi secara langsung maupun tak langsung. Dalam konteks ini, fasilitas atau usaha pariwisata tersebut memiliki posisi strategis sebagai pusat dan penggerak pengembangan yang mampu mendistribusikan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitarnya.

Selanjutnya dengan pemilihan model pendekatan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu diperhatikan dalam strategi pembangunan desa wisata (Priasukmana dan Mulyadin, 2001: 40-41) adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diberikan kepada generasi muda bagaimana menerima dan melayani wisatawan yang baik, keikutsertaan penduduk setempat pada seminar atau diskusi dalam rangka menambah pengetahuan untuk kegiatan usaha yang mereka lakukan seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit, dan lain sebagainya.

2. Kemitraan

Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas pariwisata

daerah dalam bidang-bidang usaha yaitu bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

3. Kegiatan Pemerintahan di Desa

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat Dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

4. Promosi

Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan tersebut.

5. Festival/pertandingan

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.

6. Membina Organisasi Warga

Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Mereka juga bisa diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka melalui organisasi kemasyarakatan atau disebut “warga”, yaitu ikatan keluarga dari satu keturunan yang hidup terpencar, mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali persaudaraan diantara keturunan mereka. Fenomena kemasyarakatan semacam ini perlu didorong dan dikembangkan untuk memajukan desa wisata.

7. Kerjasama dengan Universitas

Universitas-universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan kuliah kerja praktek lapangan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin kerjasama antara desa wisata dengan universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat berbasis wisata adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pembangunan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Dalam proses pembangunan kepariwisataan, masyarakat sebagai subyek yang dimana menjadi pelaku penting dan harus terlibat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program kegiatan kepariwisataan. Namun, sebagai penerima manfaat, masyarakat juga memperoleh nilai manfaat yang signifikan dari pembangunan kegiatan

kepariwisataan yang akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budayanya.

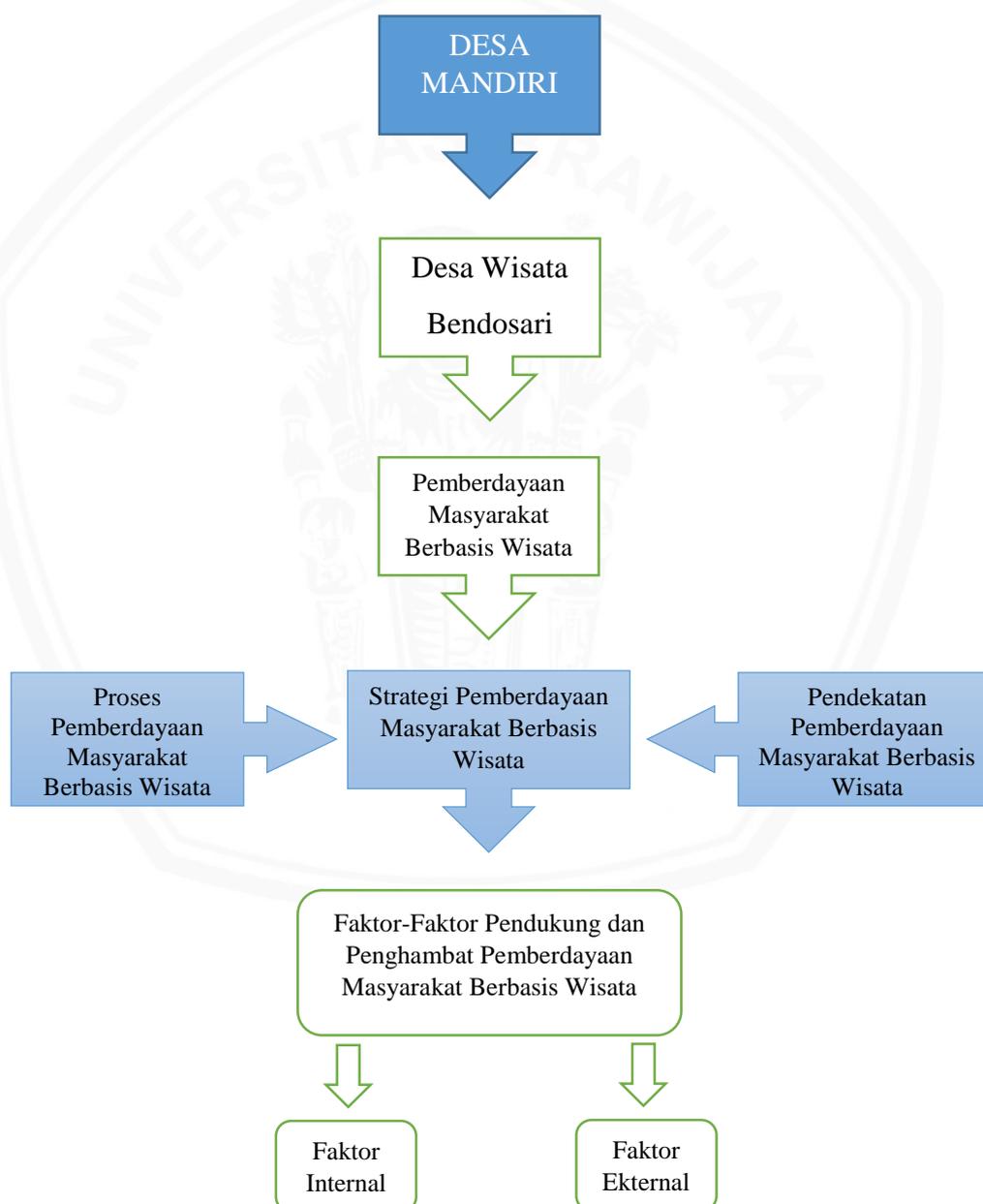
Dengan demikian pemberdayaan masyarakat berbasis wisata merupakan proses pembangunan dalam mewujudkan suatu desa mandiri. Oleh karena itu, desa mandiri harus mempunyai kekuatan secara ekonomi, budaya dan sosial melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat berbasis wisata sebagai sebuah proses mewujudkan pembangunan desa mandiri, yang dimana mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang ada. Dengan memaksimalkan potensi desa dapat menciptakan suatu kemandirian desa yang tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

G. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011: 60) bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Dengan demikian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah dasar pemahaman yang menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau sebuah proses dari keseluruhan penelitian maupun penulisan yang akan dilakukan. Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah proses penulisan yang mencakup fokus dan tujuan dari penulisan.

Berdasarkan fokus dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Gambar 3: Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Cholid dan Abu (2007: 44), Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

Menurut Sugiyono (2005: 21) penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sementara itu, menurut Tan (dalam Silalahi 2009: 28) penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi, adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan

khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dan satu variabel.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang dimana bertujuan untuk dapat membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga dapat menggambarkan dan mendeskripsikan suatu fenomena dan peristiwa yang terjadi tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri.

Sedangkan pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sementara itu, definisi penelitian kualitatif dari Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007: 4), bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dengan adanya definisi tentang jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa melalui metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif, penulis dapat menggambarkan dan mendeskripsikan suatu fenomena dan peristiwa yang terjadi melalui prosedur penelitian dan dapat

menyajikan data-data secara tertulis. Berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif, penulis bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi dengan penjelasan tertulis tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri, yang dimana berada di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

B. Fokus Penelitian

Dengan adanya fokus penelitian diharapkan suatu pembahasan mempunyai batas, sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi terhadap permasalahan yang sedang dikaji. Fokus penelitian sendiri merupakan pusat perhatian yang menjadi pembatas atas suatu masalah yang diteliti agar tidak meluas dari fokus pembahasan dan agar tidak terjadi kesalahan persepsi ketika mengkaji suatu permasalahan. Selain menggunakan teori, penentuan fokus penulisan ini juga menggunakan fakta empiris. Menurut Moleong (2009: 97) fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah dan sebagainya. Sedangkan menurut Sugiyono, (2012: 32) bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Fokus penelitian merupakan tahap awal pelaksanaan penulisan, dengan demikian penulis akan memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang

akan diteliti. Berdasarkan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri. Dengan demikian fokus dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, melalui beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata

Pada Bab II telah disebutkan bahwa terdapat beberapa teori terkait proses pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi terhadap teori, maka penulis menggunakan teori *United Nation* (1956: 83-92) tentang proses pemberdayaan masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 tentang pedoman pembangunan desa. Dengan demikian teori *United Nation* (1956: 83-92) dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 10 dapat menjadi dasar analisis terhadap proses pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari. Sehingga penulis dapat mengkaji bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dengan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat yang diterapkan guna memaksimalkan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

b) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata

Dengan adanya teori-teori tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata yang ada di Bab II, maka dipilih salah satu teori yang dapat mencakup fokus penelitian sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi terhadap teori yang digunakan oleh penulis. Teori yang digunakan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata adalah teori Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 35-36) tentang pola pendekatan pemberdayaan masyarakat dan teori Sumaryadi (2005: 97-98) tentang gambaran konsep pemberdayaan sebagai bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian penulis dapat mengkaji bagaimana pola dan bentuk pendekatan yang diterapkan terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

c) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata

Pada Bab II telah disebutkan bahwa terdapat beberapa teori terkait strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Adanya beberapa teori tersebut, maka penulis menggunakan teori yang sesuai dengan keadaan yang ada di situs penelitian, seperti teori dari Jack Rothman (1974) dalam Harry Hikmat (2010: 66) tentang model pembangunan masyarakat dan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010. Pada praktiknya komponen-komponen yang ada dalam PNPM Mandiri Pariwisata masih efektif menjadi pedoman dalam strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Dengan demikian, penulis dapat

mengkaji bagaimana langkah-langkah strategis yang diterapkan terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang meliputi:

- 1) Faktor Internal
- 2) Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat maupun wilayah yang menjadi objek penelitian oleh peneliti. Sebagaimana menurut Moleong (2013: 128) bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Berdasarkan teori tersebut penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan, yang dimana atas dasar pertimbangan teori substantif. Sehingga penulis dapat melakukan observasi lapangan dengan tepat guna menemukan kesesuaian teori dengan kenyataan di lapangan.

Dengan demikian, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Malang dengan situs penelitian pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasarkan pada berbagai aspek pertimbangan oleh penulis, bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri adalah isu yang menarik untuk dikaji ke dalam tema pembahasan penulis. Pada hakekatnya isu tersebut merupakan salah satu program utama dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dimana sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian keberadaan data sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penelitian. Data berisi tentang informasi yang dapat memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Pada hakekatnya data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Berdasarkan jenis data penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu data kualitatif. Menurut Noeng Muhadjir (1996: 2) bahwa data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

Selain adanya jenis data terdapat sumber data, yang dimana menurut Sarwono (2006: 123) bahwa sumber data merupakan tahapan penting dalam proses penulisan, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penulisan skripsi ini dapat berlangsung hingga pada akhirnya penulis mendapatkan

jawaban atas perumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung diperoleh di tempat penelitian di Desa Bendosari. Menurut Sarwono (2006:16) data Primer diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara terhadap pihak yang berkaitan. Adapun pihak yang berkaitan dengan sumber data primer, yaitu:

- a) Kepala Desa Bendosari
- b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bendosari
- c) Aparatur Desa Bendosari
- d) Masyarakat Desa Bendosari

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat berupa data-data yang sudah tersedia dan diperoleh penulis dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan (Sarwono, 2006: 210). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya data itu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun data yang diperoleh peneliti terkait sumber data sekunder, yaitu:

a) Literatur

Dalam penelitian ini terdapat literatur-literatur yang menjadi bahan atau rujukan untuk memperoleh informasi terkait tema pembahasan oleh peneliti.

b) Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penelitian dibutuhkan sebuah landasan hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan data sebagai landasan hukum yang berhubungan dengan tema pembahasan oleh peneliti, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Undang-Undang terkait.

c) Dokumen-dokumen

Data dalam penelitian didapatkan melalui dokumen-dokumen yang mendukung tema pembahasan oleh peneliti, baik dokumen dari Desa Bendosari maupun dokumen dari luar Desa Bendosari.

d) Arsip-arsip dari Desa Bendosari

Data dalam penelitian ini juga didapatkan melalui arsip-arsip data dari Desa Bendosari maupun dari luar Desa Bendosari yang dapat mendukung pengumpulan data oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting yang menjadi langkah strategis dalam menyusun suatu penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam memperoleh data di lapangan. Data-data yang diperoleh inilah yang akan digunakan

dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji. Proses analisis data yang dilakukan diharapkan mampu memberikan hasil data yang valid dan sesuai dengan fakta serta kondisi yang sebenarnya.

Menurut Sugiyono (2015: 309), bahwa teknik pengumpulan data dibedakan menjadi empat bagian yaitu observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya (*triangulasi*). Berdasarkan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, relevan dan akurat sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala dan kegiatan yang berlangsung di lapangan (Sugiyono, 2015: 310).

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara berguna untuk mendapatkan data dari sumber utama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Pada tahap ini penulis berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara lebih lanjut dan memperjelas data serta informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan bantuan panduan wawancara (Usman dan Akbar, 2009: 52).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan penulis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015: 329).

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2006: 136), instrumen penelitian merupakan alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2015: 222), instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka

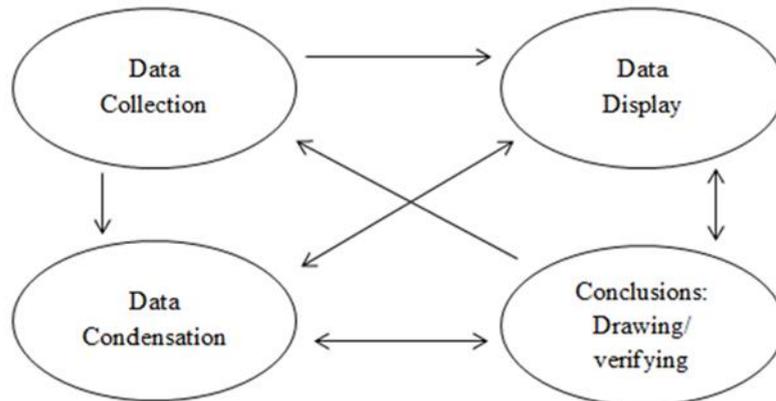
kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*), hal ini berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya.
3. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu *recorder*, kamera, dan buku catatan untuk mencatat informasi yang diperoleh.

G. Metode dan Analisis Data

Dalam penelitian terdapat berbagai pertanyaan-pertanyaan maupun data-data terkait pembahasan oleh penulis. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang mengacu pada model interaktif oleh Miles & Huberman dalam Sugiyono (2015: 337). Adapun komponen-komponen analisis dalam model interaktif digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4: Analisis Data Kualitatif berdasarkan Model Interaktif oleh Miles & Huberman



Sumber: Milles, Huberman, dan Saldana (2014: 14)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam menyederhanakan, sedangkan data yang tidak diperlukan dapat dihilangkan guna memberikan kemudahan dalam penulisan. Bagian dari reduksi data tersebut, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dan fokus pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan melalui beberapa proses hingga kesimpulan akhir

dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap pengumpulan data, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya, seperti: meringkas, *coding*, mendalami tema, pengklasifikasian, membuat partisi tema, dan menulis memo. Tujuan kondensasi data yaitu untuk lebih memfokuskan data-data yang telah didapatkan melalui proses pengumpulan data.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, dalam bentuk uraian singkat. Dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif. Tahap penyajian data bermaksud untuk memudahkan dalam memahami persoalan yang terjadi, selain itu rencana penulisan selanjutnya dapat tersistematis dengan baik.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Pada tahap akhir metode dan analisis data dalam penelitian, yaitu peneliti menyimpulkan data secara keseluruhan yang telah disajikan setelah melalui proses reduksi data dan kondensasi data berdasarkan kategori-kategori data yang ada. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah peneliti dapat menuju pada kesimpulan akhir yang menjadi jawaban atas fokus permasalahan yang dibahas.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan keabsahan data guna menguji kepercayaan data terhadap hasil penelitian. Hasil penelitian sendiri merupakan bagian terpenting, yang dimana tujuan akhir penelitian untuk mendapatkan hasil

penelitian. Hasil penelitian ditentukan oleh proses yang dilakukan oleh penulis selama melakukan dan menyusun penelitian. Proses penelitian tersebut memerlukan standar untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kebenaran dari suatu penelitian.

Menurut Moelong (1999: 173), bahwa menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pada hakekatnya, teknik pemeriksaan didasarkan oleh sifat kriteria tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 270), bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari empat tahapan, dimana setiap tahapan tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam menentukan keabsahan data yang diperoleh. Selanjutnya menurut Sugiono (2012: 270-277), penjelasan mengenai uji keabsahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengujian *Credibility* (kredibilitas)

Dalam pengujian kredibilitas data terdapat berbagai cara pengujian. Menurut Sugiyono (2012: 270), bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain :

- a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat diartikan sebagai peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan narasumber, baik narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, mendalam dan valid. Dengan adanya perpanjangan pengamatan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang sudah didapatkan tetap sama atau ada bedanya, ketika

terjadi perbedaan maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dapat diartikan peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Hal ini sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena dengan meningkatkan ketekunan berarti peneliti akan melakukan pengecekan kembali hasil penelitiannya apakah benar atau ada yang salah. Dengan adanya peningkatan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang lebih valid dan sistematis tentang apa yang diamati.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dengan melakukan perbandingan data dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang telah ditentukan oleh peneliti dimana dalam penentuannya berdasarkan keterkaitannya dengan penelitian.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, dimana teknik yang dimaksud diantaranya adalah wawancara, observasi, serta kusioner/dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat ditemukan data yang valid.

d) Analisis Kasus Negatif

Menurut Sugiyono (2012: 275), bahwa kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Selanjutnya Sugiyono (2012: 275) menegaskan sebagaimana dalam melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Dengan demikian dalam

tahap ini, peneliti akan mencari data dari berbagai sumber yang bersangkutan dengan penelitian sampai data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut menyatakan hal yang sama.

e) Menggunakan Bahan Referensi

Menurut Sugiyono (2012: 275), menyatakan bahwa :

“...yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti”.

Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian, sebagai contoh rekaman wawancara.

f) Mengadakan *Membercheck*

Menurut Sugiyono (2012: 276), bahwa *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Sedangkan tujuan dari *membercheck* menurut Sugiyono (2012: 276) adalah bertujuan untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau *informan*.

2. Pengujian *Transferability*

Sugiyono (2012: 276), menjelaskan bahwa *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkenaan dengan kenyataan, sehingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Dengan demikian, orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti. Sehingga dapat menerapkan hasil penelitian ini, maka penulis dalam membuat laporan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Pengujian *Dependability*

Sugiyono (2012: 368) menjelaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah

apabila orang lain dapat mengulangi/merefleksi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Pada hakekatnya peneliti sering tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data, maka perlu diuji *dependability*. Dengan demikian, penulis dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangan dan mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian penelitian di lapangan mulai dari menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan keabsahan data, sampai membuat kesimpulan.

4. Pengujian *Confirmability*

Sugiyono (2012: 368) menjelaskan bahwa pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menguji hasil penelitian tersebut secara bersama-sama dan disepakati oleh banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

Peneliti melakukan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Malang dan situs penelitian di Desa Bendosari. Dengan pertimbangan pemilihan lokasi tersebut, yang dimana terdapat strategi pembangunan desa yang dilakukan terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri.

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Visi dan Misi Kabupaten Malang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat visi-misi yang digunakan untuk membuat keputusan, program dan kegiatan suatu daerah. Sebagaimana pemerintah Kabupaten Malang memiliki visi-misi yang diatur dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun visi-misi pemerintah Kabupaten Malang beserta penjelasannya, sebagai berikut:

1) Visi Kabupaten Malang

Suatu visi merupakan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dicapai oleh suatu daerah. Sebagaimana Kabupaten Malang mempunyai visi

sebagai berikut: “*Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP*”.

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat diklasifikasikan, sebagai berikut: Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan. Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2) Misi Kabupaten Malang

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Kabupaten Malang mempunyai misi pembangunan untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;

7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu:

1. Konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil.
2. Konsep dan arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil.

b. Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Secara Geografis Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Malang, luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 Ha. Kabupaten Malang memiliki posisi koordinat antara 112°17',10,90" sampai 112°57',00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" sampai 8°26',35,45" Lintang Selatan. Kabupaten Malang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang terletak pada bagian selatan Provinsi Jawa Timur dengan keadaan topografi yang bervariasi tetapi secara umum mempunyai hawa sejuk, karena pada musim hujan suhu berkisar antara 12° C sampai dengan 18° C dan pada musim kemarau suhunya berkisar antara 18° C sampai dengan 24° C. Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi yang dipagari oleh pegunungan, sebagai berikut:

Sebelah Utara Gunung Anjasmoro (2.277 m) dan Gunung Arjuno (3.399 m)

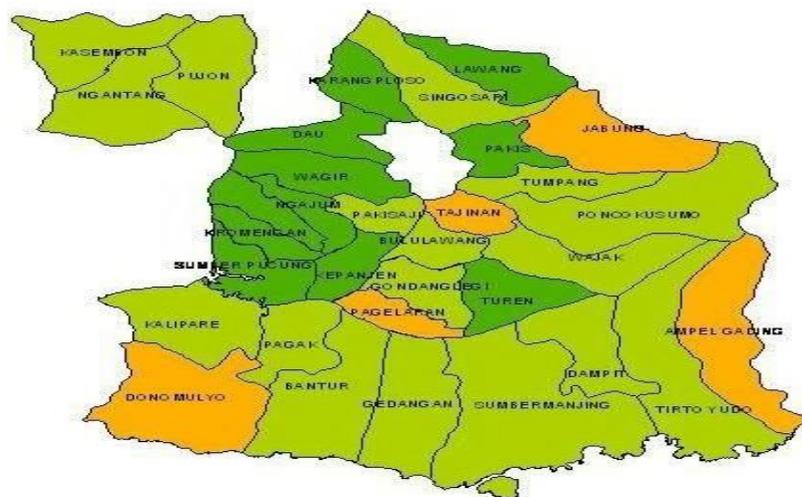
Sebelah Timur Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m)

Sebelah Barat Gunung Kelud (1.731 m)

Sebelah Selatan Pegunungan Kapur (650 m) dan Gunung Kawi (2.625 m)

Adapun gambaran wilayah Kabupaten Malang dapat dilihat pada peta wilayah Kabupaten Malang pada gambar 5, sebagai berikut:

Gambar 5: Peta Administratif Kabupaten Malang



Sumber: Badan perencanaan Daerah Kabupaten Malang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa Kabupaten Malang memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi strategis tersebut disebabkan tingginya arus lalu lintas yang melalui jalur utara maupun jalur selatan. Ditambah pula dengan objek wisata alami dan buatan yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, melimpahnya hasil produksi perikanan maupun pertanian yang sudah di distribusikan hingga keluar daerah. Luas wilayah Kabupaten Malang kemudian dibagi menjadi wilayah pemerintahan yang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.217 RW (Rukun Warga), dan 14.718 RT (Rukun Tetangga). Berikut dapat dilihat pada tabel 2, jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Malang.

Tabel 2: Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Malang

No.	Kecamatan	Desa	No.	Kecamatan	Desa
1.	Donomulyo	10	18.	Kromengan	7
2.	Kalipare	9	19.	Ngajum	8
3.	Pagak	8	20.	Wonosari	8
4.	Bantur	10	21.	Wagir	12
5.	Gedangan	8	22.	Pakisaji	12
6.	Sumber Manjing Wetan	14	23.	Tajinan	12
7.	Dampit	12	24.	Tumpang	15
8.	Tirtoyuda	13	25.	Pakis	15
9.	Ampelgading	13	26.	Jabung	15
10.	Poncokusumo	17	27.	Lawang	12
11.	Wajak	13	28.	Singosari	17
12.	Turen	17	29.	Karangploso	10
13.	Bululawang	14	30.	Dau	10
14.	Gondanglegi	14	31.	Pujon	10
15.	Pagelaran	10	32.	Ngantang	13
16.	Kepanjen	18	33.	Kasembon	6
17.	Sumberpucung	7	Jumlah		378

Sumber: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Malang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Kepanjen sebagai wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Malang memiliki jumlah desa terbanyak, yakni 18 desa. Jumlah desa terbanyak kedua adalah Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Turen dan Kecamatan Singosari dengan masing-masing terdiri dari 17 desa.

c. Kondisi Demografi Kabupaten Malang

Kabupaten Malang menurut Data Badan Pusat Statistik tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.544.315 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.278.511 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 1.126.804 jiwa. Secara umum kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang adalah heterogen dalam etnis dan budaya, sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan yang cenderung dinamis. Dari beberapa suku yang ada di Kabupaten Malang, mayoritas adalah suku Jawa dan Madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Jawa, Bahasa Madura, dan tentunya Bahasa Indonesia.

d. Potensi-potensi Daerah Kabupaten Malang

Kabupaten Malang memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang menjadi sebuah potensi bagi Kabupaten Malang. Besarnya potensi kekayaan alam yang dimiliki memberikan peluang bagi Kabupaten Malang dalam mengelola dan memanfaatkannya. Pemanfaatan dan optimalisasi potensi dapat berjalan dengan efektif melalui identifikasi kekuatan potensial Kabupaten Malang. Berikut ini

potensi-potensi Kabupaten Malang menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

1) Potensi Pertanian

Hasil pertanian yang menjadi unggulan Kabupaten Malang antara lain tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan yaitu jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang.

2) Potensi Peternakan

Potensi peternakan Kabupaten Malang terbilang cukup besar, mengingat letak geografisnya yang berada pada dataran tinggi. Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya di seluruh wilayah Kabupaten Malang adalah Sapi potong dan Kambing. Sedangkan Sapi perah pengembangannya pada daerah berbukit atau pegunungan dengan suhu yang relatif rendah seperti Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon, Tumpang, Poncokusumo, Jabung dan Wajak.

3) Potensi Perikanan

Dilihat dari segi hidrologinya, Kabupaten Malang memiliki potensi perikanan darat dan laut yang cukup tinggi. Kabupaten Malang memiliki banyak sungai kecil dan sungai besar serta beberapa bendungan antara lain Selorejo,

Karangates, Sengguruh, Lahor, dan Kaligenteng. Pengembangan perikanan laut dikembangkan didaerah pantai Sendangbiru, sedangkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dilakukan dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Besarnya potensi perikanan yang dimiliki menjadikan Kabupaten Malang sebagai pemasok dan penyuplai hasil laut hingga wilayah pasuruan, selain itu besarnya potensi perikanan yang dimiliki juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan minapolitan Kabupaten Malang.

4) Potensi Industri

Bidang Industri di Kabupaten Malang berkembang pesat pada beberapa wilayah, khususnya di wilayah dengan kemudahan aksesibilitas antara lain Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Bululawang, Pakis, Dau dan Wagir. Industri besar pada umumnya berlokasi pada jalan utama sedangkan industri kecil tersebar dikawasan pemukiman penduduk. Pengembangan industri pada tahun-tahun selanjutnya di prioritaskan pada kawasan Malang bagian selatan untuk pemeratakan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer yang bahan bakunya banyak tersedia di Malang Selatan.

5) Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang yang wilayahnya terdiri dari pegunungan dan berbagai dataran dengan berbagai karakteristik serta perairan seperti pantai, air terjun, dan sungai dengan ekosistemnya yang sangat beragam. Di sisi lain terdapat

situs-situs bersejarah dari zaman kerajaan Singosari hingga peninggalan kolonial Belanda yang berupa Candi. Kekayaan alam yang beragam tersebut kemudian dimanfaatkan dan dikelola dengan tepat untuk dijadikan tempat wisata yang menarik. Pengembangan potensi wisata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang adalah melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti penginapan, meningkatkan kondisi jalan, serta menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata. Pengembangan tersebut dapat dilihat dari pengembangan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang tersebar di Kabupaten Malang. Berikut pemetaan daerah wisata Kabupaten Malang pada gambar 4, sebagai berikut:

Gambar 6: Peta Wisata Kabupaten Malang



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

2. Gambaran Umum Desa Bendosari

Desa Bendosari didirikan oleh Mbah Suromenggolo dan Mbah Suromentolo yang juga disebut Mbah Murtolo, pada tahun 1793 dengan membuka hutan dibagian Utara dan di daerah barat. Kedua bagian hutan inilah yang kemudian menjadi desa Bendosari.

Pemerintahan Desa Bendosari mulai berdiri sejak tahun 1793, dengan kepala pemerintahan pertama adalah Mbah Suro Menggolo. Silsilah pemerintahan Desa Bendosari hingga sekarang adalah sebagai berikut secara berurutan: Mbah Suro Menggolo, Mbah Srempang, Mbah Suro Mentolo, Mbah Mrico, Mbah Tulus, Mbah Singo Leksono, Mbah Setroleksono, Mbah Irrorejo, Mbah Kerto Pawiro, Mbah Setroredjo, Mbah Supeno Danu Pranoto, Umar Tadjudin, M Yusuf Danu Prasetyo, M. Khoirun, SE sampai sekarang.

a. Visi dan Misi Desa Bendosari

1) Visi Desa Bendosari

Desa Bendosari mempunyai visi sebagai suatu tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana visi Desa Bendosari adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang MAJU MAPAN”.

Terwujudnya masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang MAJU MAPAN diyakini dapat mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan spiritual (SATATA GAMA KARTA RAHARJA).

Dengan visi ini diharapkan akan menuju masyarakat Desa Bendosari yang MAJU dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sarana dan Prasarana, Lingkungan Hidup, Sosial Budaya, Pemerintahan, Koperasi dan Usaha Masyarakat, pertanian, keagamaan, Pariwisata sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang MAPAN bagi seluruh masyarakat Desa Bendosari.

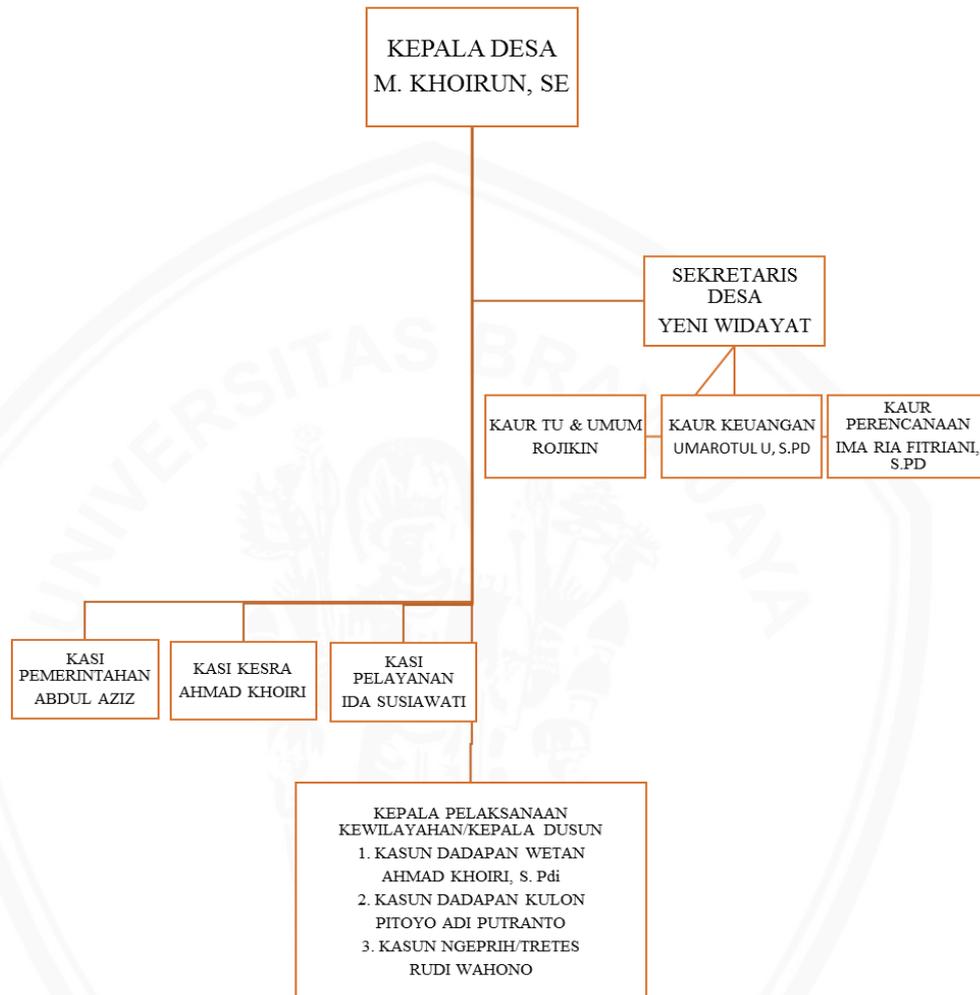
2) Misi Desa Bendosari

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Bendosari untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai nilai agama, adat istiadat dan budaya.
2. Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean goverment* (pemerintah yang bersih) berkeadilan dan demokratis.
3. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai.
4. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian, peternakan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bendosari

Gambar 7: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bendosari



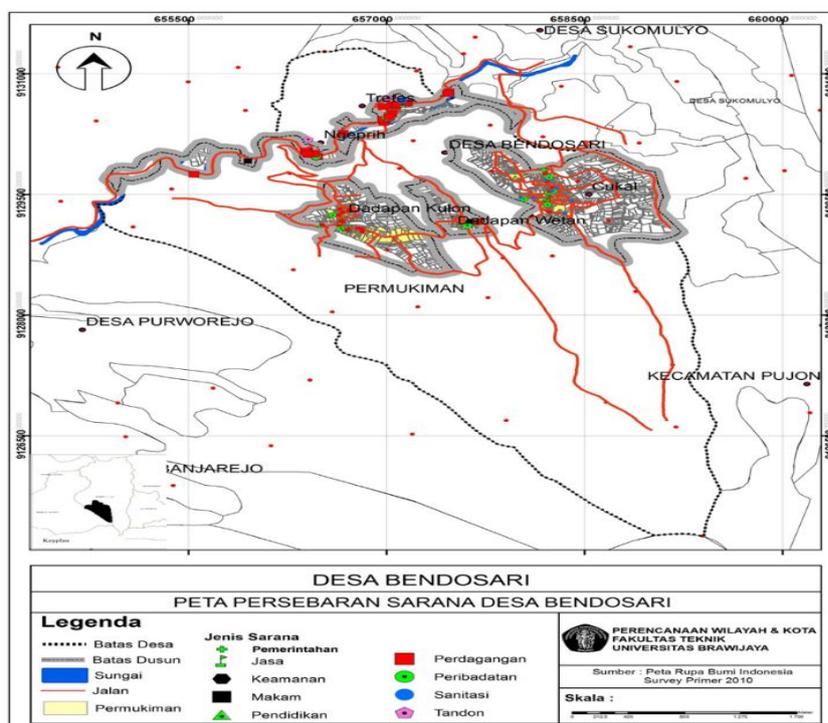
Sumber: Data Pemerintah Desa Bendosari Tahun 2017

c. Kondisi Geografis Desa Bendosari

Berdasarkan kondisi geografis Desa Bendosari merupakan bagian integral dari sistem perwilayahan Kecamatan Pujon yang memiliki luas wilayah 1201,699 Ha. Desa Bendosari yang mempunyai jarak dari ibukota kecamatan sekitar 10 km

dan dari ibukota kabupaten 37 km. Secara geografis Desa Bendosari termasuk wilayah pegunungan yang sebagian besar merupakan dataran tinggi. Desa ini terletak pada wilayah barat dari Kecamatan Pujon dengan Luas Wilayah Desa Bendosari adalah 60.342 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa fungsi lahan, yang dapat dikelompokkan menjadi fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang di fungsikan untuk pemukiman adalah 608.511 m². Luas lahan yang di fungsikan untuk Pertanian adalah 502.851 m². Luas lahan untuk ladang dan perkebunan adalah 960.183 m². Luas lahan untuk hutan produksi adalah 348 Ha.

Gambar 8: Peta wilayah Desa Bendosari



Sumber: Data Pemerintah Desa Bendosari Tahun 2017

Lokasi Desa Bendosari salah satunya terletak di lereng gunung Kawi Malang yang berada pada ketinggian 1640 m di atas permukaan laut dan memiliki suhu temperatur sekitar 20°C sehingga kondisi Desa Bendosari termasuk sejuk. Desa Bendosari mempunyai curah hujan 2500mm yang terjadi dalam 12 bulan. Adapun batas-batas wilayah Desa Bendosari adalah:

Sebelah Barat Berbatasan dengan Dusun Pakan, Kecamatan Ngantang

Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Sukomulyo, Kecamatan Pujon

Sebelah Utara Wilayah Hutan

Sebelah Selatan Wilayah Hutan

Wilayah Desa Bendosari secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah Coklat Kehitaman yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Desa Bendosari terbagi menjadi 5 dusun, yakni: Dusun Cukal, Dusun Dadapan Wetan, Dusun Dadapan Kulon, Dusun Ngeprih dan Dusun Tretes dengan perbatasan wilayah sebelah barat yaitu dengan Kecamatan Ngantang, sebelah timur dengan Desa Sukomulyo dan sebelah Utara dan Selatan berupa hutan.

d. Kondisi Demografi Desa Bendosari

Berdasarkan kondisi demografi Desa Bendosari dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 adalah 4201 Jiwa. Sebagaimana menurut data demografi pemerintah Desa Bendosari, penduduk laki-laki berjumlah 2110 Jiwa dan perempuan sebanyak 2091 Jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk dapat dibagi

menjadi beberapa faktor menurut golongan usia. Golongan penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3: Jumlah Penduduk Desa Bendosari Menurut Golongan Usia tahun

NO	DUSUN	JML PND		JML	USIA							
		L	P	JIWA	0-5	6-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+
1	CUKAL	902	889	1791	88	412	261	287	300	193	148	106
2	DADAPAN WETAN	221	220	441	18	97	74	62	71	58	28	33
3	DADAPAN KULON	612	626	1238	55	282	197	177	207	170	84	66
4	NGEPRIH	115	107	222	9	47	34	35	29	35	14	19
5	TRETES	260	249	509	28	103	86	66	77	71	39	39
		2110	2091	4201	198	941	652	627	684	527	313	263

Sumber: Data Demografi Desa Bendosari Tahun 2017

Penduduk menurut usia dibagi menjadi delapan golongan. Penduduk dengan jumlah golongan usia terbanyak adalah anak-anak dan remaja berusia 6-19 tahun, yaitu sebanyak 941 jiwa sedangkan penduduk dengan jumlah golongan paling sedikit adalah golongan lanjut usia atau usia 70+ tahun dengan jumlah 263 Jiwa.

Dalam komposisi penduduk Desa Bendosari pada tingkat usia produktif sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan memiliki cukup potensi dalam mendukung pembangunan desa. Sebagaimana dibuktikan dengan aktifnya pemerintah desa untuk melibatkan organisasi karang taruna desa dalam pembangunan Desa Bendosari, dan juga aparatur Desa Bendosari mayoritas pemuda-pemudi desa yang berpotensi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mencukupi. Tetapi, jika dilihat dari pendidikan masyarakat secara keseluruhan, Desa Bendosari termasuk

dalam desa dengan mayoritas penduduknya berpendidikan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4: Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Bendosari Tahun 2017

No	Dusun	Pendidikan								
		Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SMP	SMA	D1/D2	D3	S1	S2
1.	Cukal	369	195	919	213	76	2	-	16	-
2.	Dadapan Wetan	75	47	226	71	19	-	-	3	-
3.	Dadapan Kulon	4	99	507	257	132	3	-	23	-
4.	Ngeprih	47	15	86	40	28	1	-	2	-
5.	Tretes	77	64	227	103	35	3	-	-	-
Jumlah		776	420	1965	684	290	9	-	44	-

Sumber: Data Demografi Desa Bendosari 2017

Dari tabel dapat dilihat bahwa kondisi tingkat pendidikan pada Desa Bendosari sebagian besar adalah tamat SD. Dapat dilihat juga rentang jumlah yang mencolok antara tingkat pendidikan SD dengan pendidikan SMP, sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya setelah lulus SD.

Klasifikasi kependudukan yang selanjutnya adalah jika dilihat dari mata pencaharian yang menjadi sumber pendapatan masing-masing individu yang akan berpengaruh terhadap aktifitas sehari-hari. Pendapatan tersebut pula yang nantinya akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tabel dibawah ini dapat menunjukkan klasifikasi mata pencaharian penduduk Desa Bendosari.

Berdasarkan data demografi Desa Bendosari dapat dijabarkan dalam table 5, sebagai berikut:

Tabel 5: Klasifikasi Mata Pencaharian Desa Bendosari Tahun 2017

No	Dusun	Pekerjaan								
		Blm/Tdk Bekerja	Karyawan Swasta	Petani	Rumah Tangga	Pedagang	Pelajar	Wira Swasta	PNS	Lainnya
1.	Cukal	470	51	415	499	6	197	12	10	30
2.	Dadapan Wetan	123	11	79	118	1	41	12	1	6
3.	Dadapan Kulon	218	45	423	317	10	169	11	9	18
4.	Ngeprih	65	13	34	63	1	17	12	2	6
5.	Tretes	101	19	176	82	7	84	7	2	12
Jumlah		977	139	1127	1079	25	508	54	24	72

Sumber: Data Demografi Desa Bendosari 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Bendosari dengan mayoritas penduduk sebagai petani. Dapat dilihat juga bahwa jumlah pengangguran di Desa Bendosari cukup tinggi. Sehingga Desa Bendosari perlu membuka lapangan pekerjaan melalui usaha-usaha dengan memanfaatkan potensi desa.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Dalam penyajian data yang menjadi rumusan masalah penelitian, dimana peneliti menyajikan data sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini adalah pada pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

Dengan mengacu pada upaya untuk mewujudkan pembangunan desa mandiri melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari. Hal pertama yang perlu dikaji adalah bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi pada Desa Bendosari. Berdasarkan data yang sesuai dengan fakta empiris pada situs penelitian bahwa Desa Bendosari bertujuan untuk menjadi berkembang, maju, mandiri maupun desa yang berswasembada.

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Proses pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjelaskan tahap-tahap dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Bendosari. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari, yang menjadi tolak ukur bukan hanya hasil yang diperoleh dari pemberdayaan masyarakat melainkan pada proses pemberdayaan

masyarakatnya. Proses pemberdayaan merupakan dasar yang akan menentukan tingkat keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dasar proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari dengan berfokus pada kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan. Pengembangan potensi-potensi masyarakat menjadi sebuah pondasi yang menjadi faktor penting pemberdayaan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi pada proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Bendosari memanfaatkan pengembangan potensi lokal masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari, bahwa:

“Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari sendiri memfokuskan dengan mengembangkan potensi asli masyarakat setempat dan partisipasi seluruh lingkungan masyarakat. Potensi asli masyarakat Bendosari menjadi dasar dalam pembangunan masyarakat. Pemerintah Desa Bendosari memberikan bimbingan atau pelatihan terhadap potensi lokal masyarakat untuk dikembangkan. Karena masyarakat desa tidak dapat dipaksakan untuk mengembangkan potensi luar masyarakat.” (Wawancara tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dasar proses pemberdayaan adalah dengan mengembangkan potensi asli atau lokal masyarakat Desa Bendosari. Dengan mengembangkan potensi asli masyarakat diharapkan mampu meningkatkan peran aktif lingkungan masyarakat secara meluas dalam pembangunan. Pemerintah Desa Bendosari juga memberikan kepercayaan secara

optimal kepada masyarakat bahwa mereka dapat menentukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan perubahan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Sehingga masyarakat tidak harus memaksakan untuk mengembangkan potensi diluar kemampuannya. Berikut ini contoh dari pengembangan potensi lokal masyarakat Desa Bendosari, yaitu pengembangan kerajinan rotan.

Gambar 9: Salah Satu Contoh Pengembangan Potensi Lokal Masyarakat Desa Bendosari



Sumber: Dokumentasi Desa Bendosari Tahun 2016

Dari kegiatan pengembangan potensi lokal masyarakat di Desa Bendosari menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan pemerintah Desa Bendosari berusaha memahami karakteristik masyarakat setempat

dengan memahami potensi lokal masyarakat. Menurut Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari mengemukakan bahwa:

“Dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari sebenarnya dengan memahami kemampuan serta karakteristik. Karena pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilihat pada jangka waktu yang singkat. Sehingga membutuhkan kesabaran dengan memahami karakteristik masyarakat serta informasi yang menyangkut segala aspek di dalam masyarakat dengan menciptakan kesadaran melalui pendekatan tanpa terkecuali kebiasaan yang ada di masyarakat. Kemudian pemerintah desa mengadakan musyawarah dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Sehingga dapat membangun kesetaraan masyarakat dan semua mempunyai hak untuk bersama-sama membangun desa menjadi lebih maju. Walaupun pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.” (Wawancara tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa Pemerintah Desa Bendosari memahami terlebih dahulu tentang karakteristik masyarakat. Dengan memahami karakteristik masyarakat setempat dengan mengumpulkan informasi segala aspek termasuk potensi yang dimiliki masyarakat bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berdiskusi dengan Pemerintah Desa Bendosari. Adanya diskusi atau musyawarah antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Bendosari diharapkan mampu menentukan program-program dalam pembangunan desa. Hal ini diperkuat dengan penjelasan oleh Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari, bahwa:

“Proses pemberdayaan masyarakat harus berasal dari masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti kepala dusun setempat, kemudian untuk di musyawarahkan kepada Pemerintah Desa Bendosari. Dengan begitu masyarakat dapat menentukan apa program selanjutnya melalui sifat dasar masyarakat desa, yaitu gotongroyong. Dengan adanya gotongroyong dapat membangun kekuatan-kekuatan untuk menciptakan perubahan kearah lebih baik. Sehingga menciptakan kemandirian dalam diri masyarakat dengan pembangunan yang berkesinambungan dan setiap lapisan masyarakat mampu

mengembangkan potensinya.” (Wawancara tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari dan Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari melalui proses, sebagai berikut:

1. Tahap awal proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari adalah dengan memahami dan mengidentifikasi karakteristik masyarakat setempat.
2. Kemudian dengan mengumpulkan informasi segala aspek di dalam masyarakat, termasuk aspek potensi, pendidikan dan status sosial masyarakat.
3. Melibatkan berbagai tokoh masyarakat, seperti kepala dusun setempat untuk ikut berpartisipasi memberikan pengertian masyarakat yang selanjutnya untuk di musyawarahkan dengan pemerintah desa.
4. Memahami kebiasaan serta adat istiadat yang berkembang di masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dengan memaksimalkan sifat gotongroyong dan suasana kekeluargaan.
5. Membangun kepercayaan diri terhadap masyarakat oleh pemerintah desa. Hal tersebut dapat menjadi modal utama membangun masyarakat untuk maju.
6. Membangun kekuatan-kekuatan masyarakat untuk saling bekerjasama menciptakan perubahan dalam pembangunan desa.

7. Menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat bukan proses yang singkat melainkan membutuhkan proses jangka panjang. Sehingga dibutuhkan perubahan secara bertahap dalam masyarakat.
8. Meningkatkan kemandirian masyarakat menjadi lebih maju dalam pembangunan yang berkesinambungan.

Berdasarkan proses tersebut bahwa Pemerintah Desa Bendosari telah melakukan program pemberdayaan masyarakat dengan mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang menjadi berkembang, maju dan mandiri serta desa yang berswadaya dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di masyarakat setempat.

b. Pihak-pihak dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari terdapat pihak-pihak yang ikut berkontribusi untuk kelangsungan proses pemberdayaan masyarakat. Pihak-pihak inilah yang menentukan tingkat keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat serta bentuk keterlibatan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari:

1. Kepala Desa Bendosari

Kepala Desa merupakan aktor penting dalam pemerintahan desa yang memiliki peran secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek pembangunan desa. Sebagaimana peran Kepala Desa Bendosari sangat dibutuhkan

dalam proses pemberdayaan masyarakat. Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari berperan dalam pembuatan kebijakan melalui program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2009 untuk membangun pariwisata di Desa Bendosari. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh Bapak Khoirun, SE., bahwa:

“Program pemberdayaan masyarakat sendiri sebenarnya sudah kami rencanakan dan program-program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2009. Saya dan teman-teman perangkat desa bekerjasama untuk membangun masyarakat melalui program-program seperti, memberikan pelatihan tentang biogas, pertanian maupun pengetahuan tentang wisata. Namun, semua itu kembali pada peran masyarakat. Saya juga mengajak perangkat desa, LPMD, BPD maupun tokoh masyarakat untuk melakukan pendampingan, pengawasan serta mendorong masyarakat melalui musyawarah rutin desa terkait program pemberdayaan.” (Wawancara tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa Kepala Desa berperan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan oleh Kepala Desa sebagai aktor yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan, termasuk program pemberdayaan masyarakat. Peran Kepala Desa Bendosari sangat berpengaruh dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah dijalankan sejak tahun 2009. Selama berjalannya proses pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama dengan perangkat Desa Bendosari terus menerus melaksanakan pelatihan, pengawasan serta musyawarah desa secara rutin untuk mengetahui perkembangan proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang berada di desa, bertugas untuk meningkatkan kekuatan ekonomi desa maupun kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola bersama-sama dengan masyarakat desa. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, peran dari BUMDes dibutuhkan untuk membantu berjalannya pemberdayaan masyarakat di desa. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari yang juga sebagai pengurus BUMDes Desa Bendosari, bahwa:

“Dalam proses pemberdayaan yang ada di Desa Bendosari, peran BUMDes juga sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah desa. Dalam tujuannya sendiri bahwa BUMDes ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari pihak BUMDes sendiri aktif dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat melalui usaha-usaha yang dikelola oleh desa. Seperti contohnya, usaha pembangunan pariwisata desa.” (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Bendosari juga berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari. Dengan adanya usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat untuk diberdayakan menjadi lebih mandiri.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan aktor yang bertugas untuk membantu dan mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. BPD memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa, yang dimana juga menentukan keberhasilan pembangunan desa. Peran BPD Desa Bendosari dalam proses pemberdayaan masyarakat dibuktikan dengan ikut berperan aktif

mengadakan musyawarah desa. Sebagaimana penjelasan oleh Bapak Wiyono selaku anggota BPD Desa Bendosari, bahwa:

“Kami selaku BPD sendiri juga ikut berkontribusi untuk mendorong masyarakat agar ikut dalam semua program desa. Dalam proses pemberdayaan masyarakat dari pihak BPD sendiri telah mengadakan musyawarah bersama masyarakat. Contohnya pada saat acara tahlilan rutin di tiap dusun. Pada saat acara tahlil selain berdoa sholawatan juga untuk musyawarah terkait program desa.” (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 di rumah Bapak Wiyono)

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa BPD sangat berperan aktif dalam setiap program desa. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan musyawarah rutin melalui kegiatan tahlilan (acara doa bersama) di setiap dusun. Dengan adanya musyawarah tersebut BPD Desa Bendosari dapat mengetahui perkembangan serta masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari.

4. Masyarakat Desa Bendosari

Masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi obyek melainkan juga sebagai subyek dalam program pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat merupakan faktor utama sebagai upaya keberlangsungan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya peran dari masyarakat itu sendiri, maka program-program pemberdayaan dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat Desa Bendosari dalam proses pemberdayaan masyarakat dibuktikan dengan tingkat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sebagaimana menurut Bapak Yeni selaku Sekretaris Desa Bendosari, menjelaskan bahwa:

“Masyarakat Desa Bendosari dapat dibilang cukup berperan aktif dalam setiap program dari pemerintah desa. Karena sejak dahulu sifat dasar masyarakat desa adalah gotongroyong, yang sampai sekarang masih dipertahankan. Sehingga setiap adanya program pelatihan dan musyawarah, masyarakat cukup bersemangat untuk bersama-sama membangun desa. Namun, tentunya peran masyarakat masih belum maksimal yang disebabkan keterbatasan sumberdaya maupun sifat menerima akan masuknya hal baru.” (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa peran masyarakat Desa Bendosari cukup berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat terhadap program-program yang diberikan pemerintah Desa Bendosari. Pada hakekatnya masyarakat desa sangat mempertahankan sifat saling membantu atau sifat gotongroyong. Namun, peran masyarakat Desa Bendosari belum berjalan secara maksimal. Penyebab utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang masih rendah untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru.

2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat diperlukan berbagai pendekatan-pendekatan kepada masyarakat agar tumbuh semangat menuju perubahan ke arah lebih baik. Sebagai upaya mendorong dan menumbuhkembangkan semangat masyarakat, Desa Bendosari melakukan berbagai pendekatan terhadap program yang direncanakan oleh pemerintah Desa

Bendosari. Sehingga masyarakat dapat berkerjasama dengan aparat desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari.

a. Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari, pemerintah melakukan berbagai pola pendekatan terhadap masyarakat setempat. Pola pendekatan sebagai suatu upaya memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran untuk melakukan perubahan menjadi lebih mandiri. Dalam pola pendekatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari, terdapat berbagai pendekatan yang memungkinkan masyarakat dapat berkerjasama dengan pemerintah Desa Bendosari dalam program pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa Bendosari telah melakukan berbagai cara pendekatan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan memotivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari, bahwa:

“Hal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bendosari adalah tahap awal dengan pendekatan memberikan pengertian kepada masyarakat. Masyarakat diberikan motivasi serta dorongan untuk ikut berkontribusi terhadap program dari pemerintah desa. Kemudian mengembangkan potensi lokal yang dimiliki masyarakat setempat diperkuat melalui organisasi desa, seperti LPMD, karang taruna, serta PKK. Melalui organisasi tersebut, masyarakat diberikan dorongan secara kekeluargaan. Karena masyarakat sendiri tidak dapat dipaksa untuk langsung berubah. Sehingga perlu kesabaran dan ketelatenan dari perangkat desa. Jadi kami melakukan pendampingan, pengawasan, dan dorongan dengan cara melalui organisasi-organisasi desa tersebut. Selain itu juga mengadakan pelatihan dengan berkerjasama dengan pihak-pihak luar.”
(Wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bendosari telah melakukan berbagai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa Bendosari dilakukan dengan cara pendekatan secara psikologi sebagai upaya memberikan motivasi dan kesadaran masyarakat. Pemerintah Desa Bendosari melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui organisasi atau lembaga yang ada di desa, seperti LPMD, karangtaruna serta PKK. Dengan adanya organisasi atau lembaga tersebut, pemerintah Desa Bendosari dapat melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap perkembangan masyarakat. Berbagai cara pendekatan pemerintah Desa Bendosari juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari, bahwa:

“Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh desa sendiri adalah dengan merubah pemikiran masyarakat melalui musyawarah-musyawah desa. Musyawarah ini dilakukan melalui organisasi desa, yaitu LPMD, karang taruna, kelompok sadar wisata, dan juga PKK. Dengan adanya organisasi tersebut masyarakat diberikan pendampingan dengan cara musyawarah tiap dusun, kemudian hasil musyawarah tersebut dibawa ke musrenbangdes. Sehingga kami aparat desa juga memberikan akses kepada masyarakat untuk menyalurkan pendapatnya dalam progam desa.” (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara dari Bapak Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari dan Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat berbagai pola pendekatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari. Berbagai pola pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tahap awal pendekatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari adalah membentuk sikap, perilaku dan kepribadian masyarakat dengan cara memberikan motivasi serta dorongan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan dilakukan secara psikologis melalui organisasi atau lembaga Desa Bendosari tanpa adanya unsur pemaksaan dari aparat desa.
2. Mengembangkan potensi lokal masyarakat Desa Bendosari melalui organisasi atau lembaga desa, seperti LPMD, karang taruna, PKK serta kelompok-kelompok lainnya. Dengan adanya organisasi atau lembaga tersebut dapat memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat.
3. Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap perkembangan masyarakat dengan memberikan akses untuk menyalurkan berbagai pendapat melalui musyawarah setiap dusun di Desa Bendosari. Dengan adanya musyawarah tersebut, masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat.

Selain adanya pola pendekatan pemberdayaan masyarakat diatas, terdapat kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bendosari. Pelatihan-pelatihan ini sebagai pendekatan kepada masyarakat Desa Bendosari, contoh pada gambar 10 adalah sebagai berikut:

Gambar 10: Salah satu contoh pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bendosari berkerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang



Sumber: Dokumentasi Desa Bendosari tahun 2015

Dalam pelatihan tersebut, pemerintah Desa Bendosari berkerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang terkait dengan pelatihan ekonomi kreatif. Pelatihan ekonomi kreatif termasuk contoh dari pendekatan yang dilakukan pemerintah Desa Bendosari untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari.

b. Bentuk Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Bendosari, pemerintah desa menerapkan beberapa pendekatan terhadap masyarakat. Bentuk pendekatan merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah Desa Bendosari menggunakan beberapa bentuk pendekatan untuk bagaimana dapat memberikan kesadaran serta motivasi kepada masyarakat. Menurut Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bendosari berpendapat bahwa:

“Bentuk pendekatan pemerintah Desa Bendosari dengan menyadarkan masyarakat bahwa perubahan itu berasal dari diri mereka sendiri. Masyarakat tidak harus bergantung kepada pihak luar. Pemerintah desa hanya memberikan fasilitas, tinggal masyarakat harus memanfaatkan kemampuan mereka. Kami juga sebagai aparat desa telah membentuk organisasi-organisasi untuk dijadikan fasilitas bagi masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Dari wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pendekatan di Desa Bendosari sangat bergantung pada inisiatif dari dalam diri masyarakat. Pemerintah Desa Bendosari hanya memberikan fasilitas dengan membentuk organisasi sebagai akses untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang ada di masyarakat. Sebagaimana Bapak M. Khoirun, SE,. dalam memberikan penjelasan tentang pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari adalah:

“Pemerintah Desa Bendosari sudah melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat. Pendekatan dilakukan secara individu dengan mengundang warga desa ke dalam acara silaturahmi sebagai pendekatan secara individu maupun dengan menjalin komunikasi kepada tokoh masyarakat yang ada di dusun, yang kemudian untuk disalurkan kepada masyarakat. Adanya pembentukan dan perbaikan sistem organisasi masyarakat sebagai fasilitas masyarakat dalam pengembangan kemampuan diri mereka. Kemudian membentuk pemikiran masyarakat agar tidak harus selalu bergantung pada pihak-pihak luar dalam membangun desa. Kita sendiri pun bisa mandiri dalam membangun Desa Bendosari.” (Wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Wiyono selaku anggota BPD Desa Bendosari, bahwa:

“Setiap progam desa tentu ada pendekatan kepada masyarakat. Seperti mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait progam-progam desa. Contohnya melalui saya sebagai tokoh masyarakat Dusun Ngeprih dan juga anggota BPD Desa Bendosari untuk kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Selain itu juga melalui organisasi desa, seperti karang taruna sebagai organisasi pemuda desa. Sehingga diharapkan muncul kesadaran dalam diri masyarakat untuk nantinya masyarakat menjadi

mandiri dan tidak tergantung pada pihak luar.” (Wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 di rumah Bapak Wiyono)

Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Bendosari telah memberikan berbagai pendekatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Bentuk pendekatan masyarakat di Desa Bendosari dapat dijadikan poin-poin sebagai berikut:

1. Pendekatan secara individu

Dalam pendekatan secara individu, Pemerintah Desa Bendosari melakukan berbagai upaya untuk memberikan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat. Bentuk pendekatannya sendiri dengan mengundang serta mengadakan acara silaturahmi maupun musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa Bendosari. Adapun mengadakan musyawarah dengan seluruh tokoh masyarakat di dusun sebagai komunikasi dalam melakukan pendekatan yang selanjutnya untuk disalurkan kepada masyarakat.

2. Pendekatan secara organisasi

Pemerintah Desa Bendosari dalam pendekatan secara organisasi dengan membentuk dan memperbaiki sistem organisasi desa untuk lebih menjadi fasilitator masyarakat. Organisasi Desa Bendosari diharapkan sebagai akses pemerintah desa untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.

3. Pendekatan secara politis

Dengan adanya pendekatan secara politis, Desa Bendosari telah membangun hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa dengan organisasi masyarakat, dan organisasi masyarakat dengan

masyarakat. Pada dasarnya dengan membangun hubungan tersebut, bahwa Pemerintah Desa Bendosari berupaya untuk melakukan pendekatan secara politis.

Berbagai bentuk pendekatan telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari dalam upaya untuk membangun masyarakat melalui pemberdayaan. Pada dasarnya dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan berbagai macam pendekatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat ikut berkontribusi pada setiap program-program dari Pemerintah Desa Bendosari. Karena faktor utama keberhasilan suatu pemberdayaan berada pada masyarakat itu sendiri.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

Desa Bendosari merupakan salah satu desa yang sedang berada pada tahap pembangunan untuk menjadi desa mandiri. Pembangunan desa mandiri mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa itu sendiri. Dengan pengembangan potensi desa dapat menciptakan suatu kemandirian desa yang tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Dalam mewujudkan terciptanya pembangunan desa mandiri, Pemerintah Desa Bendosari melaksanakan berbagai program sebagai upaya agar desanya menjadi berkembang, maju dan mandiri dengan menjadi desa yang berswasembada.

a. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari dalam rangka mewujudkan pembangunan desa mandiri dengan menggunakan strategi melalui pemberdayaan masyarakat untuk membangun desa wisata. Pembangunan desa wisata direncanakan sebagai fokus utama Pemerintah Desa Bendosari yang menjadi alternatif bagi masyarakat agar mampu berkembang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembangunan desa wisata dapat memanfaatkan berbagai potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari, bahwa:

“Desa Bendosari dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri adalah dengan menjadikan Desa Bendosari sebagai desa wisata. Pembangunan desa wisata sebenarnya merupakan fasilitas masyarakat untuk berkembang. Dengan adanya wisata ini masyarakat diharapkan mampu menyalurkan kemampuannya untuk ikut berkontribusi dalam proses pembangunan desa wisata.” (Wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari bahwa Pemerintah Desa Bendosari dalam rangka mewujudkan pembangunan desa mandiri adalah dengan melalui pembangunan desa wisata. Adapun penjelasan pada wawancara oleh peneliti, sebagai berikut:

“Pemerintah Desa Bendosari memang sedang merencanakan untuk menjadi sebuah desa mandiri dengan pembangunan melalui pengembangan desa wisata. Hal ini dilakukan untuk dijadikan akses oleh masyarakat agar mengembangkan segala potensi yang ada. Keseriusan ini telah direncanakan oleh Bapak M. Khoirun (Kepala Desa Bendosari) sejak tahun 2009.” (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Seksi Pemerintah Desa Bendosari juga sependapat dengan Bapak Yeni Widayat, bahwa:

“Bapak M. Khoirun (Kepala Desa Bendosari) telah merencanakan dan membuat progam-progam untuk menjadikan Desa Bendosari sebagai desa wisata. Perencanaan dan pembangunan ini sudah dijalankan sejak tahun 2009, yang dimana semata-mata dengan memberdayakan masyarakat Desa Bendosari melalui desa wisata. Maka dari itu Bapak M. Khoirun (Kepala Desa Bendosari) terus mendorong masyarakat agar dapat ikut berkontribusi dengan adanya pembangunan wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.” (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bendosari dan aparat Desa Bendosari dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan desa wisata. Pembangunan desa wisata berpusat pada rakyat dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari untuk mendorong perubahan masyarakat agar lebih berdaya melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Oleh karena itu, pembangunan desa wisata menjadi sasaran utama dalam menciptakan kemandirian sebagai upaya menjadikan masyarakat yang berswasembada.

Dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari, pemerintah desa melakukan berbagai strategi pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan desa mandiri. Pemerintah Desa Bendosari melaksanakan strategi pembangunan dengan menitikberatkan pada peningkatan pembangunan sumberdaya manusia. Strategi pembangunan sumberdaya manusia menjadi sasaran utama dengan menciptakan kondisi dan situasi untuk mendorong tumbuhnya

kemampuan dan kekuatan dalam diri masyarakat agar memaksimalkan peran masyarakat. Dengan adanya peran masyarakat menjadi faktor keberhasilan sebuah pembangunan desa. Sebagaimana menurut Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari menjelaskan bahwa:

“Menurut pendapat saya bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan sebuah pembangunan adalah dengan membangun sumberdaya masyarakat terlebih dahulu. Tidak ada artinya jika pembangunan desa wisata hanya dengan membangun objek wisata, namun tidak dengan membangun masyarakat. Karena pembangunan apa pun itu tidak lepas dari peran masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Kemudian beliau melanjutkan penjelasan terkait strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari, adalah sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari adalah yang utama tadi pembangunan sumber daya masyarakat, karena tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian dengan memberikan apresiasi seperti memberikan beasiswa kepada murid-murid berprestasi mulai dari siswa SD dan SMP yang mendapatkan juara 3 besar di sekolah yang berada di Desa Bendosari, dan juga memberikan uang saku kepada masyarakat Desa Bendosari yang sedang melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Namun pembangunan sumberdaya masyarakat juga tidak hanya melalui pendidikan. Adapun sosialisasi melalui organisasi dan juga tokoh masyarakat serta membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang akan membantu pengembangan serta menjadi pemandu wisata jika ada tamu-tamu yang sedang berkunjung ke Desa Bendosari. Membentuk dan memperbaiki sistem organisasi melalui BUMDes sebagai lembaga yang menangani program desa wisata. Kemudian memaksimalkan fungsi kelembagaan dengan membuat kebijakan bersama dengan dukungan BPD Desa Bendosari dan masyarakat serta menjalin kerjasama pihak luar seperti kerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.” (Wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Selain adanya penjelasan dari Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari, juga terdapat penjelasan dari Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari serta pengurus BUMDes Desa Bendosari, adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Desa Bendosari sangat antusias dalam pembangunan desa wisata. Kami telah menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pembangunan desa wisata. Kami berkerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk membantu bagaimana menciptakan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Malang untuk pengelolaan tempat-tempat wisata yang masuk ke dalam wilayah Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan Kabupaten Malang juga telah mengadakan sosialisasi maupun pelatihan kepada masyarakat terkait pariwisata. Dan rencananya kami juga akan berkerjasama dengan BRI (Bank Rakyat Indonesia) untuk membantu pembangunan wisata di desa kami.” (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa dan aparat Desa Bendosari, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Bendosari telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata secara bertahap sejak tahun 2009. Sehingga dapat diklasifikasikan ke dalam poin-poin strategi sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya masyarakat Desa Bendosari sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan tujuan pemahaman tentang bidang pariwisata. Masyarakat sebagai aktor utama pembangunan wisata diharapkan mampu ikut berpartisipasi dan meningkatkan kemampuannya dalam program-program di bidang pariwisata oleh Pemerintah Desa Bendosari. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti bahwa Pemerintah Desa Bendosari melaksanakan program dalam pembangunan sumber daya masyarakat, sebagai berikut:

- a) Membangun sumber daya masyarakat melalui pendidikan, karena tingkat pendidikan masyarakat lokal yang masih rendah menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk pembangunan desa wisata. Pemerintah Desa Bendosari sejak tahun 2009 berupaya untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta memberikan apresiasi kepada siswa-siswi di Desa Bendosari. Hal ini dibuktikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SD dan SMP yang mendapatkan juara 3 besar maupun memberikan uang saku kepada masyarakat yang sedang melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
 - b) Membangun sumber daya masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan, sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pariwisata yang ada di desanya. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan yang diadakan oleh desa maupun melalui tokoh masyarakat dari setiap dusun yang kemudian untuk disalurkan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya seperti acara tahlil, karang taruna dan PKK.
 - c) Membangun sumber daya melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Bendosari, yang kemudian menjadi tim pemandu wisata desa. Kelompok ini dibentuk dari berbagai organisasi atau kelompok karang taruna yang ada di setiap dusun untuk memaksimalkan kegiatan pariwisata di Desa Bendosari.
2. Pembentukan dan perbaikan sistem organisasi dan lembaga di Desa Bendosari untuk memaksimalkan kinerja dalam pembangunan desa wisata adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk BUMDes sebagai lembaga yang mengelola kegiatan-kegiatan pariwisata di Desa Bendosari. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat memaksimalkan usaha-usaha asli milik desa pada bidang pariwisata.
 - b) Melakukan pembinaan terhadap organisasi maupun kelompok masyarakat sebagai bentuk strategi pembangunan wisata dengan mengorganisir masyarakat untuk meningkatkan kontribusi pada bidang pariwisata.
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan Desa Bendosari sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam perencanaan kebijakan dan menjalin kerjasama dalam pembangunan desa wisata. Adapun strategi meningkatkan fungsi kelembagaan Desa Bendosari, sebagai berikut:
- a) Perencanaan dan pembuatan kebijakan terkait kegiatan pada bidang pariwisata bersama dengan BPD Desa Bendosari maupun masyarakat Desa Bendosari dengan mengadakan musyawarah di Balai Desa Bendosari. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat serta masukan-masukan dalam pembangunan desa wisata di Desa Bendosari.
 - b) Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar yang bertujuan untuk membantu pencapaian sasaran dalam pembangunan wisata di Desa Bendosari. Bentuk kerjasama dengan pihak luar seperti, Pemerintah Desa Bendosari berkerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk membantu memberikan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Kerjasama juga melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Malang untuk memberikan pelatihan serta membantu pengelolaan objek pariwisata, yang masuk ke dalam wilayah Dinas Kehutanan.

Dari berbagai strategi diatas sebagai pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, Pemerintah Desa Bendosari terus berupaya mencapai sasaran dan tujuan untuk mencapai pembangunan desa mandiri. Strategi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bendosari.

b. Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, Pemerintah Desa Bendosari berfokus pada pembangunan desa ekowisata berbasis masyarakat. Desa ekowisata berbasis masyarakat dapat diartikan dengan pembangunan wisata yang berwawasan lingkungan dengan segala potensi yang ada di desa, baik potensi alam maupun kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Para wisatawan melakukan aktivitas pariwisata berbasis alam maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan masyarakat dan pemahaman lingkungan yang dikelola berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Pada prakteknya Pemerintah Desa Bendosari tidak hanya melakukan pembangunan desa wisata melalui objek wisata melainkan juga dengan pembangunan wisata edukasi bagi wisatawan. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari bahwa:

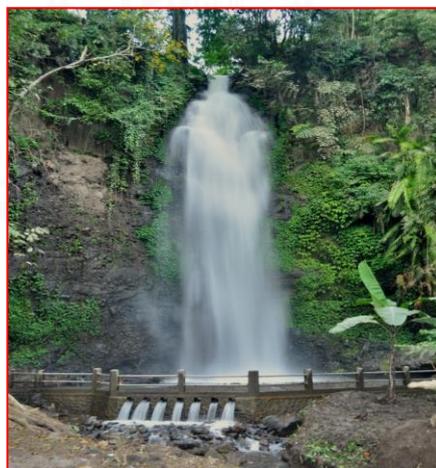
“Fokus kami dalam pembangunan desa wisata tidak hanya dalam pembangunan dari segi objeknya saja. Melainkan juga dengan pembangunan wisata yang berbasis pada wisata edukasi. Sehingga terdapat berbagai wisata edukasi, seperti wisata pendidikan tentang biogas maupun wisata pembangkit listrik bertenaga air yang biasa dikenal dengan Mikrohidro. Sehingga wisatawan tidak hanya berwisata alam melainkan juga mendapatkan edukasi terkait kegiatan masyarakat di Desa Bendosari.” (Wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa Desa Bendosari merupakan salah satu jenis desa ekowisata berbasis masyarakat. Pemerintah Desa Bendosari melakukan berbagai upaya dalam pengembangan desa ekowisata berbasis masyarakat dengan pengembangan berbagai potensi sebagai penunjang kegiatan desa ekowisata. Adapun potensi-potensi yang dikembangkan yang berdasarkan data dari Pemerintah Desa Bendosari adalah sebagai berikut:

1. Grojogan Sewu

Air terjun Coban Sewu (Grojogan Sewu) yang terletak di wilayah Dusun Tretes merupakan air terjun yang terkenal khasiat penyembuhannya. Untuk menuju air terjun ini pengunjung harus melintasi jembatan gantung di atas Sungai Konto. Di lokasi air terjun ini telah dibangun Padepokan (Balai) Sapto Pratolo dan sarana sanitasi (toilet dan kamar mandi), penggagas pembangunan prasarana adalah seorang keturunan Etnis Tionghoa yang merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah sembuh dari sakit yang diderita setelah rutin melakukan *therapy* di Air Terjun Coban Sewu. Adapun jembatan gantung yang baru dibangun oleh perorangan dari Surabaya juga dilandasi rasa syukur setelah usahanya berhasil dengan memiliki *Nadzar* yang terucap di kawasan wisata tersebut. *Nadzar* itu terucap setelah melihat jembatan lama yang rusak terkena banjir.

Gambar 11: Air Terjun Grojogan Sewu

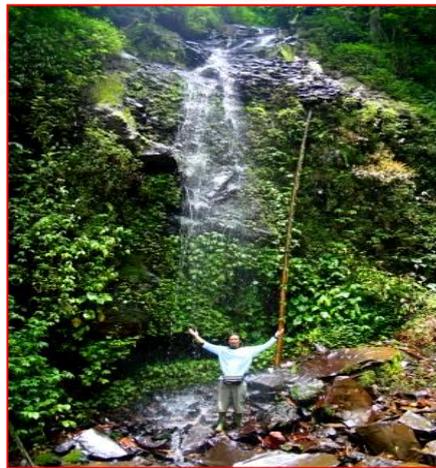


Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

2. Grojogan Mutiara

Air Terjun Grojogan Mutiara berada di wilayah Dusun Dadapan Wetan. Untuk menuju air terjun ini ditempuh melewati jalur *jogging track* di sepanjang Sungai Panguripan yang dimulai dari Air Grojogan Sewu. Sedangkan jalur lain yang lebih dekat bisa ditempuh dari ruas jalan desa yang menghubungkan Dusun Dadapan Wetan dengan Dusun Cukal. Keunikan dari air terjun ini adalah percikan air yang terhempas di batuan terlihat berkilauan saat terkena cahaya matahari sehingga terlihat seperti mutiara. Lokasi yang memiliki ketinggian 1080 m dari permukaan laut ini berhawa sangat sejuk. Alam yang masih asri memberikan pengalaman bagi wisatawan.

Gambar 12: Air Terjun Grojogan Mutiara



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

3. *River Track* Sungai Panguripan, Sumber Manis dan Sumber Songo

Jalur di sepanjang Sungai Panguripan ini memiliki panjang sekitar 1.500 m dan memiliki jalur menanjak dan landai, jalur ini dapat ditempuh selama 1-1,5 jam. Adapun bagi wisatawan yang menginginkan *track* yang lebih menantang dapat melanjutkan dengan menempuh jalur yang menuju Telaga di lereng Gunung Kawi dengan *track* sepanjang sekitar 3.000 m dengan waktu tempuh sekitar 4 jam untuk pulang dan pergi. Di sepanjang jalur ini wisatawan akan menikmati kesejukan udara dan kesegaran air. Wisatawan akan menjumpai sumber yang berjumlah sembilan yang masyarakat sering menyebutnya Sumber Songo dan juga terdapat mata air Sumber Manis.

Gambar 13: River Track Sungai Panguripan



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

Gambar 14: Pembangunan Sumber Manis



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

4. Wisata Petik Apel

Salah satu produk pertanian andalan masyarakat Desa Bendosari adalah apel. Ada tiga jenis apel yang sedang dikembangkan oleh masyarakat dan dapat langsung dinikmati oleh pengunjung di kebun apel ini, yaitu Apel Manalagi atau yang lebih dikenal dengan Apel Batu; Apel *Rum Beauty*; serta Apel Anna. Lokasi perkebunan apel sebagian besar berada di Dusun Dadapan Wetan.

Gambar 15: Wisata Petik Apel



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

5. Wisata Kebudayaan atau Ritual

Masyarakat Desa Bendosari memegang teguh nilai luhur dan tradisi Adat dan Budaya Jawa. Sedekah Bumi yang rutin dilaksanakan setiap tahun ditandai dengan penyembelihan seekor kerbau betina sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Kerbau yang akan disembelih terlebih dahulu di arak (kirab) dengan diiringi berbagai tumpeng hasil bumi dan iringan berbagai atraksi seni dan budaya masyarakat. Acara sedekah bumi diiringi berbagai festival kesenian dan bazar yang pada puncak acara digelar kesenian wayang kulit.

Gambar 16: Acara Kebudayaan Sedekah Bumi



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

6. Wisata Pendidikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdapat di area Air Terjun Coban Sewu (Grojokan Sewu) terdapat dua pembangkit listrik bertenaga air yang biasa dikenal dengan Mikrohidro. Bagi masyarakat umum dan siswa sekolah kejuruan yang ingin mengetahui dan memahami bagaimana contoh pemanfaatan energi alam (air) menjadi energi listrik. Penggunaan listrik untuk saat ini masih difokuskan bagi penerangan jalan dan wilayah disekitar Grojokan Sewu. Sehingga pada malam hari pun wisata Grojokan Sewu masih bisa dikunjungi. Pengunjung dapat juga mempelajari sistem operasional dari PLTMH untuk menambah wawasan teknologi tepat guna, khususnya bagi pelajar/mahasiswa.

Gambar 17: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

7. Wisata Pendidikan Biogas

Desa Bendosari sebagian besar masyarakatnya adalah peternak sapi perah telah mengembangkan teknologi pengolahan limbah ternak menjadi energi biogas. Pemerintah Desa Bendosari juga telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam program pengolahan limbah ternak menjadi energi biogas.

Program pengolahan limbah menjadi energi biogas mempunyai manfaat bagi masyarakat, sehingga mendapatkan energi alam gratis untuk pengganti bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran limbah. Melimpahnya limbah kotoran ternak telah memberikan berkah bagi masyarakat sehingga tidak lagi perlu mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar. Pemerintah Desa juga menyediakan pemandu yang akan memberikan panduan bagi pengunjung khususnya yang ingin berwisata sambil belajar tentang teknologi pengolahan limbah menjadi energi biogas.

Gambar 18: Salah Satu Biogas di Desa Bendosari



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

8. *Handy Craft*/Kerajinan Lampu Hias dan Kursi Anyaman

Salah satu bentuk kerajinan di Desa Bendosari adalah kerajinan lampu hias dan kursi anyaman. Wisatawan dapat mengunjungi galeri pengrajin lampu hias dan berbagai kerajinan kursi anyaman. Dengan produsen bernama Kust yang dimiliki oleh Bapak Kusnadi yang berada di Dusun Dadapan Kulon.

Gambar 19: Produk Kerajinan Lampu Hias



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

Gambar 20: Produk Kursi Anyaman



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

9. Wisata Taman Pinus Bendosari

Taman Pinus Bendosari merupakan wahana wisata baru di Desa Bendosari yang berlokasi di Dusun Cukal. Taman Pinus Bendosari yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2017. Di Taman Pinus Bendosari terdapat banyak wahana yang dapat digunakan antara lain, Flying Fox Dewasa dan Anak-anak, Mini Trai, ATV, Hammock, berbagai spot foto menarik, serta cafe pinus. Di Taman Pinus juga terdapat berbagai kesenian yang ditampilkan, seperti saat pembukaan terdapat kesenian Kuda Lumping dan Dangdut.

Gambar 21: Salah Satu Wahana di Taman Pinus Bendosari



Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Bendosari

10. Coban Sadang

Coban Sadang merupakan wisata di Desa Bendosari yang dalam tahap pembangunan. Coban Sadang terletak di Dusun Ngeprih yang menjadi wisata alam dan wisata keluarga, yang terdapat air terjun dan rencananya akan dibangun kolam renang.

Gambar 22: Coban Sadang Desa Bendosari



Sumber: Dokumentasi oleh Penulis

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari mempunyai tujuan sebagai rumusan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dengan pembangunan desa ekowisata. Berdasarkan tujuan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, Desa Bendosari mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Bendosari. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari dan Pengurus BUMDes Desa Bendosari, sebagai berikut:

“Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari sendiri mempunyai tujuan utama adalah mengembangkan potensi masyarakat, karena potensi di desa ini sangat banyak. Sehingga rugi jika tidak dikelola oleh pemerintah desa sebagai amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2016 dengan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya pemberdayaan melalui pembangunan desa wisata, masyarakat diharapkan menjadi lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraannya. (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Pemerintah Desa Bendosari adalah menjadikan masyarakat Desa Bendosari lebih berswadaya dalam rangka mewujudkan pembangunan desa mandiri. Dengan adanya pembangunan desa wisata sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dapat meningkatkan kepedulian serta kemandirian dalam pembangunan melalui pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Bendosari.

d. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat berbasis wisata melalui pembangunan desa wisata mempunyai manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur Desa Bendosari. Kegiatan pembangunan di Desa Bendosari sangat menunjang keberadaan desa wisata sebagai desa yang memiliki berbagai potensi sebagai desa yang menarik dikunjungi untuk berpariwisata. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari, bahwa:

“Pembangunan desa wisata diharapkan mampu memberikan manfaat, tidak hanya untuk pemerintah desa melainkan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena masyarakat selama ini hanya fokus pada satu pekerjaan saja. Kegiatan ini pada intinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memaksimalkan peran aparat desa dalam amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sehingga kedepannya mudah-mudahan Desa Bendosari menjadi desa mandiri. (Wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Dari hasil wawancara dengan Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari dapat diklasifikasikan ke dalam dua manfaat. Adapun manfaat yang diberikan dalam kegiatan pembangunan desa wisata, adalah sebagai berikut:

1) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah rasa keinginan untuk memajukan desa mereka sebagai desa wisata yang diminati banyak pengunjung. Keinginan tersebut berkaitan pula dengan peningkatan kualitas di bidang kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan masyarakat serta terpeliharanya lingkungan. Berdasarkan pernyataan dari Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari bahwa manfaat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata bagi masyarakat adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bendosari.

2) Bagi Aparatur Desa

Aparatur desa merupakan warga desa yang dipilih dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan di desa. Dalam hal ini aparatur desa juga memiliki peran aktif dalam pengembangan desa yang menjadi desa dengan fasilitas wisata, aparatur desa juga terbantu dalam pelaksanaan kegiatan wisata yang dikelola,

sehingga mampu melaksanakan pelayanan pengunjung dengan lebih maksimal. Berdasarkan pernyataan dari Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari bahwa manfaat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata bagi aparatur desa adalah dapat meningkatkan perannya sebagai aparat desa yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga aparat Desa Bendosari dapat meningkatkan kapabilitas dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan manfaat yang diberikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, dapat disimpulkan bahwa manfaat tidak hanya bagi Pemerintah Desa Bendosari melainkan bagi masyarakat sebagai sasaran utama dari kegiatan desa wisata. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi aparat desa maupun masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa mandiri.

4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

Dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan untuk mewujudkan pembangunan desa mandiri. Berikut ini faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari ditinjau dari hasil wawancara oleh penulis, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang mendorong keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu program. Menurut Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari dan Pengurus BUMDes Desa Bendosari, bahwa:

“Faktor pendukung dari dalam sendiri yaitu potensi alam kita sangat mendukung dalam pembangunan desa wisata dan juga Pemerintah Desa Bendosari mempunyai keinginan yang kuat dengan terus membuat program-program pelatihan untuk masyarakat. Masyarakat juga sudah lumayan ikut berperan aktif dalam pembangunan desa wisata, karena karakter masyarakat sendiri yaitu gotongroyong. Sedangkan faktor pendukung dari luar yaitu sudah adanya Surat Keterangan dari Dinas Pariwisata di Desa Bendosari, dan Bappeda Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya pernah melakukan sosialisasi untuk membangun desa wisata. Bentuk dukungan lainnya adalah adanya kerjasama dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam pengelolaan desa wisata. Karena sebagian besar wilayah objek wisata termasuk wilayah kewenangan dari Dinas Kehutanan.” (Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor pendukung pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, yaitu faktor internal dan eksternal. Hal ini yang menjadi pendukung jalannya program pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari.

b. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Dalam sebuah pemberdayaan masyarakat terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan dari program pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintah Desa Bendosari

dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata melalui pembangunan desa wisata. Sebagaimana menurut Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari dan pengurus BUMDes Desa Bendosari bahwa:

“Pemerintah Desa Bendosari mengalami berbagai kendala dalam pembangunan pariwisata di desa ini. Faktor yang pertama dari masih rendahnya kualitas SDM masyarakat Desa Bendosari, karena sebagian besar penduduk hanya berpendidikan SD. Kemudian juga terdapat kendala di dana, pembangunan desa wisata sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Dan juga peran kami rasakan dari Kabupaten Malang masih kurang maksimal dalam mendukung pembangunan wisata di Desa Bendosari. Karena kami masih butuh arahan dan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Malang.”
(Wawancara pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Bendosari)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata melalui pembangunan desa wisata, baik faktor internal maupun eksternal.

C. Analisis Data dan Interpretasi Data

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

Dengan adanya observasi, dokumentasi serta wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu fokus penelitian. Selanjutnya penulis dapat menganalisa dan menyimpulkan kesesuaian teori dengan fakta yang ada di lapangan.

Menurut Widjaja (2003: 169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Berdasarkan teori tersebut, proses pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dalam menekankan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki agar muncul kemandirian masyarakat. Dengan adanya proses pemberdayaan masyarakat dapat mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Bendosari mendorong dan memotivasi masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih berdaya.

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan melalui kegiatan observasi dan wawancara oleh penulis terkait proses pemberdayaan masyarakat terdapat

kesesuaian dengan teori yang telah disebutkan pada Bab II tentang teori proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan teori dari *United Nation* (1956: 83-92) dalam Tampubolon (2006) tentang proses pemberdayaan masyarakat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kesesuaian dengan proses pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Bendosari. Adapun klasifikasi penulis terhadap proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari dengan teori menurut *United Nation* (1956: 83-92) dalam Tampubolon (2006) melalui beberapa proses, adalah sebagai berikut:

1) *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Strategi Pemerintah Desa Bendosari dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pemahaman dan mengidentifikasi untuk mengetahui karakteristik masyarakat. Karena Pemerintah Desa Bendosari memahami bahwa tahap awal suatu proses pemberdayaan masyarakat adalah memahami karakteristik masyarakat sebelum melakukan proses selanjutnya agar mencapai sasaran dari program pemberdayaan masyarakat.

2) *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan *custom*, jenis pengelompokan serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal. Pemerintah Desa Bendosari sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan segala informasi penduduk dengan melakukan *survey* atau *update* data terkait kondisi monografi. Dengan adanya data monografi dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan masyarakat sebagai bentuk perencanaan suatu program, termasuk pemberdayaan masyarakat.

3) *Identifying the local leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor *the local leaders* harus selalu diperhitungkan karena mereka

mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. Pada tahap ini Pemerintah Desa Bendosari dalam implementasi proses pemberdayaan masyarakat melibatkan kepala dusun/tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mendukung dan mendorong masyarakat agar berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah serta sosialisasi dari Pemerintah Desa Bendosari dan kepala dusun/tokoh masyarakat setempat dalam memberikan informasi terkait pemberdayaan masyarakat. Sehingga kepala dusun/tokoh masyarakat dapat menyalurkan informasi dan memberikan dorongan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

4) *Stimulating the community to realize that it has problems*

Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu untuk dipecahkan. Karena itu, masyarakat membutuhkan pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Untuk itu, Pemerintah Desa Bendosari dengan melakukan pendekatan dengan mengadakan komunikasi melalui musyawarah bersama untuk memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat juga dapat menyalurkan pendapatnya terkait program pemerintah desa. Sehingga Pemerintah Desa Bendosari dapat mengetahui keinginan masyarakat dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

5) *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan. Dalam tahap ini Pemerintah Desa Bendosari terus melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong peran aktif masyarakat dengan tidak memaksakan, namun membangun suasana kekeluargaan. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, Pemerintah Desa Bendosari dapat membangun suasana kebersamaan dibuktikan dengan tidak adanya konflik yang menentang pemerintah desa.

6) *Recognition of strengths and resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya. Pemerintah Desa Bendosari telah melakukan proses dalam membangun kesadaran terhadap kekuatan dan sumber untuk memanfaatkan potensi yang ada. Dalam proses ini, terdapat berbagai program pelatihan dan sosialisasi baik dari Pemerintah Desa Bendosari maupun pihak luar.

7) *Helping people to continue to work on solving their problems*

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara *contiuue*. Pada tahap ini, pihak dari Pemerintah Desa Bendosari melakukan berbagai upaya proses yang berjalan secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Kepala Desa Bendosari bahwa dibutuhkan kesabaran dalam memberdayakan masyarakat secara bertahap dengan tidak mengacu pada hasil melainkan proses pemberdayaan masyarakat.

8) *Increasing peoples ability for self-help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya. Proses dalam meningkatkan kemandirian masyarakat terus dibangun oleh Pemerintah Desa Bendosari dengan melakukan perencanaan dan pembuatan kebijakan bersama BPD Desa Bendosari terkait mendorong masyarakat yang berswadaya.

Adapun beberapa proses pemberdayaan yang belum sesuai dengan teori menurut *United Nation* (1956: 83-92), adalah sebagai berikut:

1) *Helping people to identify their most pressing problems*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya. Pada tahap ini, Pemerintah Desa Bendosari masih kurang maksimal dalam mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Bendosari hanya berfokus pada menjalankan progam pemberdayaan tanpa mengidentifikasi masalah yang paling menekan untuk segera dipecahkan.

2) *Fostering self-confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Berdasarkan wawancara oleh peneliti bahwa Pemerintah Desa Bendosari tidak maksimal dalam membangun rasa percaya diri masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat Desa Bendosari kurang percaya diri dalam mengembangkan potensi, sehingga proses pemberdayaan membutuhkan waktu yang cukup lama.

3) *Deciding on a program action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya. Dalam tahap ini, Pemerintah Desa Bendosari belum mempunyai data untuk menunjukkan dalam menentukan skala prioritas penetapan suatu program.

Berdasarkan analisis penulis terhadap kesesuaian teori terkait dengan fakta yang ada di Desa Bendosari bahwa membangun masyarakat dilakukan dengan melalui beberapa proses pemberdayaan masyarakat. Proses tersebut sebagai suatu tahap awal strategi pembangunan yang dapat memaksimalkan perubahan masyarakat untuk lebih berswadaya dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat kegagalan bagi Pemerintah Desa Bendosari sebagai badan pelaksana dalam menjalankan berbagai proses pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Bendosari sebagai badan pelaksana telah melaksanakan proses pemberdayaan secara baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tindakan yang dilakukan sesuai dengan teori tentang proses pemberdayaan masyarakat. Meskipun, dalam beberapa hal masih terdapat ketidaksesuaian proses pemberdayaan masyarakat terhadap teori. Dengan dibuktikan dengan belum adanya data-data yang menunjukkan skala prioritas dari suatu program pemberdayaan masyarakat. Skala prioritas merupakan tahap yang signifikan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menentukan program yang perlu ditekankan terlebih dahulu. Adanya ketidaksesuaian terhadap teori dapat mempengaruhi proses pemberdayaan

masyarakat, sehingga dalam fakta yang ada di Desa Bendosari membutuhkan rentang waktu yang cukup lama.

b. Pihak-pihak dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 10, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dengan adanya ketentuan umum Permendagri tersebut, bahwa dibutuhkan keterlibatan dari seluruh lapisan masyarakat, yaitu pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), kelompok atau organisasi desa maupun masyarakat desa. Keterlibatan seluruh masyarakat dapat meningkatkan tujuan dari pembangunan desa. Berdasarkan amanat dari Permendagri 114 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 10 tentang pedoman pembangunan desa, bahwa Pemerintah Desa Bendosari harus melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bendosari, kelompok atau organisasi Desa Bendosari, dan masyarakat Desa Bendosari.

Ditinjau dari hasil data oleh penulis bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari dibutuhkan peran dari Pemerintah Desa Bendosari, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bendosari, kelompok atau organisasi Desa Bendosari, dan masyarakat Desa Bendosari. Adapun pihak-pihak yang berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat, adalah sebagai berikut:

1) Kepala Desa Bendosari

Kepala Desa merupakan aktor penting dalam pemerintahan desa yang memiliki peran secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek pembangunan desa. Sebagaimana peran Kepala Desa Bendosari sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari berperan dalam pembuatan kebijakan melalui program pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2009 sebagai upaya pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari.

2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang berada di desa, bertugas untuk meningkatkan kekuatan ekonomi desa maupun kesejahteraan masyarakat desa. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, peran dari BUMDes Desa Bendosari dibuktikan dengan adanya usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes melalui pembangunan wisata sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat untuk diberdayakan menjadi lebih mandiri.

3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan aktor yang bertugas untuk membantu dan mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Peran BPD Desa Bendosari dibuktikan dengan melaksanakan musyawarah rutin melalui kegiatan tahlilan (acara doa bersama) di setiap dusun. Dengan adanya musyawarah tersebut BPD Desa Bendosari

dapat mengetahui perkembangan serta masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari.

4) Masyarakat Desa Bendosari

Masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi obyek melainkan juga sebagai subyek dalam program pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat merupakan faktor utama sebagai upaya keberlangsungan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya peran dari masyarakat itu sendiri, maka program-program pemberdayaan dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari dan Bapak Yeni Widayat selaku Sekretaris Desa Bendosari antusiasme masyarakat melalui sifat gotongroyong yang berkembang di masyarakat terhadap program-program yang diberikan pemerintah Desa Bendosari.

Berdasarkan keterlibatan pihak-pihak melalui peran dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari, bahwa hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 114 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 10 tentang pedoman pembangunan desa. Dengan adanya keterlibatan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari Pemerintah Desa Bendosari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bendosari, BUMDes Desa Bendosari maupun kelompok atau organisasi Desa Bendosari serta masyarakat Desa Bendosari, dapat meningkatkan keberhasilan dari tujuan pemberdayaan masyarakat.

2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara yang ada di lapangan, sehingga penulis dapat menganalisa dan menyimpulkan terkait pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari. Selanjutnya data-data tersebut ditinjau dengan kesesuaian teori tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata.

a. Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan untuk mendorong peran aktif masyarakat. Peran aktif masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan dampak positif dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pola pendekatan terhadap masyarakat harus dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bendosari untuk menciptakan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bendosari terdapat kesesuaian dengan salah satu teori tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun klasifikasi penulis terhadap kesesuaian pola pendekatan masyarakat di Desa Bendosari dengan teori oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 35-36), sebagai berikut:

1. Membentuk Iklim yang Memungkinkan Masyarakat Berkembang

Dalam membentuk iklim bagi masyarakat terdapat dua hal yang mendasar adalah sebagai berikut:

- a) Menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan/motivasi untuk berkembang. Proses menyadarkan masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.
- b) Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah, yang disebut dengan *participatory design and planning*. Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan rasa keberpihakan kepada masyarakat.

Berdasarkan tahap membentuk iklim masyarakat, Pemerintah Desa Bendosari dengan berbagai upaya memberikan kesadaran dan motivasi masyarakat melalui pendekatan membangun suasana kekeluargaan. Pendekatan dilakukan dengan melakukan *survey* maupun analisis melalui musyawarah bersama kepala dusun/tokoh masyarakat tingkat dusun dan organisasi atau lembaga di Desa Bendosari. Keterlibatan kepala dusun/tokoh masyarakat maupun organisasi dan lembaga desa agar melakukan pendekatan melalui acara tahlil, karangtaruna, dan acara yang menjadi sebuah tradisi masyarakat Desa Bendosari. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan secara psikologis dengan membangun suasana

kekeluargaan serta mengajak masyarakat dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari.

2. Memperkuat Potensi yang Ada

Memperkuat (*empowerment*) dilakukan dengan mengorganisasikan masyarakat dalam kelompok-kelompok/komunitas pembangun, yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan-masukan (*input*) serta membuka berbagai peluang-peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya. Dalam tahap ini, Pemerintah Desa Bendosari membentuk kelompok sadar wisata (*Pokdarwis*) Desa Bendosari untuk mengembangkan potensi yang ada melalui kegiatan pariwisata. Adapun pembentukan BUMDes Desa Bendosari dalam pengelolaan serta pengembangan pada bidang pariwisata desa. Dengan adanya pariwisata yang menjadi salah satu strategi pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam memaksimalkan potensi melalui pembangunan desa wisata.

3. Proses Perlindungan (Pendampingan)

Secara aplikatif *empowerment* terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah dilakukan melalui dua hal, yaitu:

- a) Penguatan akses (*accessibility empowerment*). Pada pemberdayaan kelompok masyarakat *empowerment* dilakukan melalui menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok pemberdaya. Kebutuhan akan akses ini sangat menentukan *share* dan partisipasi antar *stakeholders* dalam proses pemberdayaan.

b) Penguatan teknis (*technical empowerment*) dilakukan sebagai bagian dari kegiatan *advocacy* sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas dari kelompok yang diberdayakan. Keterlibatan secara aktif dari masing-masing *stakeholders* diwujudkan dalam bentuk *share* nyata seperti program, pendanaan dan kebijakan (*policy*).

Pada tahap perlindungan dan pendampingan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Bendosari memberikan akses kepada masyarakat dalam keterlibatan untuk berpartisipasi melalui perencanaan program dan implementasi program. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan pembentukan kelompok dan lembaga yang dikelola oleh masyarakat, seperti LPMD, karang taruna, PKK dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pemerintah desa juga memberikan perlindungan dan pendampingan jalannya organisasi masyarakat dengan berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk memperkuat kapasitas masyarakat yang diberdayakan.

Berdasarkan analisis pola pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian teori dari Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 35-36). Pemerintah Desa Bendosari melaksanakan pola dengan tepat untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Adapun kerjasama dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Malang untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat Desa Bendosari.

b. Bentuk Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat terdapat bentuk pendekatan-pendekatan yang menjadi salah satu bagian strategi pendekatan yang digunakan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat. Bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Bendosari, pemerintah desa menerapkan beberapa pendekatan terhadap masyarakat. Hal ini digunakan dalam meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi melalui pemberdayaan masyarakat.

Ditinjau dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi oleh penulis menunjukkan bahwa bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat terdapat kesesuaian dengan teori yang ada. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pendekatan oleh Pemerintah Desa Bendosari terdapat kesesuaian dengan teori Sumaryadi (2005: 97-98). Sebagaimana menurut Sumaryadi (2005: 97-98), dalam menggambarkan konsep pemberdayaan terdapat tiga tahapan sebagai bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu politis, organisasi, dan individu. Sehingga dapat diklasifikasikan dalam analisis sebagai berikut:

1) Pendekatan Politis

Pendekatan secara politis sendiri dapat diartikan membangun hubungan-hubungan badan pelaksana dengan masyarakat. Dalam pendekatan secara politis, Desa Bendosari telah membangun hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, pemerintah desa dengan organisasi masyarakat, dan organisasi masyarakat dengan masyarakat. Pada dasarnya dengan

membangun hubungan tersebut, bahwa Pemerintah Desa Bendosari berupaya untuk melakukan pendekatan secara berkesinambungan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

2) Pendekatan Organisasi

Pendekatan secara organisasi dapat diartikan sebagai pembentukan kekuatan dan kapasitas badan pelaksana dengan membentuk dan memperbaiki lembaga dan organisasi yang membantu berjalannya program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Bendosari selaku badan pelaksana dalam pendekatan secara organisasi dengan membentuk dan memperbaiki sistem organisasi desa, seperti BUMDes Desa Bendosari, LPMD Desa Bendosari dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk menjadi fasilitator bagi masyarakat. Organisasi Desa Bendosari diharapkan sebagai akses pemerintah desa untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.

3) Pendekatan Individu

Dalam pendekatan secara individu, Pemerintah Desa Bendosari melakukan berbagai upaya untuk memberikan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat. Bentuk pendekatannya sendiri dengan mengundang serta mengadakan acara silaturahmi maupun musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa Bendosari. Adapun mengadakan musyawarah dengan seluruh tokoh masyarakat di dusun sebagai komunikasi dalam melakukan pendekatan yang selanjutnya untuk disalurkan kepada masyarakat. Hal ini dapat memunculkan keterbukaan bagi perkembangan dan pertumbuhan dengan adanya sinergitas antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Dengan adanya bentuk pendekatan sebagai bagian dari pendekatan masyarakat dengan membangun sinergitas antara pemerintah desa, organisasi desa serta masyarakat desa. Dalam implementasi yang ada di Desa Bendosari bahwa bentuk pendekatan yang dilakukan tidak hanya dengan satu aspek melainkan terdapat berbagai aspek-aspek yang saling berkesinambungan. Karena dalam mewujudkan suatu pemberdayaan masyarakat dibutuhkan keterlibatan yang berjalan berkesinambungan dari pemerintah desa, organisasi desa serta masyarakat desa.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

a. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari dalam rangka mewujudkan pembangunan desa mandiri dengan menggunakan strategi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Pembangunan desa wisata direncanakan sebagai fokus utama Pemerintah Desa Bendosari yang menjadi alternatif bagi masyarakat agar mampu berkembang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembangunan desa wisata dapat memanfaatkan berbagai potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata terdapat berbagai model pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana menurut Jack Rothman (1974) dalam Harry Hikmat (2010: 66) terdapat 3 (tiga) model dalam praktek pemberdayaan atau pembangunan masyarakat, yaitu model pengembangan lokal

(*locality development model*), model perencanaan sosial (*social planning model*) dan model aksi sosial (*social action model*). Berdasarkan tiga model tersebut bahwa Pemerintah Desa Bendosari dalam strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata menggunakan model pengembangan lokal. Dalam model pengembangan lokal berfokus pada perubahan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat secara optimal untuk menentukan tujuan dan pelaksanaan tindakan perubahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan pariwisata dengan mengembangkan potensi lokal masyarakat.

Selain adanya model pemberdayaan masyarakat terdapat strategi pemberdayaan berbasis wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bendosari, yang berpedoman pada strategi dari PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Dalam strategi untuk memaksimalkan PNPM Mandiri Pariwisata tersebut, Pemerintah Desa Bendosari melakukan berbagai upaya dengan memaksimalkan segala potensi yang ada di desa, baik potensi lingkungan maupun potensi dalam diri masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya strategi untuk meningkatkan SDM masyarakat desa, membentuk organisasi desa dan meningkatkan fungsi kelembagaan desa.

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bendosari adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya masyarakat di Desa Bendosari sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan tujuan pemahaman tentang bidang pariwisata. Masyarakat sebagai aktor utama

pembangunan wisata diharapkan mampu ikut berpartisipasi dan meningkatkan kemampuannya dalam program-program di bidang pariwisata oleh Pemerintah Desa Bendosari. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti bahwa Pemerintah Desa Bendosari melaksanakan program dalam pembangunan sumber daya masyarakat, sebagai berikut:

- a) Membangun sumber daya masyarakat melalui pendidikan, karena tingkat pendidikan masyarakat lokal yang masih rendah menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk pembangunan desa wisata. Pemerintah Desa Bendosari sejak tahun 2009 berupaya untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta memberikan apresiasi kepada siswa-siswi di Desa Bendosari. Hal ini dibuktikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SD dan SMP yang mendapatkan juara 3 besar maupun memberikan uang saku kepada masyarakat yang sedang melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.
- b) Membangun sumber daya masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan, sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pariwisata yang ada di desanya. Kegiatan ini dilakukan melalui pelatihan yang diadakan oleh desa maupun melalui tokoh masyarakat dari setiap dusun yang kemudian untuk disalurkan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya seperti acara tahlil, karang taruna dan PKK.
- c) Membangun sumber daya melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Bendosari, yang kemudian menjadi tim pemandu wisata desa. Kelompok ini dibentuk dari berbagai organisasi atau kelompok karang

taruna yang ada di setiap dusun untuk memaksimalkan kegiatan pariwisata di Desa Bendosari.

2) Pembentukan dan perbaikan sistem organisasi dan lembaga di Desa Bendosari untuk memaksimalkan kinerja dalam pembangunan desa wisata adalah sebagai berikut:

a) Membentuk BUMDes sebagai lembaga yang mengelola kegiatan-kegiatan pariwisata di Desa Bendosari. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat memaksimalkan usaha-usaha asli milik desa pada bidang pariwisata.

b) Melakukan pembinaan terhadap organisasi maupun kelompok masyarakat sebagai bentuk strategi pembangunan wisata dengan mengorganisir masyarakat untuk meningkatkan kontribusi pada bidang pariwisata.

3) Meningkatkan fungsi kelembagaan di Desa Bendosari sebagai strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam perencanaan kebijakan dan menjalin kerjasama dalam pembangunan desa wisata. Adapun strategi meningkatkan fungsi kelembagaan Desa Bendosari, sebagai berikut:

a) Perencanaan dan pembuatan kebijakan terkait kegiatan pada bidang pariwisata bersama dengan BPD Desa Bendosari maupun masyarakat Desa Bendosari dengan mengadakan musyawarah di Balai Desa Bendosari. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat serta masukan-masukan dalam pembangunan desa wisata di Desa Bendosari.

b) Menjalinkan kerjasama dengan pihak luar yang bertujuan untuk membantu pencapaian sasaran dalam pembangunan wisata di Desa Bendosari. Bentuk kerjasama dengan pihak luar seperti, Pemerintah Desa Bendosari

berkerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk membantu memberikan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Kerjasama juga melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Malang untuk memberikan pelatihan serta membantu pengelolaan objek pariwisata, yang masuk ke dalam wilayah Dinas Kehutanan.

Adanya strategi diatas dapat mewakili implementasi yang sesuai dengan pedoman PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pemerintah Desa Bendosari juga melakukan berbagai promosi seperti promosi melalui *website* Desa Bendosari dan *social media*, maupun adanya kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dalam pembangunan dan pengelolaan desa wisata. Hal ini cukup membuktikan bahwa Pemerintah Desa Bendosari dalam segi strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata sudah tepat.

Dari segi implementasi strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bendosari masih terdapat berbagai kelemahan yang muncul dari pengelolaan hasil pariwisata yang belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada kejelasan struktur organisasi pengelola pariwisata, disebabkan oleh rendahnya tingkat sumber daya manusia. Karena pada kenyataannya pembangunan sumber daya dibutuhkan waktu relatif lama, walaupun sudah terdapat progam yang menekankan pada pembangunan SDM masyarakat.

Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan dengan adanya fakta di lapangan dengan teori maupun peraturan pemerintah, kunci terwujudnya sasaran

pembangunan berbasis masyarakat adalah membangun pondasi masyarakat melalui meningkatkan sumber daya masyarakat (SDM) Desa Bendosari. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara, bahwa dengan meningkatkan sumber daya dan fungsi kelembagaan sebagai pondasi yang menjadi kunci keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri.

b. Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Dalam jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari dengan menempatkan desa dan masyarakat desa sebagai pusat pengembangan pariwisata. Hal ini sesuai dengan kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan desa ekowisata, yaitu model gugusan (*cluster*) wisata-desa terkait. Model gugusan (*cluster*) wisata-desa terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan desa wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi pendukung sekaligus penerima manfaat dari pembangunan pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di Desa Bendosari sebagai situs penelitian, bahwa terdapat kegiatan pariwisata melalui pengembangan desa ekowisata. Hal ini dibuktikan dengan adanya objek wisata yang mendukung desa ekowisata sebagai fasilitator untuk memberdayakan

masyarakat setempat. Desa ekowisata berbasis masyarakat dapat diartikan dengan pembangunan wisata yang berwawasan lingkungan dengan segala potensi yang ada di desa, baik potensi alam maupun kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Para wisatawan melakukan aktivitas pariwisata berbasis alam maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan masyarakat dan pemahaman lingkungan yang dikelola berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari mempunyai tujuan sebagai rumusan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dengan pembangunan desa ekowisata. Berdasarkan tujuan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, Desa Bendosari mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Bendosari. Hal ini sesuai dengan pedoman PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, bahwa harus ada kejelasan tujuan dalam pembangunan wisata berbasis masyarakat. Ditinjau dari analisis data yang ada dilapangan dengan pedoman PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010, bahwa Pemerintah Desa Bendosari dengan tujuan utama adalah mewujudkan pembangunan desa mandiri melalui pemberdayaan masyarakat berbasis wisata. Terwujudnya pembangunan desa mandiri dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan masyarakat Desa Bendosari lebih berswadaya.

d. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata mempunyai manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi aparat Desa Bendosari. Sebagaimana dalam pedoman PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2010 oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, kegiatan pembangunan wisata harus memberikan manfaat bagi desa maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dengan aparat Desa Bendosari bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Pemerintah Desa Bendosari melainkan bagi masyarakat sebagai sasaran utama dari kegiatan desa wisata. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak M. Khoirun, SE., selaku Kepala Desa Bendosari bahwa manfaat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata bagi masyarakat adalah meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bendosari. Selain itu, manfaat bagi aparat desa adalah meningkatkan perannya sebagai aparat desa yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga aparat Desa Bendosari dapat meningkatkan kapabilitas dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi aparat desa maupun masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa mandiri.

4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Ditinjau dari segi internal dan eksternal faktor pendukung yang ada di Desa Bendosari dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu:

1. Faktor Internal

a) Partisipasi Masyarakat Lokal

Partisipasi masyarakat lokal sebagai faktor pendukung yang dibuktikan dengan tingginya antusiasme masyarakat Desa Bendosari untuk ikut berpartisipasi secara langsung dalam membantu pembangunan wisata sebagai alternatif untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang direncanakan oleh Pemerintah Desa sejak tahun 2009. Kontribusi masyarakat juga ditujukan melalui program kegiatan pelatihan, pemberdayaan sadar lingkungan dan budaya.

b) Peran Pemerintah Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadikan Desa Bendosari sebagai desa wisata. Hal ini dibuktikan dengan upaya Pemerintah Desa untuk memenuhi standart kinerja yang aktif dalam membuat program-program pelatihan yang dapat mengembangkan kemampuan masyarakat dan potensi masyarakat di Desa Bendosari. Peran

Pemerintah Desa menjadi faktor pendukung dalam mempengaruhi keberhasilan dari pembangunan desa wisata.

c) Potensi Desa Bendosari

Potensi sumberdaya alam Desa Bendosari sangat mendukung yang dikelilingi pegunungan, seperti terdapatnya beberapa objek air terjun yang sangat indah, potensi sungai, hamparan sawah dan kebun dengan berbagai jenis tanaman yang beragam. Adapun potensi budaya yang khas seperti ritual kerbau, serta keramahan masyarakat lokal menjadikan destinasi bagi pembangunan desa wisata. Sehingga Desa Bendosari dengan segala potensinya sangat mendukung dalam mencapai tujuan sebagai desa wisata.

2. Faktor Eksternal

a) Dukungan dari Pihak Luar

Dalam pembangunan desa wisata di Desa Bendosari terdapat dukungan dari pihak luar yang mendukung keberhasilan untuk mencapai tujuan utama dari pembangunan desa wisata. Dukungan dari pihak luar dapat dibuktikan dengan adanya SK (Surat Keterangan) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang sebagai bukti dukungan pembangunan desa wisata di Desa Bendosari. Adapun dukungan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dengan melakukan sosialisasi dan *workshop* terkait pembangunan pariwisata di Desa Bendosari.

b) Kerjasama dari Pihak Luar

Bentuk kerjasama dari pihak luar termasuk dalam faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari. Sebagai buktinya adalah dengan adanya kerjasama dari

pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Malang untuk pengelolaan desa wisata di Desa Bendosari. Dinas Kehutanan Kabupaten Malang memberikan ijin untuk membangun objek wisata yang sebagian besar adalah kawasan yang menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.

b. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

1. Faktor Internal

a) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

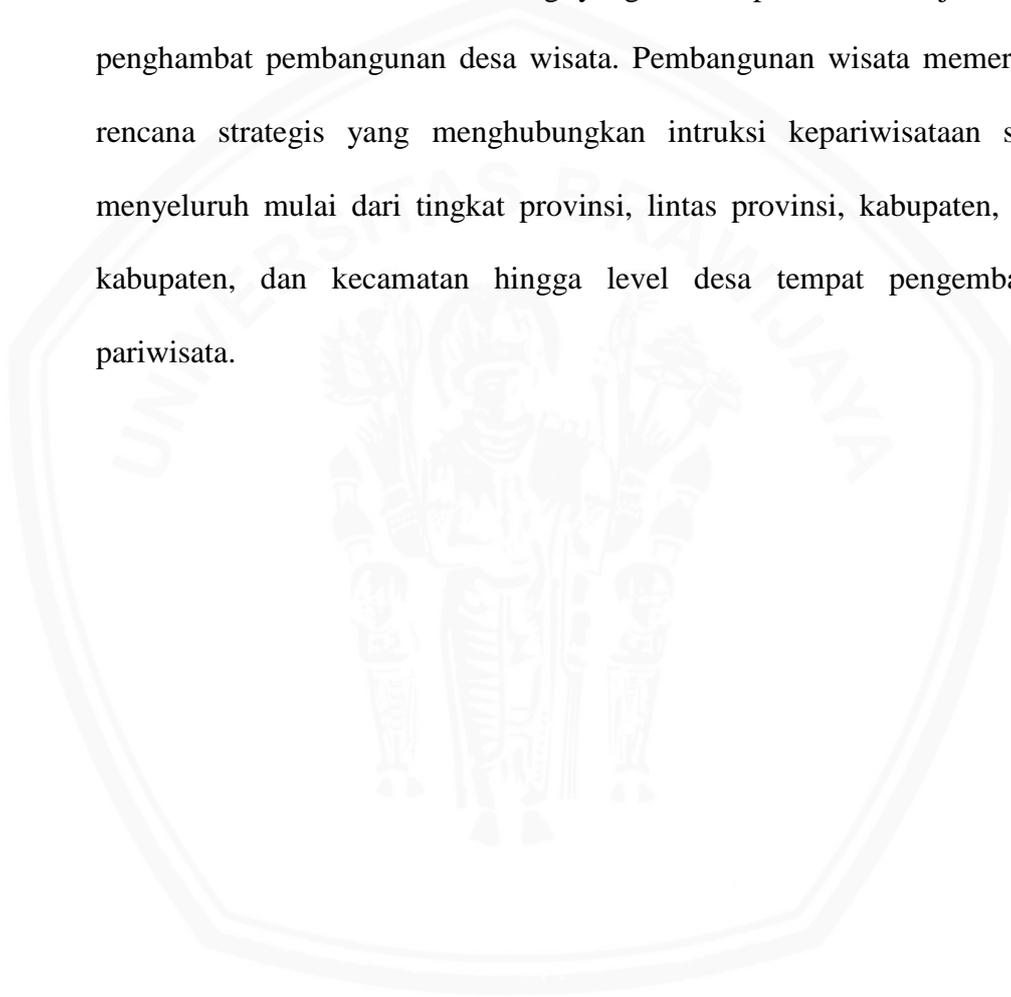
Kualitas SDM masyarakat menjadi penghambat pemberdayaan masyarakat berbasis wisata melalui pembangunan desa wisata di Desa Bendosari. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat di Desa Bendosari hanya berpendidikan sekolah dasar. Sehingga pelaksanaan program-program kegiatan harus dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan yang membutuhkan waktu lama.

b) Keterbatasan Dana dalam Pembangunan Desa Wisata

Dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata melalui pembangunan desa wisata di Desa Bendosari yang selama ini masih terkendala oleh dana yang merupakan sumber utama pembangunan infrastruktur untuk melengkapi kegiatan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan pembangunan pariwisata secara efektif dan efisien.

2. Faktor Ekternal

Kurangnya peran Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pariwisata serta belum memberikan bantuan secara finansial untuk Pemerintah Desa Bendosari. Peran Pemerintah Daerah Malang yang masih pasif ini menjadi faktor penghambat pembangunan desa wisata. Pembangunan wisata memerlukan rencana strategis yang menghubungkan intruksi kepariwisataan secara menyeluruh mulai dari tingkat provinsi, lintas provinsi, kabupaten, lintas kabupaten, dan kecamatan hingga level desa tempat pengembangan pariwisata.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan oleh penulis tentang pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut:

1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari, meliputi:

- a. Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari sebagai badan pelaksana telah melaksanakan proses pemberdayaan secara baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tindakan yang dilakukan sesuai dengan teori menurut *United Nation* (1956: 83-92) dalam Tampubolon (2006) tentang proses pemberdayaan masyarakat. Meskipun, dalam beberapa hal masih terdapat ketidaksesuaian proses pemberdayaan masyarakat terhadap teori. Adanya ketidaksesuaian terhadap teori dibuktikan dengan belum adanya data-data yang menunjukkan skala prioritas dari suatu program pemberdayaan masyarakat. Skala prioritas merupakan tahap yang signifikan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menentukan program yang

perlu ditekankan terlebih dahulu dapat mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, sehingga membutuhkan rentang waktu yang cukup lama dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari.

b. Pihak-pihak dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Dalam ketentuan umum Permendagri 114 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 10, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosari, yaitu:

- 1) Kepala Desa Bendosari
- 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bendosari
- 3) Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bendosari
- 4) Masyarakat Desa Bendosari

2. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari, meliputi:

a. Tahapan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Pola pendekatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bendosari terdapat kesesuaian dengan salah satu teori tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun klasifikasi kesesuaian tahap-tahap pendekatan masyarakat di Desa Bendosari dengan teori oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012: 35-36), sebagai berikut:

- 1) Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang
- 2) Memperkuat potensi yang ada
- 3) Proses perlindungan (Pendampingan)

b. Bentuk Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bendosari

Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat terdapat bentuk pendekatan-pendekatan yang menjadi salah satu bagian strategi pendekatan yang digunakan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat. Bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Bendosari, pemerintah desa menerapkan beberapa bentuk pendekatan terhadap masyarakat, adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan politis
 - 2) Pendekatan organisasi
 - 3) Pendekatan Individu
3. Pembangunan Wisata melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari, meliputi:
- a. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari dalam strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata menggunakan model pengembangan lokal. Dalam model pengembangan lokal berfokus pada perubahan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat secara optimal untuk menentukan tujuan dan pelaksanaan tindakan perubahan. Selain adanya model pengembangan lokal dalam strategi pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, terdapat strategi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sumber daya masyarakat di Desa Bendosari
- 2) Pembentukan dan perbaikan sistem organisasi dan lembaga di Desa Bendosari
- 3) Meningkatkan fungsi kelembagaan di Desa Bendosari

Adanya strategi diatas dapat mewakili implementasi yang sesuai dengan pedoman PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2014 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

b. Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Dalam jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata di Desa Bendosari dengan menempatkan desa dan masyarakat desa sebagai pusat pengembangan pariwisata melalui desa ekowisata. Hal ini sesuai dengan kerangka progam PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2014 sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan desa ekowisata, yaitu model gugusan (*cluster*) desa wisata-desa terkait dengan menempatkan desa dan masyarakat sebagai pendukung dan penerima manfaat dari pembangunan.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari mempunyai tujuan sebagai rumusan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dengan pembangunan desa ekowisata. Berdasarkan tujuan pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, Desa Bendosari mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Bendosari.

d. Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

Pemerintah Desa Bendosari dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata mempunyai manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi aparaturnya Desa Bendosari. Sebagaimana dalam pedoman PNPM Mandiri Pariwisata tahun 2014 oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, kegiatan pembangunan wisata harus memberikan manfaat bagi desa maupun masyarakat.

4. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari

a. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

- 1) Faktor Internal yang meliputi partisipasi masyarakat lokal, peran Pemerintah Desa Bendosari dan potensi Desa Bendosari
- 2) Faktor Eksternal yang meliputi dukungan dari pihak luar dan kerjasama dari pihak luar.

b. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata di Desa Bendosari

- 1) Faktor Internal yang meliputi rendahnya kualitas SDM masyarakat dan keterbasan dana dalam pembangunan desa wisata.
- 2) Faktor Eksternal yang meliputi kurangnya peran Pemerintah Daerah.

B. Saran

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang disajikan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran oleh penulis tentang pemberdayaan masyarakat berbasis wisata dalam rangka terwujudnya pembangunan desa mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan sosialisasi terkait dampak positif pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat terkait pengembangan usaha atau industri pariwisata, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa mandiri.
2. Meningkatkan kemitraan dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, sehingga dapat membantu dana pembangunan serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan Pemerintah Desa Bendosari maupun masyarakat Desa Bendosari.
3. Menentukan skala-skala prioritas pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat berbasis wisata, sehingga dapat mempermudah untuk penentuan program-program yang paling menekan serta dapat meningkatkan keberhasilan suatu program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusta, Ivanovich dan Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pusataka Obor Indonesia
- Alfitri. 2011. *Community Development Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bulkin, Imron. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Departemen Dalam Negeri, 2000. *Tentang Visi, Misi, Startegi, dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa*
- Hanif, Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (edisi revisi). Bandung: Humaniora Utama Press
- Indrajit, Wisnu. Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Malang: Intrans Publishing
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Pitana, I. Gede dan Gayatri, Putu Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin. 2001. *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Info Sosial Ekonomi
- Risyanti, Riza. Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor
- Sabtoni, Anang dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sondang P. Siagian, 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press

Sunyoto Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sutoro, Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa)*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Wahyudin, Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Peraturan-Peraturan

UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 90 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 34 ayat (2)

Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 5

Peraturan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019

Situs Internet

Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Timur, diakses pada tanggal 12 November 2017 dari <http://www.bappeda.jatimprov.go.id>

Desa Wisata Bendosari, diakses pada tanggal 12 November 2017 dari <http://desa-bendosari.malangkab.go.id>

PNPM Mandiri, diakses pada tanggal 23 Februari 2018 dari <http://www.pnpm-mandiri.org>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Desa*, diakses pada tanggal 20 November 2017 dari <https://kbbi.web.id/desa>

Sosialisasi Gerakan Sadar Wisata dan Akasi Sapta Pesona di Kabupaten Malang 2017, diakses pada tanggal 12 November 2017 dari <http://disparbud.malangkab.go.id>

Jurnal

Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto. Strategi capacity building pemerintah desa dalam pengembangan potensi kampoeng ekowisata berbasis masyarakat lokal, Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No.3, Hal. 464-470

Soetarso Priasukmana dan R. Mohamad Mulyadin. Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. *Info Sosia L Ekonomi* Vol.2, No.1, Tahun 2001, Hal. 37

Tampubolon, Mangatas. 2006. "*Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*". www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm. Diakses pada 16 Januari 2018

LAMPIRAN



Lampiran 1 Surat pernyataan telah selesai melakukan penelitian di Desa Bendosari



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PUJON
DESA BENDOSARI

Jl. M. Said Kode Pos 65391 Telp. 085.303.410.048 – 085.303.410.049
 Website: [Http://desa-bendosari.malangkab.go.id](http://desa-bendosari.malangkab.go.id) - E-Mail: bendosari5758@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 475 / 674/ 35.07.26.2001 / 2018

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang menerangkan bahwa :

Nama	: YUSUF DHEO RIVALDY
Instansi/Jabatan	: Universitas Brawijaya / mahasiswa
Alamat	: Jl. Mayjen Hariono 167 Malang
Jenis Kegiatan	: Penelitian Skripsi
Lokasi Kegiatan	: Desa Bendosari Kec. Pujon Kab. Malang
Durasi Kegiatan	: Satu Bulan
	Terhitung mulai tanggal : 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal : 05 April 2018
Pengikut	: -
Tema	: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Desa Bendosari sesuai waktu yang ditentukan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendosari, 14 Mei 2018
 Kepala Desa



M. KHOIRUN, SE

Lampiran 2 Foto Lokasi Penelitian di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Kantor Desa Bendosari



Sumber: Dokumentasi Penulis

Tugu Masuk Desa Ekowisata Bendosari



Sumber: Dokumentasi Penulis

Contoh Objek Wisata di Desa Bendosari

Taman Pinus Bendosari



Sumber: Dokumentasi Penulis

Grojokan Sewu

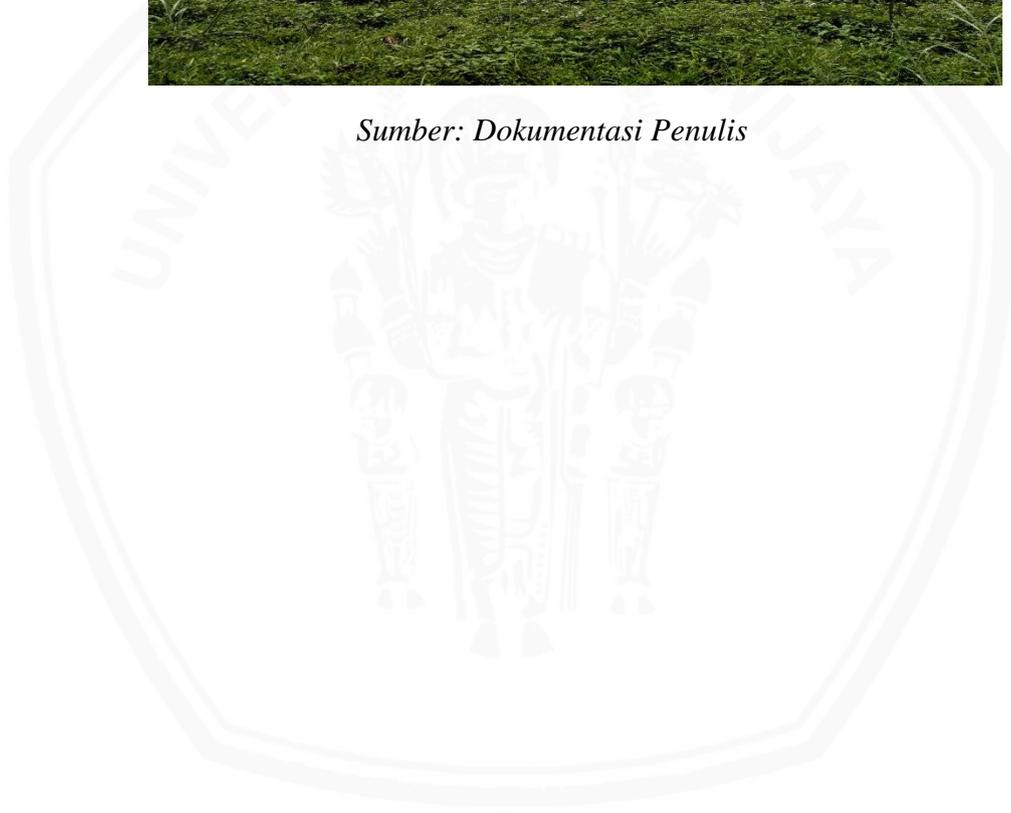


Sumber: Dokumentasi Penulis

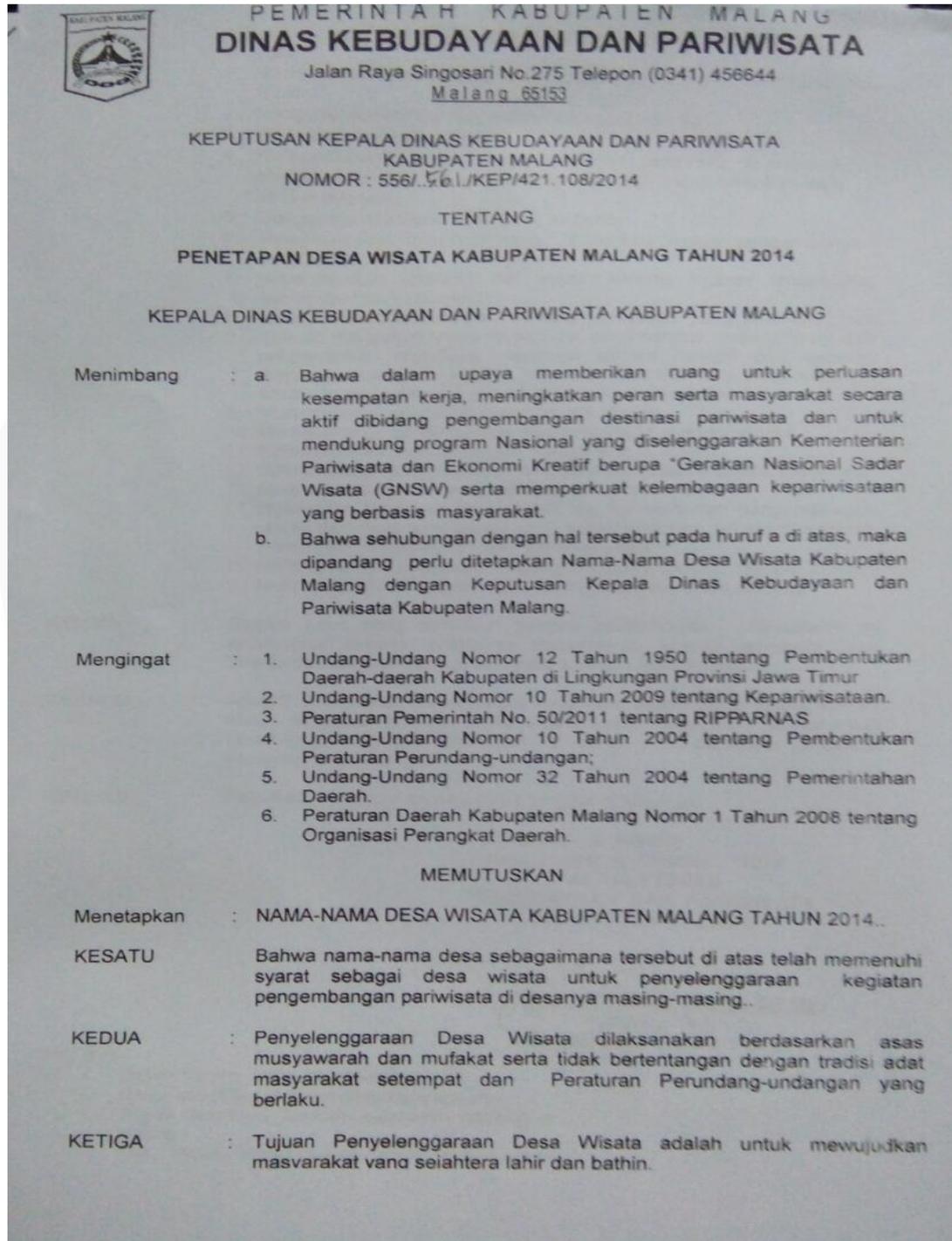
Coban Sadang



Sumber: Dokumentasi Penulis



Lampiran 3 Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Nomor: 556/561/KEP/421.108/2014 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Malang Tahun 2014



- KEEMPAT** : Adapun tugas dan fungsi Pengelola Desa Wisata Desa adalah :
- A. Tugas :**
1. Menganalisis potensi desa untuk dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata;
 2. Menganalisis fasilitas dan infrastruktur yang tersedia;
 3. Menganalisis pangsa pasar;
 4. Memperhatikan daya dukung; terhadap mutu fisik & non-fisik atraksi serta tingkat kepuasan wisata yang dapat diberikan oleh atraksi tersebut;
 5. Mengevaluasi kondisi SDM yang tersedia;
 6. Memperkirakan investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata;
 7. Melaksanakan implementasi sapta pesona kepada masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
 8. Melaksanakan tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi yang dipimpin secara terpadu dengan semua stakeholder pariwisata;
 9. Melaksanakan pengembangan produk wisata;
 10. Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi wisata;
 11. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di sekitar;
 12. Melaksanakan penguatan kerjasama antar sesama pelaku pariwisata;
 13. Melaksanakan pemasaran dan promosi pariwisata;
 14. Melakukan terobosan yang lebih inovatif terhadap pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang memperhatikan prinsip partisipatif, Kolaboratif, Keterpaduan, dan Berkelanjutan;
 15. Melaksanakan pelaporan kegiatan kepada Bupati Malang melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada partisipasi masyarakat, kinerja Pengelola Desa Wisata dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini atau diketahui terdapat desa wisata yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2014
**KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MALANG**

MADE ARYA WEDANTHARA, SH,MSi
Pembina Tk.I
NIP. 196908111995031002

MBUSAN:

- Yth.
1. Bupati Malang (sebagai laporan);
 2. Bapak Wakil Bupati Malang (sebagai laporan);
 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang di Malang;
 4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BERBASIS WISATA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA
PEMBANGUNAN DESA MANDIRI**

(Studi Pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

Daftar pertanyaan untuk Kepala Desa Bendosari dan Aparat Desa Bendosari.

1. Seperti apakah gambaran umum Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
2. Bagaimanakah struktur Organisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
3. Apakah tujuan dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
4. Apakah manfaat dari Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata sebagai upaya terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang meliputi beberapa faktor, yaitu:

a. Proses Pemberdayaan Masyarakat

6. Seperti apakah proses yang terjadi pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
7. Bagaimanakah tahapan-tahapan yang diterapkan pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
8. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
9. Bagaimanakah bentuk keterlibatan pihak-pihak yang terkait dengan proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?

b. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

10. Bagaimanakah pola pendekatan yang diterapkan pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
11. Seperti apakah bentuk pendekatan yang diterapkan pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata

12. Bagaimanakah penerapan strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
13. Sejauh manakah keberhasilan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari? (Khususnya dalam mewujudkan pembangunan Desa Mandiri).
14. Seperti apakah jenis kegiatan yang dilakukan pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
15. Seperti apa kapasitas sumber daya yang ada pada Desa Bendosari dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
16. Bagaimanakah tata kelola Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?
17. Apakah terdapat faktor-faktor pendukung pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?

Jika ya, maka peneliti akan meninjaunya dari dua faktor, yaitu meliputi:

- a. Faktor internal**
- b. Faktor Eksternal**

18. Apa sajakah faktor pendukung yang berasal dari dalam pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?

19. Apa sajakah faktor pendukung yang berasal dari luar pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?

20. Apakah terdapat faktor-faktor hambatan pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?

Jika ya, maka peneliti akan meninjaunya dari dua faktor, yaitu meliputi:

c. Faktor internal

d. Faktor Eksternal

21. Apakah saja hambatan yang berasal dari dalam pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?

22. Apakah saja hambatan yang berasal dari luar pada Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata dalam Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri di Desa Bendosari?

CURRICULUM VITAE

Nama : Yusuf Dheo Rivaldy

Nomor Induk Mahasiswa : 145030107111025

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 24 Februari 1996

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Raya Ngeprih No. 34, RT 01/RW 05 Desa
Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Email : aldyrivaldy96@yahoo.com
dheorivaldy@gmail.com

Pendidikan : 1. SDN Ngroto 4 Pujon-Malang, 2002-2008
2. SMPN 1 Pujon-Malang, 2008-2011
3. SMAN 1 Talun-Blitar, 2011-2014
4. S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya Malang, 2014-2018

Pengalaman Kerja : Magang di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur,
2017

Publikasi atau Karya Ilmiah : Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wisata Dalam
Rangka Terwujudnya Pembangunan Desa Mandiri
(Studi Pada Desa Bendosari Kecamatan Pujon
Kabupaten Malang) Skripsi